



PENELITIAN TENTANG

**EVALUASI MIDTERM
REPELITA VI
SEKTOR APARATUR NEGARA**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PERWAKILAN JAWA BARAT
1995/1996**



PENELITIAN TENTANG

**EVALUASI MIDTERM
REPELITA VI
SEKTOR APARATUR NEGARA**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PERWAKILAN JAWA BARAT
1995/1996**

EXECUTIVE SUMMARY

Pembangunan aparatur negara pada Repelita VI merupakan kelanjutan dari Repelita V. Demikian juga, hasil-hasil Repelita VI juga harus mampu menjadi landasan yang kuat bagi penyusunan Repelita VII. Oleh karena itu, penyusunan Repelita VII untuk Sektor Aparatur Negara harus didasarkan atas evaluasi pelaksanaan Repelita VI. Dengan latar belakang itu, maka dilakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan program-program Sektor Aparatur Negara di Daerah selama Repelita VI yang telah berjalan (*mid-term evaluation*). Kegiatan tersebut secara garis besar mencakup aspek-aspek kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan termasuk pengawasan.

Sasaran pembangunan aparatur negara pada Repelita VI adalah tertatanya manajemen aparatur negara untuk meningkatkan kualitas, kemampuan dan kesejahteraan manusia; terwujudnya sistem administrasi negara yang makin andal, profesional, efisien, efektif, serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis; dan meningkatnya perwujudan otonomi daerah tingkat II yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Sasaran lainnya adalah terwujudnya sistem kearsipan yang andal, yang dikelola secara profesional sebagai bagian yang terpadu dalam pengembangan sistem manajemen modern untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Untuk mencapai sasaran PAN sebagaimana diamanatkan dalam GBHN 1993 itu, maka dalam Repelita VI telah ditetapkan Kebijaksanaan Pembangunan Aparatur Negara yang meliputi: (a) Peningkatan Disiplin Aparatur Negara; (b) pemantapan organisasi kenegaraan; (c) Pendayagunaan organisasi pemerintahan; (d) Penyempurnaan Manajemen Pembangunan; (e) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; dan (f) Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Negara.

Untuk melaksanakan kebijaksanaan itu, ditetapkan Program Pembangunan Aparatur Negara yang harus dilaksanakan selama kurun waktu

Pelita VI, yang terdiri dari Program pokok dan Program penunjang. Program pokok meliputi: (1) Program peningkatan prasarana dan sarana aparatur negara; (2) Program peningkatan efisiensi aparatur negara; (3) Program pendidikan dan pelatihan aparatur negara; dan (4) Program penelitian dan pengembangan aparatur negara. Sementara itu, program penunjang meliputi: (1) Program pengembangan informasi pemerintahan; (2) Program pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasan; dan (3) Program pengembangan hukum administrasi negara.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pada Dinas-dinas Daerah tingkat II yang ada di 6 (enam) Propinsi Daerah Tingkat I (Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, Sumatera Utara, Lampung dan Nusa Tenggara Barat), dengan menggunakan metode penelitian evaluasi (*evaluation research*), dan memfokuskan evaluasi terhadap sebelas aspek yaitu: kemampuan aparatur; disiplin aparatur; perencanaan program; pelaksanaan program; koordinasi; pengawasan; mobilisasi sumber keuangan; pelayanan terhadap masyarakat; pembentukan/penyempurnaan peraturan perundang-undangan; penataan batas wilayah dan daerah; serta kemampuan lembaga kemasyarakatan; menunjukkan:

1. Keberhasilan paling tinggi, adalah dalam program peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
2. Tiga program yang masih kurang berhasil adalah Program penataan kembali batas wilayah dan daerah; Program peningkatan kemampuan lembaga dan organisasi masyarakat; serta Program peningkatan kemampuan memobilisasi berbagai sumber keuangan daerah.
3. Kemampuan Pegawai; disiplin pegawai; Kualitas Perencanaan Pembangunan; Kualitas Pelaksanaan Program; Koordinasi Antar Instansi Pemerintah di Daerah; serta Kualitas Pengawasan dan Evaluasi; secara umum telah menunjukkan peningkatan, meskipun keberhasilan program-program ini masih belum optimal.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, untuk meningkatkan kualitas kinerja Sektor Aparatur Negara di Daerah pada masa yang akan datang, selain melanjutkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah berjalan, juga perlu ditempuh melalui kebijaksanaan baru. Untuk meningkatkan kinerja kepegawaian perlu diorientasi kepada: Peningkatan program pendidikan berjenjang (bergelar) bagi pegawai, baik di dalam maupun di Luar Negeri dan Peningakatan kualitas SDM pada organisasi-organisasi kemasyarakatan formal, pengikutsertaan pegawai dalam berbagai forum ilmiah; serta Peningkatan muatan materi diklat dan peningkatan kesesuaian materi diklat dengan tuntutan pekerjaan.

Penyempurnaan aspek ketatalaksanaan, perlu ditempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan dengan prioritas kepada Peningkatan kemampuan memobilisasi berbagai sumber keuangan daerah, dengan orientasi kepada; Penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan di Daerah; Peningkatan kualitas pelaksanaan program; dan Peningkatan kualitas pengawasan dan evaluasi, serta tindak lanjut dari hasil pengawasan dan evaluasi tersebut.

Penyempurnaan aspek kelembagaan Aparatur Negara di Daerah perlu ditempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan dengan prioritas kepada Penataan Kembali Batas Wilayah dan Daerah Dalam Rangka Pemekaran dan Penyesuaian Status Daerah Tertentu, baik dari segi jumlahnya maupun dari segi kemanfaatannya bagi peningkatan efisiensi pelaksanaan pembangunan dan administrasi pemerintahan; serta Peningkatan Kemampuan Lembaga dan Organisasi Masyarakat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat rahmat, kemurahan dan kasih sayang Allah SWT jugalah, maka tepat pada waktunya tim penelitian *"Evaluasi Midterm Repelita VI (Tahun ke-1 sampai dengan Tahun ke-3) Sektor Aparatur di Daerah"*, dapat menyelesaikan laporan akhir ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan-kegiatan Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) di Daerah yang telah dilakukan dalam kurun waktu yang telah berjalan selama Repelita VI, serta untuk membandingkan hasil kegiatan yang telah dicapai dengan sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat diperoleh gambaran tingkat pencapaian sasaran pendayagunaan aparatur negara di Daerah. Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan penyusunan sasaran, kebijaksanaan dan program PAN dalam Repelita VII.

Dengan demikian, hasil kajian yang dipaparkan dalam laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup komprehensif dan obyektif dalam melihat dan memahami kondisi pelaksanaan program-program pendayagunaan aparatur negara di Daerah, baik pada tahap yang ada sekarang (*das sollen*), maupun kondisi ideal yang diharapkan pada waktu mendatang (*das sein*).

Dalam hal ini, peran dan kontribusi semua anggota tim sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kedudukannya dalam tim, sungguh sangat kami hargai. Demikian juga peran dan kontribusi para narasumber dan semua responden yang telah memberikan data dan informasi yang sangat berharga bagi penelitian ini, sangat kami hargai pula. Untuk itu kami sampaikan banyak terima kasih. Juga, kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaiannya penyusunan laporan ini, kami ucapan terima kasih.

Sudah barang tentu, hasil penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan disana-sini. Meskipun demikian, kami tetap optimis

bahwa apa yang telah dihasilkan, akan dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat di Daerah, untuk mencapai penyelenggaraan yang efektif, efisien, dan berorientasi kepada kebutuhan, sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam pemecahan masalah secara berencana, terpadu dan terarah.

Akhir kata, kepada semua pihak yang berkompeten dalam hal pendayagunaan aparatur negara di Daerah khususnya, dan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah pada umumnya, penelitian ini kiranya dapat menjadi "umpan" yang mengundang reaksi positif.

Pimpinan Bagian Proyek,

Drs. Desi Fernanda, M.Soc.Sc.
NIP. 270000689

DAFTAR ISI

	Halaman
EXECUTIVE SUMMARY	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan Studi	6
E. Kerangka Teori dan Kerangka Pikir	6
F. Definisi Operasional Variabel	11
G. Metodologi Penelitian	14
H. Target Penelitian	21
I. Jadual Penelitian	21
BAB II ARAH, SASARAN, DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN	27
A. Teori Evaluasi Kebijaksanaan	27
B. Arah, Sasaran, dan Kebijaksanaan Pembangunan Aparatur Negara di Daerah Pada Repelita VI	34
BAB III PERKEMBANGAN SEKTOR APARATUR DI DAERAH DARI	47
A. Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat	47
1. Aspek Kepegawaian	48
2. Aspek Ketatalaksanaan	51
3. Aspek Kelembagaan	53
B. Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.....	54
1. Aspek Kepegawaian	56
2. Aspek Ketatalaksanaan	59
3. Aspek Kelembagaan	62
C. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	63
1. Aspek Kepegawaian	64

2. Aspek Ketatalaksanaan	66
3. Aspek Kelembagaan	71
D. Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara	72
1. Aspek Kepegawaian	73
2. Aspek Ketatalaksanaan	75
3. Aspek Kelembagaan	79
E. Propinsi Daerah Tingkat I Lampung	80
1. Aspek Kepegawaian	81
2. Aspek Ketatalaksanaan	83
3. Aspek Kelembagaan	85
F. Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat ..	86
1. Aspek Kepegawaian	88
2. Aspek Ketatalaksanaan	90
3. Aspek Kelembagaan	94
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN SERTA REKOMENDASI	97
A. Pembahasan Umum Terhadap Pembangunan Aparatur di Daerah	97
B. Aspek Kepegawaian	104
C. Aspek Ketatalaksanaan	109
D. Aspek Kelembagaan	127
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran/Rekomendasi	140
DAFTAR PUSTAKA	145
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN-I Organisasi Penelitian	147
LAMPIRAN-I/1 Kuesioner Evaluasi Midterm Repelita VI Tahun Ke-1 S.D Tahun Ke-3	149
LAMPIRAN-II/1 Berbagai Jenis Diklat Teknis Fungsional Dan Teknis Manajemen Yang Diikuti Pegawai Instansi Sampel Di Daerah Tingkat II Yang Ada Di Enam Propinsi DT. I	167
LAMPIRAN-III/1 Jawaban Responden Mengenai Peningkatan	

Kualitas Pegawai	187
LAMPIRAN-IV/1 Daftar Beberapa Proyek Pan Dalam Dan Di Luar Sektor Aparatur Negara Dan Pengawasan Di Beberapa Instansi DT. II Yang Ada Di Propinsi DT. I Tahun 1994/1995 S.D. Tahun 1996/1997	219

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan jangka panjang II (PJP II) yang berlangsung dari tahun 1993/1994 sampai dengan tahun 2018/2019 akan memasuki tahapan kedua pembangunan lima tahunan (PELITA VII). PELITA VII dimulai tahun 1998/1999 dan akan berakhir tahun 2003/2004. Awal PELITA VII merupakan tahun tahun akhir abad XXI. Kondisi tahun-tahun awal abad XXI, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, pasti tidak dapat dilepaskan dari kondisi dekade akhir abad XX. Di samping itu bagaimanapun dengan kecepatan perubahan yang terjadi pada abad modern ini, dalam tahun-tahun awal abad XXI akan timbul masalah-masalah dan tantangan-tantangan pada dekade akhir abad XX ini.

Repelita VII akan merupakan kelanjutan, peningkatan, pendalaman dan perluasan dari REPELITA VI serta penyesuaian-penyesuaianya dengan tantangan baru dalam awal abad XXI. Hasil-hasil PELITA VI juga harus mampu menjadi landasan yang kuat bagi penyusunan REPELITA VII. Berhubung dengan itu, penyusunan REPELITA VII harus didasarkan atas evaluasi dan pelaksanaan REPELITA VI yang telah disusun berlandaskan kondisi dekade-dekade akhir abad XX ini dan tantangan-tantangan yang akan timbul pada tahun-tahun awal abad XXI.

Upaya pembangunan aparatur negara pertama-tama dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan semua bidang pembangunan. Oleh karena itu rencana pembangunan aparatur juga harus didasarkan atas kondisi pada tahun-tahun akhir abad XX dan tantangan-tantangan pada tahun awal abad XXI di berbagai bidang pembangunan tersebut, di samping kondisi aparatur pada saat ini.

Selaras dengan itu penyusunan REPELITA VII Sektor Aparatur Negara harus didasarkan atas evaluasi PELITA VI dengan antisipasi implikasi administrasi dari tantangan-tantangan pada tahun-tahun awal pada khususnya dan abad XXI pada umumnya. Berdasarkan pokok pikiran tersebut diatas, maka dalam menyusun REPELITA VII Sektro Aparatur Negara perlu dilakukan Evaluasi terhadap PELITA VI serta pelaksanaannya melalui evaluasi tengah waktu (*mid-term evaluation*) dan Penggalian pendapat/gagasan PAN dalam REPELITA VII. Kedua kegiatan tersebut secara garis besar mencakup aspek-aspek kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan termasuk pengawasan.

- a. Evaluasi terhadap PELITA VI serta pelaksanaannya melalui evaluasi tengah waktu (*mid-term evalution*)
- b. Penggalian pendapat/gagasan PAN dalam REPELITA VII.

Kedua gagasan tersebut secara garis besar mencakup aspek-aspek kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan termasuk pengawasan.

1. Evaluasi Tengah Waktu REPELITA VI

Dalam rangka memberikan arah yang jelas bagi penyelenggaraan pembangunan nasional, maka untuk setiap tahapan Repelita telah ditetapkan sasaran yang harus dicapai oleh masing-masing sektor pembangunan.

Pada Repelita VI, sasaran pembangunan aparatur negara sebagaimana amanat GBHN 1993 adalah tertatanya manajemen aparatur negara sebagaimana amanat GBHN 1993 adalah tertatanya manajemen aparatur negara untuk meningkatkan kualitas, kemampuan dan kesejahteraan manusianya. Menjadi sasaran pula adalah terwujudnya sistem administrasi negara yang makin andal, profesional, efisien, efektif, serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Sasaran lainnya adalah meningkatnya perwujudan otonomi daerah tingkat II yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab. Di samping itu

terwujudnya sistem kearsipan yang andal, yang dikelola secara profesional sebagai bagian yang terpadu dalam pengembangan sistem manajemen modern untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Untuk mencapai sasaran PAN sebagaimana diamanatkan dalam GBHN 1993 itu, maka dalam Repelita VI telah ditetapkan Kebijaksanaan Pembangunan Aparatur Negara yang meliputi: (a) Peningkatan Disiplin Aparatur Negara; (b) pemantapan organisasi kenegaraan; (c) Pendayagunaan organisasi pemerintahan; (d) Penyempurnaan Manajemen Pembangunan; (e) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; dan (f) Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Negara.

Untuk melaksanakan kebijaksanaan di atas, telah ditetapkan Program Pembangunan Aparatur Negara yang harus dilaksanakan selama kurun waktu Pelita VI. Program tersebut terdiri dari Program pokok dan Program penunjang.

a. Program pokok meliputi:

- (1) Program peningkatan prasarana dan sarana aparatur negara;
- (2) Program peningkatan efisiensi aparatur negara;
- (3) Program pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
- (4) Program penelitian dan pengembangan aparatur negara.

b. Program penunjang meliputi:

- (1) Program pengembangan informasi pemerintahan;
- (2) Program pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasan;
- (3) Program pengembangan hukum administrasi negara.

Secara operasional program-program tersebut di atas dapat dikelompokkan dalam program pendayagunaan Kelembagaan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pengawasan. Selanjutnya program-program pembangunan tersebut di atas diselenggarakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan tahunan yang dari segi penganggarannya tercermin dalam APBN.

Sesuai dengan sifatnya, kegiatan pendayagunaan aparatur negara diselenggarakan oleh berbagai instansi. Hanya cakupan, dan prioritasnya yang berbeda antara instansi yang satu dengan lainnya sesuai dengan misi yang diembannya. Namun paling tidak, menyangkut bidang aparatur negara secara internal dalam menunjang pelaksanaan tugas pokoknya. Pada hakekatnya keseluruhan kegiatan itu ditujukan untuk mencapai sasaran pembangunan aparatur negara baik secara instansional maupun secara nasional.

Pelaksanaan Pelita VI telah menginjak tahun ketiga dan program-program pendayagunaan Aparatur Negara telah banyak dilakukan oleh Instansi Pemerintah. Sejauhmana program-program tersebut telah mencapai sasaran sesuai arahan dalam Repelita VI perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Dari hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang efektifitas kegiatan pendayagunaan aparatur negara yang dilakukan oleh berbagai instansi baik pusat maupun daerah dalam kurun waktu yang tela dan sedang berjalan dari Repelita VI.

2. Penggalian Gagasan PAN dalam REPELITA VII

Sebagaimana telah diuraikan di atas, kurun waktu REPELITA VII adalah tahun-tahun akhir abad XX dan awal abad XXI. Dalam kurun waktu itu Indonesia akan melaksanakan ketentuan-ketentuan perdagangan bebas kawasan ASEAN (AFTA). Selain itu Indonesia harus makin meningkatkan kesiapannya dalam pelaksanaan Deklarasi Bogor (APEC).

Selain itu globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan akan semakin meningkat, sejalan dengan semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Era globalisasi adalah era keterbukaan dan kompetisi. Meningkatnya globalisasi berarti makin meningkatnya tuntutan keterbukaan dalam sistem manajemen dan kemampuan untuk berkompetisi.

Untuk menanggapi hal-hal di atas, seluruh masyarakat perlu dilibatkan dalam memikul tanggung jawab. Sehubungan dengan itu, maka debirokritisasi, deregulasi dan desentralisasi akan makin ditingkatkan.

Pembangunan aparatur negara dalam REPELITA VII dimaksudkan untuk mewujudkan aparatur negara yang handal, profesional, efisien dan efektif dalam mendukung kebijaksanaan-kebijaksanaan di atas. Untuk itu diperlukan penggalian gagasan dimaksud dari para pakar, praktisi dan lain-lain melalui lokakarya.

B. Rumusan Masalah

Dalam pelaksanaan program pendayagunaan aparatur negara sebagaimana diuraikan di atas diasumsikan masih ada kegiatan yang tidak sesuai dengan arah dan sasaran Repelita VI.

Sasaran lima tahun (Sarlita) aparatur negara belum dapat dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan. Di samping itu, informasi tentang aparatur negara belum dikembangkan sebagai suatu sistem yang terpadu. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dikaji adalah:

1. Sejauhmana efektivitas kegiatan pendayagunaan aparatur negara dalam tahun pertama, kedua dan ketiga Repelita VI sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Apakah kebijaksanaan PAN dalam Repelita VI masih relevan untuk dilanjutkan dalam repelita VII.

C. Ruang Lingkup

Sejalan dengan latar belakang di atas, maka ruang lingkup studi evaluasi meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Kepegawaian;
2. Ketatalaksanaan dan Pengawasan;
3. Kelembagaan.

D. Tujuan Studi

1. Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan PAN yang telah dilakukan dalam kurun waktu yang telah berjalan dari Repelita VI.
2. Untuk membandingkan hasil kegiatan yang telah dicapai dengan sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat diperoleh gambaran tingkat pencapaian sasaran pendayagunaan aparatur negara.
3. Untuk memperoleh masukan bagi penyusunan sasaran, kebijaksanaan dan program PAN dalam Repelita VII.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Pikir

Aparatur Negara di Daerah merupakan perangkat negara yang bertugas melaksanakan berbagai kebijaksanaan pemerintah Pusat di Daerah di satu pihak, dan melayani serta menampung berbagai aspirasi masyarakat di lain pihak.

Dalam peran seperti ini, maka aparatur negara harus bertindak sebagai mediator antara keputusan pemerintah dengan arus kehendak dari bawah. Namun, meskipun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh David Osborn dalam bukunya Reinventing Government, bahwa dalam era keterbukaan seperti sekarang ini, untuk menemukan kembali pemerintahan yang baik, diantara persyaratan yang harus dipenuhi adalah bahwa pemerintah harus berorientasi kepada masyarakat (*costumer oriented*), dan dia harus bertindak sebagai katalisator (*catalitic government*).

Dalam kaitan ini, peran pemerintah yang secara operasional dilaksanakan oleh aparatur harus terprogram dan secara fleksibel menyesuaikan dengan situasi dan tuntutan masyarakat. Program pendayagunaan aparatur negara sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan pelayanan aparatur terhadap masyarakat harus mengacu kepada tuntutan yang muncul. Oleh karena situasi dan kondisi terus berkembang, maka secara langsung akan berdampak terhadap program pendayagunaan aparatur negara yang sudah dicanangkan

sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, setelah Repelita VI ini dijalani selama 3 (tiga) tahun, perlu dilakukan evaluasi untuk menggali kinerja yang telah dicapai serta permasalahan atau kendala yang dihadapi, untuk kemudian mencari pokok-pokok pikiran untuk mengatasi berbagai kendala tersebut.

Sasaran pembangunan aparatur negara dalam Repelita VI sesuai amanat GBHN 1993 adalah tertatanya manajemen aparatur negara untuk meningkatkan kualitas, kemampuan dan kesejahteraan manusianya.

Menjadi sasaran pula terwujudnya sistem administrasi negara yang makin andal, profesional, efisien, efektif, serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis dalam tatanan kehidupan nasional, regional, dan global serta mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan negara dan pembangunan; meningkatnya semangat pengabdian dan kemampuan aparatur pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, khusus dalam melayani, mengayomi, mendorong dan menumbuhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan; serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat, permasalahan, kepentingan, dan kebutuhan rakyat, terutama yang masih hidup dalam kemiskinan atau rakyat kecil.

Sasaran lainnya adalah meningkatnya perwujudan otonomi daerah di Tingkat II yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dalam mendorong kemajuan dan memperlancar pelaksanaan pembangunan secara merata di seluruh pelosok tanah air, serta meningkatkan perwujudan Wawasan Nusantara; meningkatnya kemampuan kelembagaan dan efisiensi serta efektivitas pelaksanaan fungsi dan peranan aparatur kecamatan dan pemerintahan desa dan kelurahan dalam melayani dan mengayomi masyarakat; dalam mengembangkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan; serta dalam menghargai pendapat, menaggapi aspirasi, dan menyalurkan rasa tanggung jawab masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan pada tingkat kecamatan dan desa ataupun kelurahan;

Selanjutnya, menjadi sasaran pula adalah mantapnya keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan seluruh aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah; terwujudnya kepegawaian negara yang berkualitas; memiliki kemampuan profesional, keahlian dan keterampilan, kepemimpinan, serta semangat pengabdian dan disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas; taat dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; serta meningkatnya kesejahteraan pegawai negeri didukung sistem penggajian dan pembinaan serta pengembangan karier berdasarkan kemampuan profesional dan prestasi kerja, serta penerapan sistem karier terbuka antar aparatur pusat dan daerah.

Terwujudnya sistem kearsipan yang andal, yang dikelola secara fungsional dan profesional sebagai bagian terpadu dalam pengembangan sistem manajemen modern untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan secara berkesinambungan, merupakan saran pula yang ingin dicapai pada Repelita VI.

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut kebijaksanaan yang ditempuh dalam Repelita VI meliputi 5 kebijaksanaan pokok yaitu kebijaksanaan peningkatan disiplin aparatur negara, kebijaksanaan pemantapan organisasi pemerintahan, kebijaksanaan pendayagunaan organisasi pemerintahan, kebijaksanaan penyempurnaan manajemen pembangunan, dan kebijaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam program-program pembangunan yang meliputi program pokok dan program penunjang. Program pokok meliputi program peningkatan prasarana dan sarana aparatur negara, program peningkatan efisiensi aparatur negara, program pendidikan dan pelatihan aparatur negara termasuk program pendidikan kedinasan, serta program penelitian dan pengembangan aparatur negara. Sementara itu program penunjang meliputi program pengembangan informasi pemerintahan, program pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasan, dan program pengembangan hukum administrasi negara.

Bertolak dari sasaran, kebijaksanaan, dan program-program yang dicanangkan pada Repelita VI untuk sektor aparatur negara, khususnya yang menyangkut sasaran, kebijaksanaan, dan program aparatur negara di Daerah, maka evaluasi diarahkan kepada aspek-aspek tersebut.

Evaluasi dengan tujuan untuk melihat kondisi dan permasalahan serta lebih lanjut untuk merumuskan berbagai alternatif bagi penyempurnaan pelaksanaan program yang telah dicanangkan, merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan pembangunan. Menurut **Bintoro Tjokroamidjojo** (1987: 193) evaluasi merupakan salah satu aspek yang terdapat dalam suatu sistem pengendalian, untuk mendapatkan masalah-masalah pelaksanaan yang harus dipecahkan. Evaluasi merupakan proses pengukuran dan pembandingan dari pada hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai (**Siagian**: 1987, 141). Bahkan Sondang P. Siagian mengatakan bahwa evaluasi merupakan fungsi organik, karena pelaksanaan fungsi ini turut menentukan mati/hidupnya suatu organisasi. Dalam hal ini, tentu pelaksanaan evaluasi turut menentukan berhasil atau tidaknya program pendayagunaan aparatur negara yang telah ditetapkan.

Sementara **Coralie Bryant** dan **Louise G. White** (1989, 193) menyatakan, Evaluasi merupakan upaya untuk mendokumentasi apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi. Idealnya, suatu proyek dirancang untuk menentukan hubungan sebab akibat itu, dan dengan demikian pemikiran ke depan mengenai evaluasi menjadi suatu aspek integral dari rancangan semula.

Maksud dan tujuan evaluasi sebagai mana dikemukakan oleh **William N. Dunn** adalah menilai karakteristik-karakteristik yang dapat dinilai. Sedangkan fungsi penilaian, **William N. Dunn** menyebutkan 3 fungsi penilaian yaitu: (1) Penilaian berfungsi sebagai informasi yang valid tentang kinerja kebijaksanaan yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Evaluasi merupakan bagian kecil dari kebijaksanaan yang akan membantu kesimpulan praktis tentang masalah-masalah yang perlu dipecahkan; (2)

Penilaian memberikan klarifikasi dan kritik terhadap tujuan dan sasaran. Dalam melakukan penilaian diberikan batasan dan operasionalisasi tujuan dan sasaran. Penilaian juga mengkritik dengan mempertanyakan secara sistematis tujuan dan sasaran yang dikaitkan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Dalam mempersoalkan tujuan dan sasaran, dilakukan analisis terhadap berbagai sumber penilaian misalnya interest pribadi dan objek kebijaksanaan, secara teknis, ekonomis, legal, sosial, dan substantif; (3) Penilaian, memperkaya metode analisis kebijaksanaan termasuk masalah membuat struktur dan rekomendasi.

Selanjutnya, menurut Dunn, evaluasi mempunyai 2 (dua) aspek yang selalu berhubungan, yaitu metode yang dipergunakan dan penetapan skala nilai untuk menetapkan hasil-hasil evaluasi tersebut. Penggunaan suatu metode penilaian dan penetapan suatu skala penilaian akan berdampak terhadap hasil penilaian kebijaksanaan. Selain itu, perlu dipahami bahwa banyak kegiatan yang termasuk ke dalam rangkaian kegiatan kebijaksanaan yang tidak dapat dinilai.

Teknik evaluasi akan membantu menganalisa dan mengevaluasi kinerja kebijaksanaan. Dalam beberapa teknik evaluasi mungkin digunakan berbagai metode analisis kebijaksanaan, termasuk mengenai restrukturisasi, peramalan, rekomendasi, dan monitoring. Misalnya, *Assumptional Analysis* mungkin bisa digunakan untuk membandingkan asumsi tentang kegiatan kebijaksanaan dengan tujuan; *Cross Impact Analysis* mungkin bisa digunakan dalam mengidentifikasi hasil kebijaksanaan yang tidak dapat diantisipasi, dibandingkan dengan tujuan program kebijaksanaan; *Similary Discounting* mungkin hubungannya dengan evaluasi kebijaksanaan sebagai rekomendasi analisis rugi/laba dan analisis efektivitas biaya yang dihubungkan dengan waktu yang akan datang; Selanjutnya, teknik yang berkaitan dengan grafik dan nomor indeks untuk mengontrol analisis yang bersifat series, perlu sekali dalam memonitor hasil kebijaksanaan. Dalam kenyataannya, mungkin dipergunakan lebih dari satu metode atau teknik evaluasi kebijaksanaan yang saling berhubungan.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa evaluasi program pendayagunaan aparatur negara di Daerah yang telah dijalankan selama 3 tahun dalam Repelita VI merupakan aspek penting yang mesti dilakukan apabila menginginkan kegiatan PAN tersebut berjalan dengan baik dan mengalami kemajuan dari periode ke periode atau dari fase ke fase, karena evaluasi bersifat korektif terhadap fase berikutnya (Siagian; 1987, 143).

F. Definisi Operasional Variabel

Untuk mengkaji permasalahan pendayagunaan aparatur negara seperti dirumuskan di atas, analisis penelitian difokuskan kepada 5 variabel penentu pendayagunaan aparatur negara yang diangkat dari program Pendayagunaan Aparatur Negara di Daerah pada Repelita VI. Keenam variabel tersebut adalah:

1. Variabel Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Daerah, yaitu peningkatan kemampuan aparatur Daerah, baik dalam kualitas maupun kuantitas, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara dan masyarakat, dengan indikator:

- a. Peningkatkan kemampuan pegawai melalui pengikutsertaan dalam berbagai diklat struktural, pengikutsertaan dalam berbagai diklat Fungsional, pengikutsertaan dalam berbagai pendidikan berjenjang dalam dan luar negeri, pengikutsertaan dalam berbagai penataran, seminar, loka karya atau forum ilmiah lainnya, kesesuaian diklat/pendidikan yang diikuti pegawai dalam pekerjaan dengan kebutuhan, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi kemasyarakatan formal
- b. Peningkatkan disiplin pegawai/aparatur, yang meliputi disiplin dalam masuk kerja, disiplin dalam pulang kerja, disiplin dalam pekerjaan, atau pemanfaatan jam kerja, pengenaan sangsi atau teguran bagi pegawai yang melanggar disiplin, pemberian penghargaan bagi pegawai yang berpredikat disiplin, pemberian motivasi berupa materi

untuk meningkatkan disiplin pegawai, disiplin pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, penghapusan pungutan-pungutan liar, dan lain-lain.

2. *Variabel Peningkatan Efisiensi Ketatalaksanaan di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, yaitu peningkatan kesederhanaan langkah-langkah yang ditempuh dalam proses pembangunan yang berpengaruh terhadap kemanfaatan kegiatan dan kehematan sumber daya yang dipergunakan dalam proses pembangunan di Daerah, dengan indikator:

- Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang meliputi: Kesesuaian rencana-rencana kerja dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, Dukungan sumber daya dan sumber dana terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan, Pekanisme bottom up dalam perencanaan, Penggunaan proyek/kegiatan yang telah lalu sebagai bahan/proyeksi pada tahun berikutnya, dalam rangka perencanaan dari bawah, dan lain-lain.
- Peningkatan kualitas pelaksanaan program, yang meliputi: Kejelasan pembagian kerja dalam pelaksanaan kegiatan, Kejelasan tanggung jawab pada tiap tingkatan manajemen dalam kegiatan atau proyek, Pembinaan kerja sama dalam berbagai kegiatan, Efisiensi sumber daya manusia/personil dalam setiap kegiatan atau proyek, Ketepatan penyelesaian kegiatan sesuai dengan penjadualan yang telah ditetapkan, Ketepatan penyediaan jumlah sumber daya manusia dengan kebutuhan proyek/kegiatan, dan lain-lain.
- Peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah di daerah dalam melaksanakan pembangunan, yang meliputi: peningkatan koordinasi dalam perencanaan kegiatan, Peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan, Peningkatan koordinasi dalam pengawasan, monitoring dan evaluasi, dan lain-lain.

- d. Peningkatan kemampuan memobilisasi berbagai sumber keuangan daerah;
- e. Peningkatan pelayanan aparat terhadap masyarakat, yang meliputi peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, Pemberian penerangan kepada masyarakat mengenai kebijaksanaan pemerintah, dan lain-lain.
- f. Peningkatan kesederhanaan proses pembangunan melalui pembentukan atau penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan di Daerah atau yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi instansi;

3. *Variabel Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Dalam Mendukung Pelaksanaan Misi dan Tugas Pokok Organisasi*, yaitu peningkatan kemampuan lembaga-lembaga yang ada di Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan indikator:

- a. Peningkatan kemampuan lembaga dan organisasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.
- b. Penataan kembali batas wilayah dan daerah dalam rangka pemekaran dan penyesuaian status daerah tertentu, yang meliputi optimalisasi penataan kembali batas wilayah dan daerah, dan manfaat penataan kembali batas wilayah dan daerah bagi peningkatan efisiensi pelaksanaan pembangunan dan administrasi pemerintahan
- c. Peningkatan kemampuan lembaga dan organisasi masyarakat, yang meliputi: Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi kemasyarakatan, Pemanfaatan organisasi kemasyarakatan sebagai agen pembangunan, Peningkatan kemanfaatan organisasi kemasyarakatan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan lain-lain.

4. *Variabel Peningkatan Kualitas Pengawasan Terhadap Aparatur Pemerintah*, yaitu peningkatan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi pengawas fungsional dan internal terhadap kegiatan

pembangunan yang dilaksanakan oleh instansi-instansi di Daerah, dengan indikator:

- a. Peningkatan kualitas pengawasan/evaluasi, serta tindak lanjut dari hasil pengawasan dan evaluasi tersebut;
- b. Peningkatan frekuensi pengawasan/evaluasi yang dilakukan baik oleh instansi fungsional maupun pengawasan melekat.
- c. Peningkatan monitoring terhadap kegiatan atau proyek yang dilaksanakan,
- d. Peningkatan kualitas dan ketepatan pelaksanaan pelaporan setiap kegiatan/ proyek
- e. Peningkatan pengawasan penggunaan keuangan daerah.

G. Metodologi Penelitian

Sesuai dengan substansi penelitian ini yang ingin mengungkap dan mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, masalah dan fenomena yang diselidiki, maka metode yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah *Metode Evaluatif*. Evaluasi akan dilakukan terhadap hasil *pencapaian sasaran* dan *pelaksanaan program* selama 3 (tiga) tahun pertama Repelita VI, sesuai dengan yang dicanangkan, seperti tercantum dalam Buku V Repelita VI untuk pembangunan sektor aparatur negara di Daerah. Karena tidak semua daerah memiliki Sasaran Repelitada (SARLITA) yang jelas, maka dilakukan perbandingan antara kondisi aparatur saat ini dengan kondisi aparatur pada akhir Repelita sebelumnya (Repelita V) yang dianggap sebagai *based-line* dari aktivitas pembangunan Repelita VI. Observasi akan dilakukan terhadap sejumlah unit kerja/instansi secara sampling.

1. Daerah dan Instansi Sampel

Karena luasnya cakupan penelitian dilihat dari sisi objek penelitiannya, maka penelitian akan dibatasi pada 30 Kabupaten yang ada di 6 Propinsi Daerah Tingkat I yang dipilih sebagai sampel.

Jumlah keseluruhan responden yang akan dimintai informasinya ditetapkan secara purposif juga sebanyak, yang terdiri dari Sekwilda Tingkat II, Kepala Bagian di lingkungan Sekwilda Tingkat II, Ketua BAPPEDA Tingkat II, dan Kepala Dinas Daerah Tingkat II dari 30 Kabupaten Daerah Tingkat II yang ada di 6 Propinsi Daerah Tingkat I lokasi penelitian. Setelah dilakukan sampling dengan teknik purposif didapatkan sampel daerah, instansi, dan responden sebagai berikut:

a. Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

Kabupaten Daerah Tingkat II, instansi, Unit Organisasi, dan responden yang dijadikan sampel di Propinsi DT.I Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten DT.II Bandung; Dinas Pertanian, Dinas Pengelolaan Pasar, Dinas Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda Tingkat II, Dinas Perikanan, DLLAJR, Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II, Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II, Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan, Dinas Sosial, Dinas Peternakan, Dinas Transmigrasi, Bagian Hukum, Dispinda, Bagian Keuangan, dan Dinas Koperasi.
2. Kotamadya DT.II Bogor; Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, dan Dinas Kebersihan.
3. Kabupaten DT.II Tasikmalaya; Dinas Pariwisata, Sekwida, Dinas P & K, Dinas Pertanian, Bappeda, Bagian Hukum Sekwilda, Dinas Perkebunan, Bagian Keuangan, Bagian Organisasi, DKK, DPUK, Bagian Perekonomian Sekwilda.
4. Kotamadya DT.II Cirebon; Sekwilda, Bidang Penyusunan Program, BAPPEDA, Bagian Kepegawaian; dan beberapa dinas DT.II.

5. Kabupaten DT.II Serang; Sekwilda, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Perekonomian, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, BAPPEDA, dan Dinas Kesehatan.

b. Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

Kabupaten Daerah Tingkat II, instansi, Unit Organisasi, dan responden yang dijadikan sampel di Propinsi DT.I Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Kotamadya DT. II Surabaya: Setwilda (Bag. Tata Pemerintahan, Bag. Hukum, Bag. Keuangan, Bag. Kepegawaian, Bag. Organisasi, Bag. Perkotaan, Itwil), BAPPEDA, Dinas (Pengawasan Bangunan Daerah, Kependudukan, Tata Kota, Dispnda, PU).
2. Kabupaten DT. II Sidoarjo: Setwilda (Bag. Organisasi, Bag. Hukum, Bag. Keuangan), BAPPEDA, Dinas (Perikanan, Sosial, Pariwisata, Pasar, Peternakan, Perkebunan, Kebersihan dan Pertamanan, Koperasi & PPK, Perdagangan, P & K, Transmigrasi & PPH, PU Pengairan, Tenaga Kerja, Kependudukan & Catatan Sipil, LLAJD, Perindustrian, PU Cipta Karya, PMD, Kesehatan, Dispnda, PU Bina Marga).
3. Kabupaten DT. II Gresik : Setwilda (Asisten I), BAPPEDA, Dinas (Dispnda, Kesehatan, P dan K, Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Peternakan, PU).
4. Kabupaten DT. II Mojokerto : Setwilda (Bag. Organisasi, Bag. Keuangan, Bag. Perekonomian, Bag. Hukum), Dinas (Kebersihan & Pertamanan, Perikanan, Dispnda, P dan K, PU, Peternakan, Pertanian Tanaman Pangan, Kesehatan, Perkebunan), BAPPEDA.
5. Kabupaten DT. II Jombang : Setwilda (Bagian Organisasi, Bagian Perekonomian, Bag. Hukum), BAPPEDA, Dinas (PU, Kesehatan, Perkebunan, Kebersihan & Pertamanan, Pertanian Tanaman Pangan, Dispnda, Peternakan).

c. Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten Daerah Tingkat II, instansi, Unit Organisasi, dan responden yang dijadikan sampel di Propinsi DIY Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Kodya Yogyakarta: Setwilda (Bagian Keuangan, Bagian Kepegawaiian, Bagian Perekonomian, Bagian Organisasi, Bagian Hukum), Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Peternakan, Dipenda, Dinas Kebersihan dan Pertanaman.
2. Kabupaten Kulon Progo: Setwilda, Bappeda, Dinas Pertanian Dinas Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dipenda, DLLAJ.
3. Kabupaten Bantul: Setwilda, Dipenda, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Kantor Sospol, Mawil Hansip BP-7, Setwan DPRD, Itwilcab, Dinas Kesehatan.
4. Kabupaten Gunung Kidul: Setwilda, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Pendapatan Daerah Kantor Catatan Sipil, Kantor Sospol, Pembantu Bupati Wilayah Barat, Pembantu Bupati Wilayah Tengah, Pembantu Bupati Wilayah Timur.
5. Kabupaten Sleman: Setwilda, Bappeda, Dinas Kesehatan Dipenda, Dinas Pekerjaan Umum (PU) CipataKarya, Dinas Petambangan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah.

d. Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara

Kabupaten Daerah Tingkat II, instansi, Unit Organisasi, dan responden yang dijadikan sampel di Propinsi DT.I Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Kodya DT.II Medan: Sekwilda, BAPPEDA, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas PU, Dinas P dan K, Dinas Pariwisata, Dinas Peternakan, Dinas Pasar, Dinas Perindustrian, dan Dinas Pariwisata.
2. Kabupaten DT.II Deli Serdang: Sekwilda, BAPPEDA, Dinas Koperasi & PPK, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas PUBM, Dinas PUCK, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pertambangan, Dinas P dan K, DLLAJ, Dinas Kesehatan, Dinas PTP, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perkebunan, Dinas Transmigrasi & PPH, Dinas PU Pengairan, Dinas PMD.

3. Kabupaten DT.II Langkat: Sekwilda, BAPPEDA, Dinas Perikanan, Dinas Kebersihan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan, Dinas Pasar, dan Dinas Pertanian.
4. Kabupaten DT.II Karo: Sekwilda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas P dan K, Dinas PU, Dinas Perkebunan, Dinas Pariwisata, Dinas Pasar, dan Dinas Peternakan.
5. Kabupaten DT.II Simalungun: Sekwilda, BAPPEDA, Dinas kesehatan, Dinas Perkebunan, Dinas PTP, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas P dan K, Dinas Perikanan, Dinas Kebersihan.

e. Propinsi Daerah Tingkat I Lampung

Kabupaten Daerah Tingkat II, instansi, Unit Organisasi, dan responden yang dijadikan sampel di Propinsi DT.I Lampung adalah sebagai berikut:

1. Kotamadya DT.II Bandar Lampung; Bappeda, Itwilkod, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perumahan, Dinas Tata Kota, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pertamanan, Dinas Tata bangunan, dan beberapa bagian di lingkungan Setwilda Tingkat II.
2. Kabupaten DT.II Lampung Selatan; Dinas Perkebunan, Dinas P&K, Dinas Peternakan, Dinas Pariwisata, Dinas Pasar, DLLAJ, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas PU, Dinas Perikanan, Dipenda, BAPPEDA, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kehutanan, dan beberapa bagian di lingkungan Setwilda Tingkat II.
3. Kabupaten DT.II Lampung Tengah (Daerah percontohan otonomi); Dinas Peternakan, Dinas Sosial, Dinas Transmigrasi dan PPH, DIPENDA, Dinas P&K, Dinas PU Ciptakarya, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Dinas Pasar, Dinas PU Pengairan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perdagangan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertambangan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas PU Binamarga, Dinas Koperasi, dan beberapa bagian di lingkungan Setwilda Tingkat II.

4. Dinas-dinas daerah Tingkat I; Dipenda, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata, Dinas P dan K, Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum.

f. Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat

Kabupaten Daerah Tingkat II, instansi, Unit Organisasi, dan responden yang dijadikan sampel di Propinsi DT.I Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Kotamadya DT.II Mataram: Sekwilda, BAPPEDA, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Peternakan;
2. Kabupaten DT.II Lombok Tengah: Sekwilda, BAPPEDA, Dinas Koperasi & Pembinaan Pengusaha Kecil, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Dinas PU Pengairan, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pertambangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DLLAJ, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perkebunan, Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, dan Dinas Pembangunan Masyarakat Desa.
3. Kabupaten DT.II Lombok Barat: Sekwilda, BAPPEDA, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pariwisata, dan Cabang Dinas Kehutanan.
4. Kabupaten DT.II Sumbawa Besar: Sekwilda, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum.
5. Kabupaten DT.II Bima: Sekwilda, BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dan Dinas Perikanan.

2. Responden

Responden dari setiap instansi atau unit kerja sampel adalah Pimpinan Puncak (Sekwilda, Kepala Dinas, Ketua Bappeda, Kepala Bagian, dan lain-lain) atau yang mewakilinya atas disposisi Pimpinan Puncak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan tersebut, teknik yang digunakan adalah telaahan dokumentasi dan studi lapangan. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan hasil atau sasaran yang telah dicapai dalam pelaksanaan program-program Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) sampai dengan tahun ketiga Repelita VI. Untuk itu sarana yang digunakan untuk menampung data adalah formulir isian yang telah ditentukan. Sementara itu, untuk mendapatkan data primer, dilakukan penyebaran kuesioner dan wawancara.

1. *Pengumpulan Data Primer*; Pengumpulan data primer dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh responden.
2. *Pengumpulan Data Sekunder*; Data sekunder yang diperlukan terutama data kuantitatif mengenai indikator kinerja Pendayagunaan Aparatur Negara di Daerah. Untuk itu, disediakan Formulir isian yang akan diisi oleh responden.

4. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif terhadap data sekunder dan jawaban kuesioner, serta didukung dengan data primer hasil wawancara.

Persepsi Responden mengenai hasil pembangunan sektor aparatur negara di daerah yang telah diklasifikasikan per aspek (kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan, serta kelembagaan), diakumulasi dari setiap Daerah. Persepsi tersebut akan dilihat hal-hal yang paling menonjol menjadi

permasalahan di Daerah. Untuk keperluan tersebut, setelah data diakumulasi, dilakukan perankingan (membuat peringkat) terhadap semua hal yang ditanyakan, untuk menentukan peringkat keberhasilan dari upaya-upaya yang telah dilakukan. Analisis dan pembahasan dilakukan secara umum, dan selanjutnya dilakukan per daerah. Peringkat keberhasilan yang dimaksud dilihat dari banyak tidaknya instansi yang telah mengalami peningkatan kualitas menuju kondisi ideal. Makin banyak instansi yang mengalami peningkatan, berarti makin tidak perlu diprioritaskan, atau makin sedikit instansi yang mengalami peningkatan, berarti indikator tersebut makin merupakan permasalahan yang kritis, dan perlu segera dibenahi.

H. Target Penelitian

Tersusunnya suatu laporan yang menggambarkan tentang:

1. Tingkat efektivitas kegiatan Pendayagunaan Aparatur Negara yang telah dilakukan dalam tahun pertama, kedua dan ketiga Repelita VI.
2. Sebagai bahan untuk penyusunan PAN dalam Repelita VII.

I. Jadual Penelitian

Penelitian dilakukan selama 1 (satu) tahun dalam tahun anggaran 1996/1997 dengan jadwal kegiatan sebagai berikut:

J. Jadual Penelitian

Penelitian dilakukan selama 1 (satu) tahun dalam tahun anggaran 1996/1997 dengan jadwal kegiatan sebagai berikut:

OPERASIONAL
PENELITIAN EVALUASI MIDTERM PELITA VI
SEKTOR APARATUR NEGARA DI DAERAH

NO	AKTIVITAS	PENGELUARAN											
		APR 96	MAY 96	JUN 96	JUL 96	AGU 96	SEP 96	OCT 96	NOV 96	DES 96	JAN 97	FEB 97	MAR 97
1.	<ul style="list-style-type: none"> * Desain Penelitian * Studi Pustaka * Pembuatan Desain * Pembahasan Desain * Penyeputaman dan Finalisasi 	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
2.	<ul style="list-style-type: none"> * Narasumber * Kontak telephone dengan calon narasumber * Negosiasi dan meminta kesediaan menjadi narasumber 	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
3.	<ul style="list-style-type: none"> * Penyeputaman instrumen (kuesi open dan interview guide) oleh setiap anggota tim * Konsilisasi buku bahan dari setiap anggota tim * Pembahasan rancangan instrumen * Penyelesaian draft awal instrumen * Uji coba instrumen penelitian * Penyeputaman dan finalisasi instrumen penelitian 	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
4.	<ul style="list-style-type: none"> * Pengumpulan data skunder yang bersifat unik dari instansi-instansi terkait * Identifikasi data skunder yang dituju * Perluakan surat menyurat dan kontak telephone * Pengambilan Data Skunder 	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
5.	<ul style="list-style-type: none"> * Survey lemparan * Perjalanan survey menyurat dan kontak telephone * Konfirmasi responden * Pelaksanaan survey lemparan 	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■

Jadual pelaksanaan survey beserta penganggung jawabnya yang terdiri dari supervisor dan surveyor adalah sebagai berikut:

**RANCANGAN PELAKSANAAN SURVEY LAPANGAN
PENELITIAN TENTANG EVALUASI MIDTERM REPELITA-VI
TAHUN KE-1 S.D. TAHUN KE-3**

LOKASI	SUPERVISOR	SURVEYOR	BERANGKAT
JAWA BARAT 1. Kab. Bandung 2. Kod. Cirebon 3. Kod. Bogor 4. Kab. Serang 5. Kab. Tasikmalaya	Dra. Elis K	Dra. Hayuni Drs. Syarif- uddin H Dra. Fitriani	26-31 Agus 16-21 Sept
LAMPUNG 1. Kod. Bdr Lampung 2. Kab. Lamp. Sel 3. Kab. Lamp. Teng 4. Kab. Lamp. Utara 5. Kab. Lamp. Barat	Drs. Nana B	Wawan DS,SH.	26-31 Agus 16-21 Sept
JAWA TIMUR 1. Kodya Surabaya 2. Kab. Mojokerto 3. Kab. Sidoarjo 4. Kab. Gresik 5. Kab. Jombang	Dra. Sedarma- yanti, M.Pd	Triwidodo,SH	2 - 7 Sept 23-28 Sept
NUSA TENGGARA BRT 1. Kab. Bima 2. Kab. Dompu 3. Kab. Sumbawa Bsr 4. Kab. Selong 5. Kab. Lombok Brt	Drs. Deddy M, M.Si.	Baban S, SE.	9 -14 Sept 30 Sept - 5 Okt

Lanjutan Tabel

LOKASI	SUPERVISOR	SURVEYOR	BERANGKAT
DIY YOGYAKARTA 1. Kodya Yogyakarta 2. Kab. Bantul 3. Kab. Sleman 4. Kab. Kulon Progo 5. Kab. Gunung Kidul	Drs. Jusuf Taudjiri	Gugum G, SH.	16-21 Sept 7 -12 Okt
SUMATERA UTARA 1. Kodya Medan 2. Kab. Simalungun 3 Kab. Karo 4. Kab. Langkat 5. Kab. Deli Serdang	Drs. Desi F, M.Soc.Sc	Drs. Ramdani	23-28 Sept 14-19 Okt

K. Organisasi pelaksana

Untuk melaksanakan kegiatan evaluasi tengah semester ini akan dibentuk organisasi penyelenggara yang terdiri dari Tim Pengarah (Steering Committee) dan Tim Pelaksana.

1. Susunan Anggota Tim Pengarah terdiri dari:
 - a. Ketua LAN
 - b. Kepala BAKN
 - c. Kepala BPKP
 - d. Sekretaris MENPAN
 - e. Dirjen PUOD
 - f. Deputi Administrasi BAPPENAS
 - g. Deputi Bidang Litbang LAN (sebagai Sekretaris Tim)
2. Tim Pelaksana

Tim ini dikoordinir oleh Deputi Bidang Litbang dan Anggota-anggota Tim terdiri dari para peneliti dari LAN dan instansi diluar LAN.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA:

TEORI EVALUASI KEBIJAKSANAAN, DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN APARATUR DI DAERAH PADA PELITA VI

A. Teori Evaluasi Kebijaksanaan

Maksud dan tujuan evaluasi sebagai mana dikemukakan oleh **William N. Dunn** adalah menilai karakteristik-karakteristik yang dapat dinilai. Oleh karena itu, evaluasi mempunyai beberapa karakteristik, yaitu: *Pertama, fokus penilaian*. Penilaian sebagai pembanding pemantauan, terfokus pada kesepakatan untuk memperhatikan nilai yang dikehendaki dari suatu kebijaksanaan atau program. Evaluasi terutama merupakan suatu usaha untuk menetapkan penilaian dari kemanfaatan sosial terhadap kebijaksanaan atau program. Bukan sekedar pengumpulan informasi tentang masukan yang dapat diantisipasi maupun yang tidak dapat diantisipasi dari kebijaksanaan. Sejak tujuan dan sasaran kebijaksanaan ditetapkan, maka evaluasi diperlukan.

Kedua, nilai sesungguhnya bersifat saling tergantung. Hasil tergantung kepada banyaknya indikator-indikator yang harus dinilai. Bagian-bagian kebijaksanaan atau program dituntut mempunyai kinerja sesuai dengan yang diharapkan, serta betul-betul merupakan konsekuensi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian, pemantauan merupakan prasyarat bagi dilakukannya penilaian.

Ketiga, orientasi sekarang dan masa depan. Penilaian bukan hanya untuk melihat kinerja waktu sekarang, tetapi juga untuk melakukan rekomendasi bagi perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Evaluasi dilakukan dengan menilai dengan akurat kegiatan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, diajukan rekomendasi yang

bersifat prospektif dan akurat pula untuk masa yang akan datang, sebelum kegiatan selanjutnya dilaksanakan.

Keempat, penilaian dualitas. Penilaian yang diberikan bersifat dualitas, yaitu secara ekstrinsik dan intrinsik. Penilaian sering dikaitkan dengan tujuan dan sasaran dari kebijaksanaan atau program.

Berkenaan dengan fungsi penilaian, **William N. Dunn** menyebutkan 3 fungsi penilaian yaitu:

1. Penilaian berfungsi sebagai informasi yang valid tentang kinerja kebijaksanaan yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Evaluasi merupakan bagian kecil dari kebijaksanaan yang akan membantu kesimpulan praktis tentang masalah-masalah yang perlu dipecahkan;
2. Penilaian memberikan klarifikasi dan kritik terhadap tujuan dan sasaran. Dalam melakukan penilaian diberikan batasan dan operasionalisasi tujuan dan sasaran. Penilaian juga mengkritik dengan mempertanyakan secara sistematis tujuan dan sasaran yang dikaitkan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Dalam mempersoalkan tujuan dan sasaran, dilakukan analisis terhadap berbagai sumber penilaian misalnya interest pribadi dan objek kebijaksanaan, secara teknis, ekonomis, legal, sosial, dan substantif.
3. Penilaian, memperkaya metode analisis kebijaksanaan termasuk masalah membuat struktur dan rekomendasi. Terdapat 4 (empat) aspek yang harus diperhatikan untuk menggali informasi tentang kinerja kebijaksanaan yang antara suatu aspek dengan aspek lainnya saling mempengaruhi. Keempat aspek tersebut dapat digambarkan dalam gambar berikut ini:



Keempat aspek tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi antara dirinya. Analisis dan kritik yang dilakukan dapat dilihat dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Analisis dan kritik juga berdampak pada informasi dan batasan yang diberikan. Struktur dan rekomendasi yang dibuat juga berdampak pada analisis dan kritik. Dengan memahami hubungan antara empat aspek tersebut, penilaian dapat dilakukan dengan lebih efektif dan akurat.

**MASALAH
KEBIJAKSANAAN**

**MASALAH
MEMBUAT PERAMALAN
STRUKTUR**

**DUGAAN
PRAKTIS**

**HASIL-HASIL KINERJA ALTERNATIF
KEBIJAKSANAAN KEBIJAKSANAAN KEBIJAKSANAAN**

EVALUASI

MONITORING REKOMENDASI

**KEGIATAN
KEBIJAKSANAAN**

Gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Adjustment cycle*, yaitu aktivitas kebijaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi baru yang telah dimonitor dan dinilai oleh uji coba implementasi kebijaksanaan. Hasil penyesuaian direkomendasikan untuk kegiatan, dalam beberapa hal bisa terjadi pemindahan suatu sumber dari suatu kategori kepada kategori lain, atau perubahan (naik/turun) anggaran.

2. *Continuity cycle*; Kegiatan kebijaksanaan mungkin juga dilanjutkan tanpa modifikasi, karena informasi tentang kinerja kebijaksanaan menunjukkan penilaian yang cukup memuaskan. Siklus kontinuitas merupakan bukti dari kebijaksanaan dan program yang tidak terjadi pemodifikasi, baik dalam target, strata, maupun dalam sumber daya dan personil.
3. *Termination cycle*; Kegiatan kebijaksanaan, juga ditetapkan secara menyeluruh, karena informasi yang diperoleh membolehkan masalah-masalah diselesaikan, atau karena kegiatan kebijaksanaan menciptakan banyak masalah dari pada memecahkan.
4. *Restructuring cycle*; Informasi tentang kinerja kebijaksanaan akan menghasilkan penjelasan masalah-masalah kebijaksanaan.

Dalam mengumpulkan informasi tentang kinerja kebijaksanaan, analisis menggunakan banyak tipe kriteria untuk mengevaluasi hasil-hasil kebijaksanaan. Tipe kriteria evaluasi berbeda dengan tipe kriteria untuk rekomendasi dalam waktu penerapannya saja. Kriteria evaluasi diterapkan setelah kegiatan kebijaksanaan berjalan, sedangkan tipe kriteria rekomendasi diterapkan sebelumnya. Tipe-tipe kriteria tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Kriteria Evaluasi Kebijaksanaan

TIPE KRITERIA	PERTANYAAN	KETERANGAN
1. Efektifitas	Pernahkah penilaian hasil kebijaksanaan dilakukan?	Unit pelayanan
2. Efisiensi	Berapa kali dibutuhkan penjelasan untuk mendapatkan hasil penilaian yang baik?	Unit biaya Keuntungan bersih Ratio rugi-laba
3. Kecukupan	Sejauh mana penilaian hasil diarahkan untuk memecahkan persoalan?	Biaya tetap Efektivitas tetap
4. Keadilan	Apakah keuntungan dan kerugian didistribusikan seimbang antar kelompok?	Kriteria pareto
5. Pertanggung jawaban	Apakah hasil penilaian kebijaksanaan menunjukkan hasil yang memuaskan kebutuhan?	Sesuai dengan hasil survei
6. Kecocokan	Hasil kebijaksanaan dimaksudkan untuk bisa dievaluasi?	Program - program umum dapat seimbang dan seefisien mungkin

Pendekatan dalam evaluasi;

Evaluasi mempunyai 2 (dua) aspek yang selalu berhubungan, yaitu metode yang dipergunakan dan penetapan skala nilai untuk menetapkan hasil-hasil evaluasi tersebut. Penggunaan suatu metode penilaian dan penetapan suatu skala penilaian akan berdampak terhadap hasil penilaian kebijaksanaan. Selain itu, perlu dipahami bahwa banyak kegiatan yang termasuk ke dalam rangkaian kegiatan kebijaksanaan yang tidak dapat dinilai.

Untuk itu, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan dalam penilaian kebijaksanaan, yaitu:

1. *Pseudo evaluation*; yaitu pendekatan evaluasi yang menggunakan metode ilmiah untuk membuat valid dan reliabelnya informasi tentang hasil kebijaksanaan, tanpa mencoba menampakkan nilai-nilai hasil kepada organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok secara keseluruhan. Dalam *pseudo evaluation* analisis menggunakan berbagai metode atau alat seperti desain eksperimen, daftar pertanyaan, penggunaan sampel acak sederhana, berbagai teknik statistik, dan lain-lain, untuk menjelaskan bermacam-macam hasil kebijaksanaan dan mengukur input kebijaksanaan berupa variabel-variabel yang menjadi bagian dari proses seperti jumlah pegawai, hasil pelayanan kesehatan, dan lain-lain.
2. *Formal Evaluation*; adalah suatu pendekatan yang menggunakan metode ilmiah untuk membuat valid dan reliabelnya informasi tentang hasil kebijaksanaan, berdasarkan tujuan program-program kebijaksanaan yang secara formal dipublikasikan oleh pembuat kebijaksanaan dan administrator. Evaluasi formal menggunakan peraturan perundangan, dokumen program, dan interview dengan pembuat kebijaksanaan dan administrator untuk mengidentifikasi, membatasi, dan membuat tujuan-tujuan khusus.

Formal evaluation dibagi menjadi: developmental evaluation, retrospective process evaluation (longitudinal & crossectional), experimental evaluation, dan retrospective outcome evaluation.

3. *Decission Theoretic Evaluation*; adalah suatu pendekatan yang menggunakan metode ilmiah untuk menghasilkan informasi yang valid dan reliabel tentang hasil kebijaksanaan yang dinilai di luar penilaian pengusa/pembuat kebijaksanaan. Perbedaan yang menyolok dengan pendekatan lainnya adalah bahwa pendekatan decission theoretic evaluation memecahkan tujuan dan sasaran secara tersendiri dengan pembatasan-pembatasan dari penguasa. Ini berarti secara formal tujuan dan sasaran yang sudah diucapkan oleh pembuat kebijaksanaan dan administrator menjadi sumber nilai semenjak dia mencanangkan formulasi dan pelaksanaan kebijaksanaan. Pendekatan decission theoretic evaluation

mencoba mengatasi kekurangan-kekurangan dalam pseudo evaluation dan formal evaluation.

Teknik Evaluasi;

Teknik evaluasi akan membantu menganalisa dan mengevaluasi kinerja kebijaksanaan. Dalam beberapa teknik evaluasi mungkin digunakan berbagai metode analisis kebijaksanaan, termasuk mengenai restrukturisasi, peramalan, rekomendasi, dan monitoring. Misalnya, *Assumptional Analysis* mungkin bisa digunakan untuk membandingkan asumsi tentang kegiatan kebijaksanaan dengan tujuan; *Cross Impact Analysis* mungkin bisa digunakan dalam mengidentifikasi hasil kebijaksanaan yang tidak dapat diantisipasi, dibandingkan dengan tujuan program kebijaksanaan; *Similary Discounting* mungkin hubungannya dengan evaluasi kebijaksanaan sebagai rekomendasi analisis rugi/laba dan analisis efektivitas biaya yang dihubungkan dengan waktu yang akan datang; Selanjutnya, teknik yang berkaitan dengan grafik dan nomor indeks untuk mengontrol analisis yang bersifat series, perlu sekali dalam memonitor hasil kebijaksanaan. Dalam kenyataannya, mungkin dipergunakan lebih dari satu metode atau teknik evaluasi kebijaksanaan yang saling berhubungan.

Secara ringkas dapat disebutkan berbagai teknik evaluasi dengan ketiga pendekatan yang telah disebutkan di atas sebagai berikut:

1. Pendekatan Pseudo Evaluation, dapat menggunakan teknik graphic display, tabular display, index numbar, interupted time series analysis, control series analysis, dan regression discontinuity analysis.
2. Pendekatan Formal Evaluation, dapat menggunakan teknik objective mapping, value clasification, value critique, constrain mapping, cross impact analysis, dan discounting.
3. Pendekatan Decission Theoretic Evaluation, dapat menggunakan brainstorming, assumptional analysis, policy delphi, user survey analysis.

B. Arah, Sasaran, dan Kebijaksanaan Pembangunan Aparatur Negara Pada Repelita VI

1. Arah Pembangunan Aparatur

Arahan GBHN 1993, pembangunan aparatur negara diarahkan pada makin terwujudnya dukungan administrasi negara yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan untuk mewujudkan sistem administrasi negara yang makin andal, profesional, efisien, efektif, serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis. Kebijaksanaan dan langkah pendayagunaan administrasi negara perlu terus dilanjutkan, ditingkatkan dan ditujukan kepada penataan organisasi, penyempurnaan ketatalaksanaan, pemantapan sistem informasi, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraannya.

Pembangunan aparatur pemerintahan diarahkan pada peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas seluruh tatanan administrasi pemerintahan, termasuk peningkatan kemampuan dan disiplin, pengabdian, keteladanan, dan kesejahteraan aparatnya, sehingga secara keseluruhan makin mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam melayani, mengayomi, serta menumbuhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, serta tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat. Pembinaan, penyempurnaan, dan pendayagunaan aparatur pemerintah baik kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun kepegawaianya perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan.

Sistem pengawasan keuangan negara dan pembangunan, baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional termasuk pengawasan oleh masyarakat dimantapkan secara terpadu dan konsisten agar tercapai efisiensi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Perangkat pengawasan dan upaya tindak lanjutnya ditingkatkan secara terpadu bersamaan dengan pengembangan tanggung jawab masyarakat disertai

peningkatan disiplin nasional. Penertiban aparatur pemerintah dilanjutkan dan makin ditingkatkan terutama dalam menegakkan disiplin aparatur pemerintah serta dalam menanggulangi penyalahgunaan wewenang dan bentuk penyelewengan lainnya, yang merugikan dan menghambat pelaksanaan pembangunan serta merusak citra dan wibawa aparatur pemerintah, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, kebocoran, serta pemborosan kekayaan dan keuangan negara.

Pembinaan kepegawaian diarahkan pada terwujudnya kepegawaian negara yang mantap dengan pengembangan karier berdasarkan prestasi kerja, kemampuan profesional, keahlian dan keterampilan, serta kemantapan sikap mental aparat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 terus ditingkatkan secara berencana melalui upaya pendidikan dan pelatihan, penugasan, bimbingan dan konsultasi, serta melalui pengembangan motivasi, kode etik, dan disiplin kedinasan yang sehat didukung sistem informasi kepegawaian yang mantap serta dilengkapi sistem pemberian penghargaan yang wajar.

Hubungan kerja yang serasi antara aparatur pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam upaya makin mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab terus dikembangkan secara realistik atas dasar asas dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan dalam rangka mendorong kemajuan dan memperlancar pelaksanaan pembangunan secara merata di seluruh pelosok tanah air, serta meningkatkan perwujudan Wawasan Nusantara.

Pembangunan aparatur pemerintah daerah yang meliputi lembaga, tata kerja, dan aparat pemerintah daerah diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang makin efisien, efektif dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta meningkatnya keterpadua perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan seluruh aparatur pemerintah daerah. Pendayagunaan aparatur pemerintah daerah ditujukan pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, peningkatan kualitas sistem administrasi, penyempurnaan ketatalaksanaan, serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan aparatnya.

Koordinasi, kerja sama, dan kemampuan aparatur pemerintah yang bertugas di daerah makin dimantapkan untuk lebih meningkatkan keserasian, kelancaran, efisiensi, dan efektivitas serta keterpaduan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Pelaksanaan fungsi dan peranan aparatur pemerintah desa dan kelurahan terus ditingkatkan dan dikembangkan sehingga makin mampu, efisien dan efektif dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan desa serta kelurahan dalam melayani, mengayomi, menggerakkan, dan menghargai prakarsa dan peran aktif rakyat dalam pembangunan, bersamaan dengan upaya menciptakan kondisi yang lebih mendorong peningkatan kehidupan dan tanggung jawab masyarakat serta kemampuan kelembagaannya.

Sistem perencanaan penyusunan program dan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan dikembangkan secara terpadu dan efisien, sejalan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan serta kemampuan keuangan negara. Kemampuan aparatur pemerintah baik di Pusat maupun di daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pembangunan perlu makin ditingkatkan.

2. Sasaran Pembangunan Aparatur

Sasaran pembangunan aparatur negara dalam Reelite VI sesuai dengan amanat GBHN 1993 adalah tertatanya manajemen aparatur negara untuk meningkatkan kualitas, kemampuan, dan kesejahteraan manusianya.

Menjadi sasaran pula terwujudnya sistem administrasi negara yang makin andal, profesional, efisien, efektif, serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis dalam tatanan kehidupan nasional, regional, dan global serta mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan negara dan pembangunan; meningkatnya semangat pengabdian dan kemampuan aparatur

pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, khususnya dalam melayani, mengayomi, mendorong, dan menumbuhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan; serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat, permasalahan, kepentingan, dan kebutuhan rakyat, terutama yang masih hidup dalam kemiskinan atau rakyat kecil.

Sasaran lainnya adalah meningkatnya perwujudan otonomi daerah di tingkat II yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dalam mendorong kemajuan dan memperlancar pelaksanaan pembangunan secara merata di seluruh pelosok tanah air, serta meningkatkan perwujudan wawasan nusantara; meningkatkan kemampuan kelembagaan dan efisiensi serta efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran aparatur kecamatan dan pemerintahan desa dan kelurahan dalam melayani dan mengayomi masyarakat; dalam mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat; dalam pembangunan; serta dalam menghargai pendapat, menanggapi aspirasi, dan menyalurkan rasa tanggung jawab masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan pada tingkat kecamatan dan desa ataupun kelurahan; mantapnya keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan seluruh aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah; terwujudnya kepegawaian negara yang berkualitas; memiliki kemampuan profesional, keahlian dan keterampilan, kepemimpinan serta semangat pengabdian dan disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas; taat dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasial dan UUD 1945; serta meningkatnya kesejahteraan pegawai negeri didukung sistem penggajian dan pembinaan serta pengembangan karier berdasarkan kemampuan profesional dan prestasi kerja, serta penerapan sistem karier terbuka antara aparatur pusat dan daerah.

Terwujudnya sistem kearsipan yang andal, yang dikelola secara fungsional sebagai bagian terpadu dalam pengembangan sistem manajemen modern untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan secara berkesinambungan, serta terselamatkannya arsip.

3. Kebijaksanaan Pembangunan Aparatur

Pembangunan aparatur negara dalam Repelita VI meliputi kebijaksanaan: (a) peningkatan disiplin aparatur negara; (b) pemantapan organisasi kenegaraan; (c) pendayagunaan organisasi pemerintahan; (d) penyempurnaan manajemen pembangunan; dan (e) peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Peningkatan disiplin aparatur negara diwujudkan antara lain dengan penetapan disiplin nasional yang dipelopori oleh aparatur negara sebagai krida kedua Panca Krida Kabinet Pembangunan VI, yang menyatakan: "meningkatkan disiplin nasional yang dipelopori aparatur negara menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam memberikan pelayanan pada rakyat Indonesia".

Peningkatan disiplin pegawai dilakukan melalui: pemasyarakatan budaya kerja, peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, peningkatan mutu kepemimpinan, pendidikan, pelatihan, dan penataran, serta melalui penerapan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada keseluruhan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, termasuk penerapan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pemantapan organisasi kenegaraan dilaksanakan dengan mengembangkan hubungan kerja sama yang serasi dan terbuka berdasarkan asas kekeluargaan, antara aparatur kenegaraan dan pemerintahan, untuk dapat menyalurkan dan menanggapi aspirasi masyarakat yang berkembang dinamis secara positif dan efektif. Hal tersebut diwujudkan melalui mekanisme penyusunan kebijaksanaan yang transparan dan partisipatif serta pengawasan pelaksanaan berbagai kebijaksanaan pembangunan dan peraturan perundang-undangan secara konstitusional dan demokratis.

Pendayagunaan organisasi pemerintahan meliputi penataan struktur, fungsi, rentang kendali dan saling hubungan antar dan dalam jajaran

organisasi pemerintahan, sehingga penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembangunan yang diembannya efisien dan efektif. Ketergantungan dalam proses pengambilan keputusan, penetapan kebijaksanaan alokasi sumber daya dan pengembangan sumber daya manusia, terhadap unit kerja atasan diusahakan menjadi minimal. Selain itu dilakukan pula perampingan birokrasi melalui penyelarasan tugas pokok pemerintah, jabaran fungsinya, dan uraian pekerjaan yang mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Pendayagunaan organisasi pemerintahan meliputi: pendayagunaan organisasi pemerintah pusat, penyempurnaan organisasi aparatur pemerintah daerah dan desa, serta penyelarasan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan keselarasan dan keserasian pelaksanaan tugas masing-masing berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Penyempurnaan manajemen pembangunan meliputi: (1) penyesuaian administrasi kebijaksanaan pembangunan; (2) pendayagunaan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan pembiayaan, serta sistem pemantauan dan pelaporan; (3) penyempurnaan manajemen program dan proyek pembangunan; (4) penyempurnaan administrasi umum dan kearsipan; (5) pengembangan teknologi administrasi dan sistem informasi yang andal; serta (6) penerapan teknik-teknik manajemen modern dalam proses pengambilan keputusan, penetapan kebijaksanaan, dan pengalokasian sumber daya.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur negara ditingkatkan melalui antara lain rangkaian pembinaan tenaga manusia dan penyempurnaan administrasi kepegawaian. Cakupan pembinaan tersebut meliputi: (1) penyempurnaan sistem penentuan formasi dan pengadaan; (2) pembinaan karier; (3) pendidikan dan pelatihan; (4) sistem penggajian; (5) tunjangan dan kesejahteraan; (6) pembinaan kepemimpinan aparatur; serta (7) pengelolaan administrasi PNS.

4. Program Pembangunan Aparatur

Kebijaksanaan pembangunan aparatur negara dalam Repelita VI dijabarkan lebih jauh antara lain dalam program pembangunan, yaitu program pokok dan program penunjang. Program pokok meliputi: Program peningkatan prasarana dan sarana aparatur negara; program peningkatan efisiensi aparatur negara; program pendidikan dan pelatihan aparatur negara; dan program penelitian dan pengembangan aparatur negara. Sementara itu program penunjang meliputi: program pengembangan informasi pemerintahan; program pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasan; dan program pengembangan hukum administrasi negara.

Program peningkatan prasarana dan sarana aparatur negara dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan dengan lebih efisien dan efektif, serta terpadu, baik pada aparatur kenegaraan maupun pada aparatur pemerintahan.

Program peningkatan efisiensi aparatur negara dimaksudkan untuk meningkatkan pendayagunaan organisasi, ketatalaksanaan, serta disiplin dan tertib hukum aparatur negara agar lebih dapat mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan secara efisien dan efektif. Program ini meliputi kegiatan untuk (1) menunjang peningkatan pelaksanaan fungsi aparatur kenegaraan; (2) pendayagunaan organisasi aparatur pemerintahan; (3) penyempurnaan administrasi kebijaksanaan pembangunan; (4) pemantapan sistem perencanaan; (5) penyempurnaan sistem penganggaran dan pembiayaan; (6) pengembangan sistem pemantauan dan pengendalian; (7) pengembangan dan pendayagunaan sistem informasi; (8) penyempurnaan administrasi umum dan kearsipan; (9) peningkatan disiplin dan tertib hukum dalam aparatur negara.

Program pendidikan dan pelatihan aparatur negara, meliputi program pendidikan kedinasan dan program pelatihan. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas, kemampuan, dan keterampilan, pegawai agar dapat melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif, serta

mengembangkan kesatuan berpikir dan kesatuan bahasa huna menciptakan kesatuan langkah, kegiatan dan kerja sama dalam menanggapi masalah dan melaksanakan pembangunan. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini antara lain (1) penyempurnaan sistem, materi kurikulum, dan silabus, serta sasarandiklat aparatur negara; (2) peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri; (3) peningkatan pengetahuan tenaga widyaiswara; (4) pengembangan diklat pembekalan bagi PNS yang akan memasuki masa persiapan pensiun; (5) peningkatan efisiensi, koordinasi penyelenggaraan diklat luar negeri, serta kerjasama luar negeri dalam bidang diklat; (6) pengembangan sistem informasi diklat PNS. Program pelatihan bersifat jangka pendek dan pesertanya hanya mendapatkan sertifikat, tidak mendapatkan gelar; meliputi keterampilan teknis, administratif dan manajerial.

Program Pendidikan Kedinasan merupakan program pendidikan yang berjenjang mulai dari SLTA sampai dengan perguruan tinggi hingga pesertanya berhak mendapatkan ijazah dan/atau gelar yang dilegalisasikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam Repelita VI Program Pendidikan Kedinasan ini meliputi berbagai bidang pengetahuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah yang bersangkutan.

Program Penelitian dan Pengembangan Aparatur Negara diarahkan untuk menghasilkan masukan bagi pengembangan kebijaksanaan dan penyempurnaan kelembagaan guna meningkatkan daya guna dan hasil guna aparatur negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan. Program tersebut meliputi kegiatan (1) penelitian dan pengembangan kebijaksanaan pembangunan sektor strategis; (2) pengkajian permasalahan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian; serta (3) peningkatan kualitas badan/pusat penelitian dan pengembangan di seluruh instansi pemerintah.

Program Pengembangan Informasi Pemerintahan ditujukan untuk mendayagunakan pemanfaatan teknologi informatika pada aparatur negara,

dan mampu secara optimal menyediakan informasi yang tepat, akurat, lengkap dan muktahir, baik untuk perumusan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan. Program tersebut meliputi kegiatan antara lain, (1) pendayagunaan jaringan dan pusat informasi yang telah dikembangkan di berbagai instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, dan antara pusat dan daerah; (2) pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang sistem informasi; dan (3) pendayagunaan sarana sehingga terjamin transformasi dan kualitas informasi yang dibutuhkan.

Program pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan dimaksudkan untuk menunjang terwujudnya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui peningkatan kualitas sistem pengawasan dan untuk mengupayakan agar pengawasan dapat dilakukan lebih luas, cepat, mendalam dan menyeluruh, disertai upaya menumbuhkan prakarsa dan peran aktif pengawasan, baik oleh pimpinan, atasan langsung maupun oleh masyarakat dengan tujuan untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Program Pengembangan Hukum Administrasi Negara ditujukan untuk menunjang kegiatan aparatur negara dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan melalui penyempurnaan secara terus menerus ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan dalam penyusunan kebijaksanaan administrasi dan pembangunan, serta pemantapan pelaksanaannya.

C. Arah, Sasaran, dan Kebijaksanaan Pembangunan Aparatur Negara di Daerah Pada Repelita VI

Seperti dikemukakan di atas, bahwa pada dasarnya kebijaksanaan pembangunan aparatur negara di Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari kebijaksanaan pada tingkat Nasional. Berdasarkan hal tersebut, kebijaksanaan pendayagunaan aparatur negara di daerah, khususnya pada Daerah-daerah yang menjadi sampel penelitian adalah sebagai berikut:

1. Arah Pembangunan Sektor Aparatur di Daerah

GBHN 1993 mengamanatkan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam upaya melaksanakan pemerataan pembangunan di seluruh tanah air, pembangunan daerah dan kawasan yang kurang berkembang, seperti di daerah terpencil, perlu ditingkatkan sebagai perwujudan wawasan nusantara.

Dengan mengacu kepada arahan GBHN 1993 tersebut, pembangunan sektor aparatur negara di Daerah diarahkan untuk penguatan kelembagaan dan aparatur pemerintah dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan.

2. Kebijaksanaan Pembangunan Sektor Aparatur di Daerah

Kebijaksanaan sektor Aparatur Negara di Daerah pada Repelita VI, terutama dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Kebijaksanaan tersebut diarahkan kepada peningkatan kemampuan aparatur melalui penguatan manajemen dan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kemampuan memobilisasi berbagai sumber keuangan daerah, serta peningkatan kemampuan lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Penataan kembali batas wilayah dan daerah dalam rangka pemekaran dan penyesuaian status daerah tertentu, diselenggarakan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pembangunan dan administrasi pemerintahan Daerah.

3. Program Pembangunan Sektor Aparatur di Daerah

Dalam rangka mencapai sasaran dan melaksanakan berbagai kebijaksanaan tersebut di atas, pembangunan aparatur di Daerah dalam Repelita VI, dilaksanakan melalui program peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah; dan Program Peningkatan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah. Kedua program ini masuk ke dalam program pokok pembangunan Daerah.

1. Program Peningkatan Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 - a. Meningkatkan kemampuan, disiplin, dan wawasan aparatur pemerintah daerah serta mendayagunakan fungsi dan struktur kelembagaan pemerintahan daerah tingkat II termasuk kecamatan dan desa.
 - b. Meningkatkan kualitas manajemen pemerintah daerah meliputi sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian termasuk memantapkan fungsi koordinasi, baik antar instansi pemerintah di daerah maupun antara lembaga pemerintah pusat dan daerah.
 - c. Menyempurnakan dan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan daerah.
 - d. Mengembangkan sistem informasi manajemen pembangunan daerah.
 - e. Meninjau kembali status dan batas daerah otonom dan wilayah administratif daerah tertentu.
2. Program Peningkatan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 - a. Meningkatkan PAD dengan mengintensifkan sumber pendapatan yang ada, baik pajak, retribusi, maupun laba perusahaan daerah, serta menggali sumber pendapatan yang baru;
 - b. Meningkatkan efisiensi dan pengelolaan bantuan termasuk Inpres serta pinjaman, antara lain melalui pemanfaatan rekening pembangunan daerah;
 - c. Meningkatkan keikutsertaan dunia usaha dalam pembangunan daerah;

- d. Memantapkan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan penggunaan keuangan daerah;
- e. Meningkatkan efisiensi dan produktifitas BUMD.

BAB III

PERKEMBANGAN SEKTOR APARATUR DI DAERAH DARI PELITA V SAMPAI TAHUN KE-3 REPELITA VI

A. Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat mencakup areal seluas 43.177,22 kilometer persegi. Secara administratif, Propinsi daerah Tingkat I Jawa Barat terdiri atas 20 (enam) Kabupaten Daerah Tingkat II, yaitu Kabupaten DT.II Pandeglang, Serang, Lebak, Tanggerang, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Cirebon, Kuningan, Indramayu, Majalengka, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis; serta 5 Kotamadya DT.II yaitu Kotamadya DT.II Bandung (sebagai ibukota Propinsi), Cirebon, Bogor, Sukabumi, dan Tanggerang.

Untuk kepentingan penelitian evaluasi midterm Repelite VI sektor aparatur negara di Daerah ini, dari Propinsi DT.I Jawa Barat diambil 5 (lima) Daerah Tingkat II sebagai sampel, yaitu Kabupaten DT.II Bandung, Kodya DT.II Cirebon, Kodya DT.II Bogor, Kabupaten DT.II Serang, dan Kabupaten DT.II Tasikmalaya. Terhadap kelima Kabupaten?Kodya DT.II inilah dilakukan evaluasi sektor aparatur di daerah selama 3 tahun pertama Repelite VI. Evaluasi meliputi aspek kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan, serta kelembagaan.

Sementara itu, instansi dan Unit Organisasi yang dijadikan sampel dari setiap Kabupaten DT.II adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten DT. II Bandung; Instansi Dinas Pertanian, Dinas Pengelolaan Pasar, Dinas Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, Dinas Perikanan, DLLAJR, PKT, Bag. Perekonomian, Bag. Organisasi, Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan, Dinas Sosial, Dinas Peternakan, Dinas Transmigrasi, PMD, Bag. Hukum, Dispenda, Bag. Keuangan, Din Koperasi.

2. Kotamadya DT. II Bogor; Dinas Perkebunan dan Pertanian, Dinas Kebersihan.
3. Kabupaten DT. II Tasikmalaya; Diparda, Setwida, P & K, Dinas Pertanian, Bappeda, Bag. Hukum, Dinas Perkebunan, Bag. Leuangan, Bag. Organisasi, DKK, DPUK, Dinas Perekonomian.
4. Kotamadya DT. II Cirebon; Sekwilda, Bidang Penyusunan Program, BAPPEDA, Bagian Kepegawaian; dan beberapa dinas DT.II
5. Kabupaten DT.II Serang: Sekwilda (Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Perekonomian), Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, BAPPEDA, Dinas Kesehatan.

1. Aspek Kepegawaian

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan pada instansi sampel di 5 Kabupaten di Propinsi Jawa Barat, pada akhir Pelita ke V paling banyak diduduki oleh yang berijazah SLTA yaitu sekitar 41,93% - 56,82% dari seluruh pegawai yang tercatat , setelah itu SD atau tidak tamat SD yaitu sekitar 16% - 41,44% diikuti oleh SLTP 7,52% - 8,57%, kemudian S1 (Sarjana) yaitu 6,85% - 10,71%, kemudian yang berdiploma 1,96% - 10,95% dan S2/S3 sejumlah 0% - 1,30%.

Pada akhir tahun ke 3 Repelita VI tetap paling banyak diduduki oleh yang berijazah SLTA sekitar 29,27% - 83,89%, setelah itu yang berijazah SD atau tidak tamat SD sejumlah 9,46%- 47,79% kemudian Sarjana (S1) sejumlah 2,71% - 13,97%, diikuti oleh SLTP 1,50% - 10,96% setelah itu S2/s3 sejumlah 1,16 - 2,71% dan yang berijazah diploma walaupun terdapat penurunan antara 6,27% - 11,67%. Data lengkap mengenai kondisi pegawai berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 3.1.1 berikut:

Tabel 3.1.1 Jumlah Minimum dan Maksimum Pegawai Berdasarkan Pendidikan Pada Instansi Sampel di 5 Kabupaten di Propinsi DT.I Jawa Barat

Pendidikan	Akhir Repelita V	Akhir Thn Ke-3 Repelita VI	Prosentase		
			Terhadap Total Repelita V	Terhadap Perubahan Repelita VI	Terhadap Total
SD atau tdk tamat	427 - 725	445 - 1.447	16 - 14,44	3,54-170,46	9,46-47,79
SD	123 - 333	161 - 229	7,51- 8,57	23-30,89	1,50-10,96
SLTP	686 - 2.628	430 - 12.828	41,93-56,82	5,51-594,53	29,27-83,89
SLTA	32 - 360	42 - 373	1,96-10-95	3,61-76,07	11,67-6,20
Diploma	112 - 416	130 - 592	6,85-10,71	2,71-12,97	16,07-42,31
Sarjana (S1)	1 - 40	1 - 53	0-1,030	0-32,5	1,16-2,71
S2 atau S3					

Sumber : Data lapangan, Kuesioner, diolah

Apabila kita lihat perubahan yang dibandingkan antara tahun-tahun akhir Pelita V dengan tahun ke 3 Repelita VI menunjukkan kenaikan dan penurunan kondisi pegawai yaitu untuk: SD dan tidak tamat SD terdapat kenaikan 3,54% s/d 17,46%; SLTP terdapat penurunan dari 23% s/d 30,89%; SLTA terdapat penurunan sejumlah 5,51% s/d 594,53%; Diploma terdapat kenaikan 3,61 s/d 76,07%; Sarjana (S1) terdapat kenaikan 16,07% s/d 42,31%. dan S2/S3 sejumlah 0% s/d 32,50%.

**Tabel 3.1.2 Jumlah Pegawai Yang Menduduki
Jabatan Struktural Pada Instansi Sampel di 5 Kabupaten
di Propinsi DT. I Jawa Barat**

Eselon	Akhir Repelita V	Akhir Thn Ke-3 Repelita VI	Persentase Perubahan
II	-	-	-
III	10 - 11	9 - 16	- 10 - 45,45%
IV	68 - 210	52 - 216	- 23,53-62,39%
V	122 - 255	127 - 224	50,20-83,60

Sumber : Data lapangan, Kuesioner, diolah

Berdasarkan eselon; jumlah pegawai di 5 Kabupaten (Jawa Barat) pada saat ini ada perubahan-perubahan kecil, ada penambahan maupun ada pengurangan yang tidak banyak dibandingkan dengan jumlah akhir Pelita V. Eselon III berkurang antara 10% s/d 45%. Eselon IV berkurang antara 23% s/d 62%. dan Eselon V bertambah antara 50% s/d 83%.

**Tabel 3.1.3 Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural
Pada Instansi Sampel di 5 Kabupaten
di Propinsi Daerah DT. I Jawa Barat**

Jenis Diklat	Akhir Repelita V	Akhir Thn Ke-3 Repelita VI	Persentase Perubahan
Adum/Sepada/Sepala	16 - 51	8 - 99	62,22-100 %
Sepadya/Sepama	4 - 7	5 - 14	0-125 %
Sespa/Sepamen	0 - 2	0 - 1	0- 50 %

Sumber : Data lapangan, Kuesioner, diolah

Jumlah pegawai berdasarkan yang telah mengikuti Diklat Struktural pada instansi sampel di 5 Kabupaten menunjukkan 65% s/d 100%, pejabat-pejabat yang telah mengikuti diklat struktural Adum/Sepada/Sepala. Sedangkan yang mengikuti Sepadya/Sepama sudah lebih dari 100% yaitu 125% pada 3 tahun terakhir Pelita VI dibanding dengan pada saat Pelita V

dan Sespa/Sepamen pada Pelita V harusnya tidak ada yang mengikuti tapi pada 3 tahun terakhir Pelita VI sudah 50% mengikuti.

Berbagai Diklat Teknis Fungsional dan Teknik Manajemen dilaksanakan dan ± 50% s/d 100% telah diikuti oleh orang-orang yang diperkirakan membutuhkan Diklat tersebut. Berbagai jenis diklat fungsional dan manajemen yang pernah diikuti oleh pegawai Kabupaten DT.II yang ada di Jawa Barat dapat dilihat pada Lampiran.

2. Aspek Ketatalaksanaan

Dalam merencanakan Pembangunan di Instansinya, instansi-instansi yang menjadi sampel kelihatannya tidak pernah memperhatikan teknik/metode perencanaan yang sebetulnya mereka bisa serapkan seperti halnya PPBS, PIP, PKT, CPM, Network Planning, PERT dan lain-lain. Mereka hanya mengelompokkan rencana pada jangka panjang, menengah, pendek menggunakan metode/teknik perencanaan tertentu.

Tabel 3.1.4 Rata-rata Frekuensi Rapat Koordinasi Selain Rakorbang Pada Instansi Sampel di 5 Kabupaten di Propinsi DT.I Jawa Barat

Frekuensi Rapat	Akhir Repelita V	Akhir Thn Ke-3 Repelita VI	Persentase Perubahan
Minimum	1	1	0
Maksimum	35	72	106

Sumber : Data lapangan, Kuesioner, diolah.

Rapat Koordinasi selain Rakorbang yang memang harus dilaksanakan pada saat mengusulkan Program/Proyek/Kegiatan dilaksanakan oleh instansi-instansi yang menjadi sampel yaitu; minimal 7% instansi-instansi melakukan 1 x (kali) rapat dan maximal 1% melaksanakan 72 x (kali) rapat koordinasi, sisanya 92% melaksanakan 4, 6, 12, 14, 24, 35, 37, 48 (x) kali rapat koordinasi.

Tabel 3.1.5 Rata-rata Keterlambatan Penjadualan Proyek Atau Kegiatan Dari Perencanaan Yang Telah Ditetapkan Pada Instansi Sampel di 5 Kabupaten di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

Momen Kegiatan	Akhir Repelita VI (Bulan)	Akhir Thn Ke-3 Repelita V (bulan)	Persentase Perubahan
Pelaksanaan (Memulai Pekerjaan)	1 - 6 Bulan	1 - 4 Bulan	33,33
Penyelesaian	1 - 3 Bulan	1 - 3 Bulan	66,67
Turunnya Anggaran	2 - 4 Bulan	2 Bulan	50

Sumber : Data Lapangan, Kuesioner, diolah

Seperti halnya dalam perencanaan selalu ditetapkan bahwa tahun Anggaran baru dimulai pada Bulan April dan diakhiri bulan Maret tahun berikutnya, akan tetapi pada pelaksanaannya pada instansi-instansi yang menjadi sampel punya kebiasaan saat mulai pelaksanaan pekerjaan terlambat 1 sampai dengan 6 bulan pada Repelita V dan 1 s/d 4 bulan pada Repelita VI (ini berarti ada perbaikan).

Sedangkan penyelesaiannya terlambat 1 s/d 3 bulan pada Repelita V dan tetap 1 s/d 3 bulan pada Repelita VI. Hal tersebut juga disebabkan oleh turunnya anggaran yang terlambat 2 s/d 4 bulan pada Repelita V dan 2 bulan pada Repelita VI (ini juga ada perbaikan dari Repelita sebelumnya).

Tabel 3.1.6 Rata-rata Frekuensi Pengawasan Per Tahun Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Atau Proyek Pada Instansi Sampel di 5 Kabupaten di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

Instansi Pengawas	Akhir Repelita V	Akhir Thn Ke-3 Repelita VI	Persentase Perubahan
BPKP	1 - 5 Kali	1 - 2 Kali	100
BPK	1 - 6 Kali	1 - 12 Kali	100
Itwilcab/Itwilkod	1 - 10 Kali	1 - 2 Kali	80
Itwilprop	1 - 5 Kali	1 - 2 Kali	60

Sumber : Data Lapangan, Kuesioner, diolah

Terhadap pelaksanaan kegiatan atau proyek pada instansi sampel diadakan pengawasan oleh BPKP, BPK, Itwikab/Kod dan Itwilprop. Kelihatannya BPKP mengurangi kegiatan pengawasannya pada akhir Repelite VI dari semula pada Repelite V, Maximal 5 menjadi 2 x (kali), akan tetapi BPK menjadi lebih banyak frekwensi pengawasannya pada akhir Repelite VI yaitu dari semula 6 kali menjadi maksimum 12 kali. Begitu juga Itwilcab/kod. dan Itwilprop mengurangi kegiatan pengawasannya dari Maksimum 10 kali dan 5 kali menjadi maksimum 2 kali.

Tabel 3.1.7 Rata-rata Prosentrage Pelaksanaan Program Repelite VI Pada Instansi Sampel di 5 Kabupaten di Propinsi DT I Jawa Barat

Kabupaten / Kotamadya DT. II	Prosentase
Bogor	40% - 60%
Bandung	34,73 - 92,37 %
Tasik	3 - 60 %

Sumber : Data Lapangan, Kuesioner, diolah

Pada akhirnya kalau kita perhatikan keseluruhan pelaksanaan program Repelite VI pada instansi sampel pada 5 Kabupaten/Kotamadya di Jawa Barat, 67% instansi-instansi di daerah di Jawa Barat tercapai sekitar 60%, sedangkan 33% instansi-instansi di daerah di Jawa Barat dapat mencapai sampai 92%. Pencapaian pelaksanaan program-program Repelite VI.

3. Aspek Kelembagaan

Dari segi kelembagaan, ada beberapa perubahan-perubahan baik dari segi organisasinya maupun penyerahan urusan-urusan; dari segi organisasinya dapat dikatakan bahwa dengan penambahan maupun pengurangan jumlah eselon mulai dari eselon III s/d V menunjukkan ada penyederhanaan maupun pengembangan organisasi seperti dapat dilihat pada tabel pertanyaan No. 2 Bag. I yang lalu, sekitar 8,33% instansi-instansi sampel dari 5 Kabupaten/Kodya mengadakan pengembangan organisasi, sedangkan 58,33% mengadakan penyederhanaan dan sisanya 33,34% tidak

melakukan pengembangan maupun penyederhanaan organisasi dari segi penyerahan urusan telah berkembang menjadi beberapa dinas seperti Dinas PMD, Dinas PKT, Dinas Koperasi & PPH, Dinas Transmigrasi, yaitu sebagai akibat penyerahan urusan dari Pusat maupun DT.I.

B. Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur merupakan wilayah di Pulau Jawa yang berbatasan di sebelah Utara dengan Laut Jawa, di sebelah Timur dengan Selat dan Laut Bali, di sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia, dan di sebelah Barat dengan Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Wilayah Propinsi Jawa Timur mencakup areal seluas 47.922,45 kilometer persegi, dengan tata guna lahan (kondisi tahun 1990) antara lain meliputi areal hutan seluas 5.409 km² (11,3 %), areal belukar seluas 3.658 km² (7,6 %), areal padang rumput seluas 376 km² (0,8 %), areal ladang seluas 368 km² (0,8 %), areal dataran tinggi seluas 8.466 km² (17,7 %), areal persawahan seluas 11.231 km² (23,4 %), areal perkebunan seluas 10.673 km² (22,3 %), areal perairan darat seluas 967 km² (2 %), areal tandus seluas 109 km² (0,2 %), areal permukiman seluas 6.513 km² (13,6 %), dan areal lainnya seluas 152,45 km² (0,3 %).

Secara administratif Daerah Tingkat I Jawa Timur terdiri atas 29 Kabupaten Daerah Tingkat II (Malang, Pacitan, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Ponorogo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Trenggalek, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Tulungagung, Blitar, Kediri, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) ; dan 8 Kotamadya Daerah Tingkat II (Kediri, Blitar, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, dan Surabaya sebagai Ibukota Propinsi).

Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur selama PJP I telah memberikan hasil yang secara nyata dirasakan oleh masyarakat, dengan

makin meningkatnya kegiatan perekonomian yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pembangunan, meningkatnya taraf kesejahteraan dan makin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendidikan dasar dan kesehatan. Namun disadari pula masih banyak masalah yang dihadapi dalam pembangunan daerah, termasuk pembangunan sektor aparatur negara.

Pembangunan bidang atau sektor aparatur negara atau kebijakan pendayagunaan aparatur negara sendiri - sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya - ditujukan kepada penataan organisasi, penyempurnaan ketatalaksanaan, pemantapan sistem informasi, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraannya. Adapun kondisi aspek-aspek kepegawaian, ketatalaksanaan (termasuk didalamnya koordinasi dan pengawasan) dan kelembagaan di Propinsi Jawa Timur dapat digambarkan pada uraian dan tabulasi hasil penelitian dibawah ini.

Namun sebelumnya perlu ditekankan disini bahwa penggambaran wilayah Propinsi Jawa Timur dilakukan melalui pengambilan 5 sampel Daerah Tingkat II, dan sampel instansi yang terdiri dari BAPPEDA, Setwilda dan Dinas Daerah. 5 (lima) daerah sampel yang di ambil dengan instansi sampelnya adalah sebagai berikut :

1. Kodya DT. II Surabaya : Setwilda (Bag. Tata Pemerintahan, Bag. Hukum, Bag. Keuangan, Bag. Kepegawaian, Bag. Organisasi, Bag. Perkotaan, Itwil), BAPPEDA, Dinas (Pengawasan Bangunan Daerah, Kependudukan, Tata Kota, Dispenda, PU).
2. Kab. DT. II Sidoarjo : Setwilda (Bag. Organisasi, Bag. Hukum, Bag. Keuangan), BAPPEDA, Dinas (Perikanan, Sosial, Pariwisata, Pasar, Peternakan, Perkebunan, Kebersihan dan Pertamanan, Koperasi & PPK, Perdagangan, P & K, Transmigrasi & PPH, PU Pengairan, Tenaga Kerja, Kependudukan & Catatan Sipil, LLAJD, Perindustrian, PU Cipta Karya, PMD, Kesehatan, Dispenda, PU Bina Marga).
3. Kab. DT. II Gresik : Setwilda (Asisten I), BAPPEDA, Dinas (Dispenda, Kesehatan, P dan K, Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Peternakan, PU).

4. Kab. DT. II Mojokerto : Setwilda (Bag. Organisasi, Bag. Keuangan, Bag. Perekonomian, Bag. Hukum), Dinas (Kebersihan & Pertamanan, Perikanan, Dispensa, P dan K, PU, Peternakan, Pertanian Tanaman Pangan, Kesehatan, Perkebunan), BAPPEDA.
5. Kab. DT. II Jombang : Setwilda (Bagian Organisasi, Bagian Perekonomian, Bag. Hukum), BAPPEDA, Dinas (PU, Kesehatan, Perkebunan, Kebersihan & Pertamanan, Pertanian Tanaman Pangan, Dispensa, Peternakan).

1. Aspek Kepegawaian

Berdasarkan tingkat pendidikannya, kondisi aparatur negara di Propinsi Jawa Timur saat ini dapat dikatakan mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat melalui perbandingan pada akhir Pelita V dengan tahun ketiga Pelita VI saat ini. Pada akhir Pelita V, dari 4.262 orang jumlah pegawai yang ada, sebagian terbesar (35,99 %) berijasah SD atau bahkan tidak tamat SD. Selain itu, jumlah pegawai yang berpendidikan menengah juga masih tergolong tinggi, yakni sebesar 21,96 % dari SLTP dan 14,24 % dari SLTA. Dengan demikian struktur pegawai dilihat dari pendidikannya masih berbentuk *kerucut*, kecuali untuk kelompok Sarjana (S1) sebesar 20,17 %. Dengan program peningkatan pendidikan aparatur, antara lain melalui Program Wajib Belajar 9 Tahun dan *Zero Growth*, diharapkan pada akhir Repelita VII nanti strukturnya akan berubah menjadi *kerucut terbalik*.

Adapun pada saat ini, dari 4.261 orang jumlah pegawai yang ada, kualifikasi SD atau tidak tamat SD, dan kualifikasi SMP mengalami penurunan meskipun tidak drastis yakni menjadi 32,13 % untuk SD atau tidak tamat SD dan 21,14 % untuk SLTP. Sementara untuk pegawai dengan kualifikasi pendidikan SLTA, Diploma maupun Sarjana mengalami peningkatan masing-masing menjadi 15,25 %, 7,28 %, dan 23,70 %. Hal ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan pembinaan SDM aparatur sudah menampakkan hasilnya, sehingga perlu terus dilanjutkan secara terencana dan sistematis.

Dilihat dari kecenderungannya, maka terlihat bahwa kebutuhan aparatur pada masa yang akan datang akan lebih menitikberatkan kepada sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi pendidikan yang tinggi. Dari data yang ada dapat diperoleh gambaran bahwa aparatur dengan tingkat pendidikan yang rendah semakin berkurang jumlahnya dari tahun ke tahun. Atau dapat dikatakan pula bahwa formasi pada struktur organisasi publik (baca : pemerintah daerah) tidak membutuhkan sumber daya manusia yang tidak mempunyai tingkat pendidikan secara memadai. Hal ini jelas menjadi tantangan bagi pembangunan pendidikan untuk dapat diakses secara merata oleh masyarakat yang sedemikian besar jumlahnya.

Secara lengkap pada tabel dibawah ini dapat dilihat jumlah dan prosentase pegawai berdasarkan pendidikan, serta kecenderungan perubahannya pada masa mendatang.

Tabel 3.2.1 Jumlah dan Prosentase Pegawai Berdasarkan Pendidikan Pada Instansi Sampel di 5 DT II di Propinsi DT I Jawa Timur

Pendidikan	Akhir Repelita V	Akhir Thn Ke-3 Repelita VI	Persentase Perubahan
SD atau tdk tamat SD	1.534 (35,99 %)	1.369 (32,13 %)	-10,7
SLTP	936 (21,96 %)	905 (21,24 %)	-3,3
SLTA	607 (14,24 %)	650 (15,25 %)	7,1
Diploma	319 (7,48 %)	323 (7,58 %)	1,2
Sarjana (S1)	860 (20,17 %)	1.010 (23,70 %)	17,4
S2 atau S3	6 (0,14 %)	4 (0,09 %)	-33,3
J u m l a h	4.262	4.261	

Sumber : Data lapangan, Kuesioner, diolah

Selain melalui jalur formal, maka peningkatan kualitas sumber daya aparatur juga ditempuh melalui jalur pendidikan dan pelatihan (Diklat) baik struktural, fungsional, maupun teknis. Meskipun pemberian diklat semacam ini banyak dikaitkan dengan pembinaan karier, namun manfaatnya jelas sangat besar bagi pengembangan pegawai yang bersangkutan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan inilah, maka pemerintah daerah di Jawa Timur memegang komitmen yang cukup kuat untuk mengikutsertakan sebanyak-banyaknya karyawan pada diklat-diklat aparatur.

Komitmen yang kuat ini terlihat pada peningkatan jumlah peserta diklat yang sangat drastis pada saat ini dibanding pada kondisi akhir Pelita VI. Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat Adum/Sepala/Sepada meningkat sebesar 96,9 %, jumlah peserta Sepadya/ Spama meningkat sebesar 54,5 %, sementara jumlah peserta diklat Teknis Fungsional/Teknis Manajemen meningkat sebesar 65,5 %. Secara rinci jumlah dan persentase peningkatan pegawai yang telah mengikuti diklat Struktural, Teknis Fungsional, dan Teknis Manajemen ; serta jenis-jenis diklat Teknis Fungsional/Manajemen dapat disimak pada tabel berikut.

Tabel 3.2.2 Jumlah dan Persentase Peningkatan Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural, Teknis Fungsional, dan Teknis Manajemen Pada Instansi Sampel di 5 DT II di Propinsi DT I Jawa Timur

Jenis Diklat	Akhir Repelita V	Akhir Thn Ke-3 Repelita VI	Persentase Perubahan
Adum/Sepada/Sepala	162	319	96,9
Sepadya/Sepama	33	51	54,5
Teknis Fungsional/ Teknis Manajemen	742	1.228	65,5
Jumlah	937	1.598	70,4

Sumber : Data lapangan, Kuesioner, diolah

2. Aspek Ketatalaksanaan

Sebagaimana halnya pada aspek kepegawaian/SDM, aspek ketatalaksanaan pada penyelenggaraan pembangunan di Daerah Tingkat I Jawa Timur mengalami kecenderungan meningkat, yang antara lain dapat diukur dari semakin intensifnya rapat-rapat koordinasi baik Rakorbang maupun diluar Rakorbang, serta semakin sedikitnya angka keterlambatan penjadualan/pelaksanaan proyek/kegiatan dari perencanaan yang telah dilakukan semula.

Namun dalam segi pengawasan baik yang dilakukan BPKP, BPK, Itwilcab/Itwilkod, Itwilprop maupun Pengawasan Atasan Langsung (Waskat), menunjukkan penurunan. Adanya penurunan ini agaknya akan digantikan dengan memperbanyak rapat-rapat koordinasi selain Rakorbang, sehingga kelancaran pelaksanaan pembangunan tetap dapat terjaga. Meskipun demikian, upaya-upaya pengawasan hendaknya dapat ditingkatkan pada masa-masa mendatang. Ini didasari asumsi bahwa pengawasan merupakan bagian dari mekanisme ketatalaksanaan pemerintahan di daerah, yang akan mampu memberikan jaminan tercapainya efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan itu sendiri.

Tabel dibawah ini menunjukkan frekuensi minimum dan maksimum Rapat Koordinasi selain Rakorbang, jenis-jenisnya, serta frekuensi pengawasan terhadap instansi-instansi di lingkungan pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Tabel 3.2.3 Frekuensi Minimum dan Maksimum Serta Frekuensi Rata-rata Rapat Koordinasi Selain Rakorbang Yang Dilakukan Instansi Sampel di 5 DT II di Propinsi DT I Jawa Timur

Frekuensi Rapat	Akhir Repelita V	Akhir Thn Ke-3 Repelita VI	Persentase Perubahan
Minimum	0	0	0
Maksimum	3.000	3.000	0
Rata-rata	107	110	2,8

Sumber : Data lapangan, Kuesioner, diolah

Adapun frekuensi pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, BPK, Itwilprop/ Itwilkod/kab, maupun Waskat dan pengawasan lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2.4 Frekuensi Pengawasan Per Tahun Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Atau Proyek Pada Instansi Sampel di 5 DT II di Propinsi DT I Jawa Timur

Instansi Pengawas	Akhir Repelita V	Akhir Thn Ke-3 Repelita VI	Persentase Perubahan
BPKP	62	37	-40,3
BPK	22	15	-31,8
Itwilkab/Itwilkod	135	93	-31,1
Itwilprop	56	30	-46,4
Waskat	20	19	-5,0
Lainnya	62	29	-53,2

Sumber : Data Lapangan, Kuesioner, Diolah

Disamping aspek pengawasan dan rapat koordinasi, kondisi ketatalaksanaan pemerintahan di Jawa Timur ditunjukkan pula oleh pengelolaan proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan pembangunan. Dari segi pelaksanaan (mulainya pekerjaan), penyelesaian, dan turunnya anggaran, terjadinya keterlambatan semakin jarang. Hal ini mengindikasikan perencanaan dan penjadualan proyek-proyek di daerah semakin sesuai dengan perencanaan yang diprogramkan sejak semula.

Disamping itu, realisasi program-program kegiatan telah mencapai rata-rata 48 %, dimana realisasi tertinggi yang bisa dicapai sebesar 80 %. Untuk instansi-instansi tertentu yang belum bisa mencapai realisasi sebesar 50 % atau lebih, diharapkan dapat mengintensifkan mekanisme rapat-rapat koordinasi dan atau pengawasan, disamping membina kemampuan dan profesionalisme pelaksana proyek melalui diklat-diklat teknis fungsional atau manajemen. Gambaran dari aspek ketatalaksanaan yang meliputi penjadualan proyek dan realisasinya di Jawa Timur, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2.5 Keterlambatan Penjadualan Proyek Atau Kegiatan Dari Perencanaan Yang Telah Ditetapkan Pada Instansi Sampel di 5 DT II di Propinsi DT I Jawa Timur

Momen Kegiatan	Akhir Repelita VI (Bulan)	Akhir Thn Ke-3 Repelita V (bulan)	Persentase Perubahan
Pelaksanaan (Memulai Pekerjaan)	52	49	-5,7
Penyelesaian	41	31	-14,4
Turunnya Anggaran	138	120	-13,0

Sumber : Data Lapangan, Kuesioner, diolah

Dilihat dari realisasi program yang dicanangkan setiap instansi dan Daerah pada Repelita VI, nampaknya bermacam-macam. Secara umum realisasi program tersebut telah mencapai rata-rata 48% dari keseluruhan program. Namun demikian, ada juga instansi yang telah mencapai realisasi program sekitar 80%.

Tabel 3.2.6 Realisasi Minimum dan Maksimum Serta Rata-rata Realisasi Pelaksanaan Program Repelita VI Pada Instansi Sampel di 5 DT II di Propinsi DT I Jawa Timur

Realisasi Program Hingga Akhir Tahun Ke-3 REPELITA VI	Prosentase
Maksimum	80
Rata-rata	48

Sumber : Data lapangan, Kuesioner, diolah

3. Aspek Kelembagaan

Sejak awal Pelita VI, kelembagaan pemerintahan di daerah di Jawa Timur mengalami pengembangan sesuai dengan adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki percepatan pelayanan publik, baik segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagaimana yang tertera pada tabel dibawah, jumlah formasi (baik eselon III, IV maupun V) dalam struktur pemerintahan me-ngalami penambahan yang cukup tinggi, yakni masing-masing sebesar 12,8 %, 4,5 %, dan 15,5 %. Dikaitkan dengan kebijakan pemerintah untuk lebih menitik beratkan otonomi kepada Daerah Tingkat II, adanya penambahan struktur ini memang menjadi konsekuensi atau implikasi yang logis dan wajar.

Dengan titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II ini, maka akan terjadi kondisi *hemat struktur kaya fungsi* pada tingkat Propinsi Daerah Tingkat I, dan *kaya struktur kaya fungsi* pada tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II. Khususnya Daerah Tingkat II yang akan dijadikan sebagai daerah percontohan, maka diperkirakan sampai dengan akhir Pelita VI dan berlanjut kepada Repelita VII nanti, penambahan struktur dan pembentukan dinas-dinas otonom baru masih akan terus berlangsung.

Dikaitkan dengan kondisi kepegawaian/SDM aparatur seperti telah diuraikan diatas, maka penambahan struktur atau dinas-dinas otonom baru tidak harus diartikan identik dengan penambahan tenaga kerja. Kebijakan "pertumbuhan nol" (*zero growth*) dalam aspek kepegawaian tetap perlu dipertahankan, sedangkan pemenuhan pegawai bagi struktur baru atau dinas

otonom baru dapat diambilkan dari struktur lain yang mengalami perampingan organisasi, dengan tidak mengabaikan faktor kemampuan dan profesionalismenya.

Adapun secara rinci perkembangan jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural, atau dapat diartikan pula jumlah formasi atau struktur kelembagaan pemerintahan di daerah di wilayah Propinsi Jawa Timur, pada akhir Pelita V dan akhir tahun ke-3 Pelita VI dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2.7 Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Pada Instansi Sampel di 5 DT II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

Eselon	Akhir Repelite V	Akhir Thn Ke-3 Repelita VI	Persentase Perubahan
III	47	53	12,8
IV	333	348	4,5
V	651	752	15,5

Sumber : Data lapangan, Kuesioner, diolah

C. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mencakup areal seluas 3.186,10 kilo meter persegi, merupakan wilayah daratan dengan tofografi berbukit dan bergunung, yang berada pada ketinggian antara 0 - 2.910 meter diatas permukaan laut.

Secara Administratif Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas 4 (empat) Kabupaten Daerah Tingkat II yaitu Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten, Sleman dan Kabupaten Bantul, dan satu Kotamadya Daerah Tingkat IIyaitu Kotamadya Yogyakarta.

Untuk kepentingan penelitian evaluasi Midterm Repelite VI Sektor Aparatur Negara di Daerah ini. Dari semua Daerah Tingkat II yang ada di

Daerah Istimewa Yogyakarta semua dijadikan obyek penelitian. Terhadap kelima Daerah Tingkat II ini dilakukan evaluasi sektor aparatur di daerah selama 3 (tiga) tahun pertama Repelita VI. Evaluasi ini meliputi 4 (empat) aspek yaitu: Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pengawasan serta Kelembagaan.

Untuk mempermudah penelitian dari setiap Daerah Tingkat II diambil beberapa Dinas/Instansi untuk dijadikan sampel yang antara lain adalah :

1. Kodya Yogyakarta: Setwilda (Bagian Keuangan, Bagian Kepegawaian, Bagian Perekonomian, Bagian Organisasi, Bagian Hukum), Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Peternakan, Dipenda, Dinas Kebersihan dan Pertanaman.
2. Kabupaten Kulon Progo: Setwilda, Bappeda, Dinas Pertanian Dinas Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dipenda, DLLAJ.
3. Kabupaten Bantul: Setwilda, Dipenda, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Kantor Sospol, Mawil Hansip BP-7, Setwan DPRD, Itwilcab, Dinas Kesehatan.
4. Kabupaten Gunung Kidul: Setwilda, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Pendapatan Daerah Kantor Catatan Sipil, Kantor Sospol, Pembantu Bupati Wilayah Barat, Pembantu Bupati Wilayah Tengah, Pembantu Bupati Wilayah Timur.
5. Kabupaten Sleman: Setwilda, Bappeda, Dinas Kesehatan Dipenda, Dinas Pekerjaan Umum (PU) CipataKarya, Dinas Petambangan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah.

1. Aspek Kepegawaian

Dibandingkan dengan akhir Repelita V jumlah pegawai pada instansi sampel sampai dengan akhir tahun ke 3 (tiga) Repelita VI, terdapat penambahan yang besarnya mencapai 11,20 %. Kalau di lihat dari tingkat pendidikannya baik pada akhir Repelita V maupun pada tahun ke 3 (tiga) Repelita VI, sebagian besar pegawai berpendidikan SLTA yaitu 58,12 % pada akhir Repelita V dan 59,09 % pada saat ini.

Peningkatan jumlah pegawai terjadi di semua jenjang pendidikan. Prosentase peningkatan yang paling tinggi terjadi pada jumlah pegawai yang berpendidikan S_2/S_3 (bertambah 41,66 %), kemudian yang berpendidikan Sarjana/S₁ (bertambah 34,35 %).

Data lengkap mengenai perkembangan jumlah pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.3.1. berikut:

Tabel 3.3.1 Jumlah dan Prosentase Pegawai Berdasarkan Pendidikan Pada Instansi Sampel di 5 Kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pendidikan	Akhir Repelita V	Akhir Thn Ke-3 Repelita VI	Persentase Perubahan
SD atau tdk tamat SD	1119 (16,39 %)	1037 (13,76 %)	7,32
SLTP	653 (9,56 %)	690 (9,15 %)	1,07
SLTA	3969 (58,12 %)	4455 (59,09 %)	12,24
Diploma	423 (6,20 %)	518 (6,87 %)	22,45
Sarjana (S ₁)	652 (9,55 %)	876 (11,62 %)	34,35
S2 atau S ₃	12 (0,18 %)	17 (0,23 %)	41,66
Jumlah	6828	7539	11,20

Sumber : Data lapangan, Kuesioner diolah

Dilihat dari segi pengembangan pegawai terdapat adanya upaya-upaya untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai, secara umum jumlah pegawai yang telah mengikuti berbagai jenis diklat baik diklat struktural maupun diklat teknis fungsional dan teknis manajemen mengalami peningkatan sebesar 25,81 % yaitu pada akhir Repelita V 2022 orang menjadi 2544 orang pada tahun ke 3 (tiga) Repelita VI.

Kalau dilihat dari perjenis diklat, prosentasi peningkatan paling tinggi terjadi pada jenis diklat struktural Sespa/Spamen yaitu dari 1 (satu) orang pada akhir Repelite V menjadi 6 (enam) orang pada tahun ke 3 (tiga) Repelite VI atau terjadi peningkatan sampai dengan 500 %, kemudian jenis diklat struktural Spadya/Spama dari 23 orang pada akhir Repelite V menjadi 54 orang pada tahun ke 3 (tiga) Repelite VI atau terjadi peningkatan sampai dengan 134,78 %. Sedangkan peningkatan paling rendah terjadi pada jenis Diklat Struktural Adum/pada/Spala yaitu hanya 0,99 %. Peningkatan paling tinggi secara absolut terjadi pada jenis diklat teknis fungsional dan teknis manajemen yaitu dari 1597 pada akhir Repelite V menjadi 2080 pada tahun ke 3 (tiga) Repelite VI. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada tabel 3.3.2 berikut :

Tabel 3.3.3 Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural, Teknis Fungsional, dan Teknis Manajemen Pada Instansi Sampel di 5 Kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Jenis Diklat	Akhir Repelite V	Akhir Thn Ke-3 Repelita VI	Persentase Perubahan
Adum/Sepada/Sepala	401	404	0,99
Sepadya/Sepama	23	54	134,78
Sespa/Spamen	1	6	500,00
Teknis Fungsional/ Teknis Manajemen	1597	2080	30,24
Jumlah	2022	2544	25,81

Sumber : Data lapangan, Kuesioner diolah

Berbagai jenis diklat teknis fungsional dan manajemen yang biasa diberikan diberbagai instansi sampel dapat dilihat pada Lampiran.

2. Aspek Ketatalaksanaan

Dalam aspek ini, sebagai sempel evaluasi diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut: Pelaksanaan Rapat Koordinasi, Ketepatan Penjadwalan

Proyek, Pengawasan oleh Instansi Fungsional, Pengawasan Melekat, dan Realisasi Pelaksanaan Program.

Rapat koordinasi yang sudah baku dan diundangkan dengan peraturan perundang-undangan adalah Rakorbang Tingkat II di Kabupaten dan Rakorbang Tingkat I di Tingkat Propinsi. Tetapi selain itu ada juga rapat-rapat koordinasi lain yang pelaksanaannya didasarkan atas inisiatif dan kepentingan instansi masing-masing.

Berdasarkan hasil masukan dari para responden, ternyata hampir semua instansi sampel melaksanakan rapat koordinasi selain Rakorbang hanya frekwensinya yang berbeda. Pada akhir Repelite V ada instansi yang sama sekali tidak melaksanakan Rapat Koordinasi selain Rakorbang, tetapi dilain pihak terdapat instansi yang melaksanakan rapat sampai dengan 325 kali pertahun. Sedangkan pada tahun ke 3 (tiga) Repelite VI frekwensi terendah 2 (dua) kali pertahun dan yang tertinggi 341 kali pertahun. Secara umum jumlah rapat koordinasi mengalami kenaikan 43,79 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.3.4 Frekuensi Minimum dan Maksimum Serta Frekuensi Rata-rata Rapat Koordinasi Selain Rakorbang Yang Dilakukan Instansi Sampel di 5 Kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Frekuensi Rapat	Akhir Repelite V	Akhir Thn Ke-3 Repelite VI	Persentase Perubahan
Minimum	0	2	
Maksimum	325	341	4,92
Rata-rata	43	61,83	43,79

Sumber : Data lapangan, Kuesioner diolah

Jenis-jenis rapat koordinasi selain Rakorbang yang dilaksanakan di instansi-instansi sampel di Propinsi DI Yogyakarta dapat dilihat pada Lampiran.

Ketepatan Penjadwalan Proyek, baik penjadwalan mulai pekerjaan, penyelesaian pekerjaan maupun turunnya anggaran merupakan salah satu indikator berhasil atau berkualitas tidaknya suatu pelaksanaan proyek. Berdasarkan masukan dari para responden ternyata terdapat instansi yang sama sekali tidak pernah mengalami keterlambatan penjadwalan baik dalam memulai, menyelesaikan maupun dalam menerima anggaran proyek. Namun demikian sebagian instansi sampel tetap mengalami keterlambatan.

Dalam memulai pelaksanaan pekerjaan, pada akhir Repelita V keterlambatan maksimum yang dialami oleh beberapa instansi sampel lamanya 8 (delapan) bulan, sedangkan pada tahun ke 3 (tiga) Repelita VI selama 4 (empat) bulan. Kemudian dalam penyelesaian proyek, keterlambatan maksimum pada akhir Repelita V adalah selama 3 (tiga) bulan dan pada tahun ke 3 (tiga) Repelita VI selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan keterlambatan maksimum dalam menerima anggaran pada akhir Repelita V selama 6 bulan dan pada tahun ke 3 Repelita VI selama 4 bulan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 3.3.5 Keterlambatan Minimum dan Maksimum Serta Rata-rata Keterlambatan Penjadualan Proyek Atau Kegiatan Dari Perencanaan Yang Telah Ditetapkan Pada Instansi Sampel di 5 Kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Momen Kegiatan	Akhir Repelita VI (Bulan)	Akhir Thn Ke-3 Repelita V (bulan)	Persentase Perubahan
Pelaksanaan (Memulai Pekerjaan)	0 - 8 0,70	0 - 4 0,47	- 32,85
Penyelesaian	0 - 3 0,3	0 - 3 0,18	- 40
Turunnya Anggaran	0 - 6 0,77	0 - 4 0,72	- 6,49

Sumber : Data Lapangan, Kuesioner diolah

Frekwensi dan kualitas pengawasan juga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap efektifitas dan efisiensi pelaksanaan proyek. Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan terdapat 5 (lima) pengawas fungsional yang biasa melakukan pengawasan terhadap instansi-instansi sampel yang ada di Daerah yaitu : BPK, BPKP, Itwilprop, Itwilcab/Itwilkod dan Irjen. Selain itu ada pengawasan lain yang dilaksanakan oleh instansi masing-masing yaitu Waskat.

Frekwensi maksimum pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, pada akhir Repelita V adalah 5 (lima) kali dan pada tahun ke 3 (tiga) Repelita VI 5 kali, BPK 2 (dua) kali pada Akhir Repelita V dan 2 (dua) kali pada tahun ke 3 (tiga) Repelita VI, Itwilcab 12 kali pada kakhir Repelita V dan 12 kali pada tahun ke 3 (tiga) Repelita VI, Itwilprop 10 kali pada kakhir Repelita V dan 9 kali pada tahun ke 3 (tiga) Repelita VI, Waskat 60 kali pada kakhir Repelita V dan 12 kali pada tahun ke 3 (tiga) Repelita VI. Sedangkan pengawasan lainnya 10 kali pada kakhir Repelita V dan 3 kali pada tahun ke 3 (tiga) Repelita VI. Meskipun demikian ternyata masih ada instansi-instansi yang sama sekali tidak mendapatkan pengawasan baik dari instansi fungsional pengawas maupun Waskat. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel berikut :

Tabel 3.3.6 Frekuensi Pengawasan Minimum dan Maksimum Serta Rata-rata Per Tahun Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Atau Proyek Pada Instansi Sampel di 5 Kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Instansi Pengawas	Akhir Repelita V	Akhir Thn Ke-3 Repelita VI	Persentase Perubahan
BPKP	0 - 5 0,7	0 - 5 0,7	0
BPK	0 - 2 0,3	0 - 2 0,3	0
Itwilcab/Itwilkod	0 - 12 2,6	0 - 12 2,3	- 30
Itwilprop	0 - 10 1,9	0 - 9 1,6	- 30
Waskat	0 - 60 1,9	0 - 12 1,0	- 90
Lainnya	0 - 10 0,3	0 - 5 0,3	0

Sumber : Data Lapangan, Kuesioner Diolah

Untuk mengetahui keberhasilan program, dapat dilihat dilihat dari realisasi fisik dari program tersebut dibandingkan dengan rencana yang telah dicanangkan, yaitu yang telah ditetapkan dalam Sasaran Repelita (Sarlitra) masing-masing instansi. Kalau dilihat dari data dilapangan realisasi program Repelita VI baru terealisir antara 5-95 % seperti dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 3.3.7 Realisasi Minimum dan Maksimum Serta Rata-rata Realisasi Pelaksanaan Program Repelita VI Pada Instansi Sampel di 5 Kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Realisasi Program Hingga Akhir Tahun Ke-3 REPELITA VI	Prosentase
Minimum	5
Maksimum	95
Rata-rata	54,3

Sumber : Data lapangan, Kuesioner diolah

3. Aspek Kelembagaan

Dibandingkan dengan akhir Repelita V, pada tahun ke 3 (tiga) Repelita VI ini terjadi adanya perkembangan keorganisasian, hal ini bisa dilihat dari adanya peningkatan jumlah eselon beberapa instansi-instansi sampel. Selain itu adanya penambahan eselon itu juga disebabkan oleh adanya persiapan untuk menghadapi otonomi daerah yaitu dengan pembentukan dinas-dinas baru. Data lengkapnya bisa dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 3.3.8 Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Pada Instansi Sampel di 5 Kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Eselon	Akhir Repelita V	Akhir Thn Ke-3 Repelita VI	Percentase Perubahan
III	37	44	18,92
IV	192	226	17,71
V	524	648	23,66

Sumber : Data lapangan, Kuesioner diolah

Pada akhir Repelita V jumlah eselon III ada 37 (tiga puluh tujuh), dan pada tahun ke 3 Repelita VI ada 44, ini berarti ada peningkatan sebanyak 18,92 %, eselon IV pada akhir Repelita V berjumlah 192 dan pada tahun ke 3 Repelita VI berjumlah 226 peningkatan sebanyak 17,71 %, eselon V pada

akhir Repelita V berjumlah 524 dan pada tahun ke 3 Repelita VI berjumlah 648 peningkatan sebanyak 23,66 %.

D. Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Utara

Wilayah propinsi Sumatra Utara mencakup areal seluas 71.680 kilometer persegi. Propinsi ini merupakan wilayah daratan dengan topografi beragam, yaitu dataran rendah, bergelombang, berbukit, pegunungan, serta wilayah kepulauan, yang berada pada ketinggian antara 0 - 2.150 meter di atas permukaan laut.

Secara Administratif, daerah tingkat I Sumatra Utara terdiri dari 11 Kabupaten Daerah Tingkat II, yaitu Kabupaten Nias, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Labuhan batu, Asahan, Simalungun, Dairi, Karo, Deli Serdang, dan Langkat serta ada 6 Kotamadya Daerah Tingkat II, yaitu Medan sebagai Ibu Kota Propinsi, Tanjung Balai, Sibolga, Pematang Siantar, Tebing Tinggi dan Binjai. dalam wilayah Daerah Tingkat I Sumatra Utara terdapat 3 Kota Administratif yaitu Kota Administratif Kisaran, Padang Sidempuan, dan Rantau Prapat, 243 Kecamatan serta 5.292 Desa dan Kelurahan.

Untuk Kepentingan Penelitian Evaluasi Mid-term Repelita VI Sektor Aparatur Negara di Daerah Tingkat I Sumatra Utara ini diambil 5 (lima) Daerah Tingkat II sebagai sampel, yaitu Kotamadya DT II Medan, Kabupaten DT II Deli Serdang, Kabupaten DT II Simalungun, Kabupaten DT II Karo, dan Kabupaten DT II Langkat. Terhadap kelima Daerah Tingkat II inilah dilakukan Evaluasi Sektor aparatur di Daerah selama 3 tahun pertama Repelita VI. Evaluasi meliputi aspek kepegawaianm, kelembagaan, dan ketatalaksanaan.

Sementara itu, instansi yang dijadikan sampel dari setiap Kabupaten DT II adalah sebagai berikut:

1. **Kodya DT.II Medan:** Sekwilda, BAPPEDA, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas PU, Dinas P dan K, Dinas Pariwisata, Dinas Peternakan, Dinas Pasar, Dinas Perindustrian, dan Dinas Pariwisata.
2. **Kabupaten DT.II Deli Serdang:** Sekwilda, BAPPEDA, Dinas Koperasi & PPK, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas PUBM, Dinas PUCK, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pertambangan, Dinas P dan K, DLLAJ, Dinas Kesehatan, Dinas PTP, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perkebunan, Dinas Transmigrasi & PPH, Dinas PU Pengairan, Dinas PMD.
3. **Kabupaten DT.II Langkat:** Sekwilda, BAPPEDA, Dinas Perikanan, Dinas Kebersihan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan, Dinas Pasar, dan Dinas Pertanian.
4. **Kabupaten DT.II Karo:** Sekwilda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas P dan K, Dinas PU, Dinas Perkebunan, Dinas Pariwisata, Dinas Pasar, dan Dinas Peternakan.
5. **Kabupaten DT.II Simalungun:** Sekwilda, BAPPEDA, Dinas kesehatan, Dinas Perkebunan, Dinas PTP, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas P dan K, Dinas Perikanan, Dinas Kebersihan.

1. Aspek Kepegawaian

Aspek kepegawaian merupakan aspek pertama yang diperlukan dalam evaluasi Mid-term repelita VI Sektor Aparatur Negara di Daerah. Secara umum jumlah pegawai pada instansi sampel mengalami peningkatan sebesar 248.71 %.

Berdasarkan tingkat pendidikannya, sebagian besar pegawai berpendidikan maksimal SLTA pada akhir Pelita V berjumlah 9475 orang dan pada Tahun ke-3 Repelita VI berjumlah 46511 orang dengan prosentase perubahan sebesar 390.8 %. Secara absolut pegawai berdasarkan semua jenjang pendidikan kecuali S2 dan S3 mengalami peningkatan. Prosentase peningkatan yang paling tinggi terjadi pada jumlah pegawai yang berpendidikan SD atau tidak tamat SD (bertambah 24.24 %), kemudian yang berpendidikan sarjana/S-1 (bertambah 17.22 %). Sedangkan jumlah pegawai

yang berpendidikan SLTA, dan sarjana (S-1), mengalami peningkatan. Data lengkap mengenai perkembangan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.4.1 berikut:

Tabel 3.4.1 Jumlah dan Prosentase Pegawai Berdasarkan Pendidikan Pada Instansi Sampel di 5 Kabupaten di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Utara

Pendidikan	Akhir Repelita V	Akhir Thn Ke-3 Repelita VI	Persentase Perubahan
SD atau tdk tamat SD	2413	2998	24.24
SLTP	1278	1301	1.79
SLTA	9475	46511	390.89
Diploma	607	696	14.66
Sarjana (S1)	1481	1736	17.22
S2 atau S3	20	20	0
J u m l a h	15274	53262	248.71

Sumber : Data lapangan, Kuesioner, diolah

Jumlah pegawai yang telah mengikuti berbagai jenis Diklat baik Struktural maupun Diklat Teknis Fungsional dan Teknis Manajemen, secara umum mengalami peningkatan sebesar 83.01 % yaitu dari 736 orang pada akhir Repelita V menjadi 1347 orang pada tahun ke-3 Repelita VI sekarang ini.

Peningkatan paling tinggi secara absolut terjadi pada jenis Diklat Teknis Fungsional dan Teknis Manajemen yaitu dari 423 orang pada akhir Pelita V menjadi 635 orang pada tahun ke-3 Repelita VI sekarang ini. Berbagai jenis Diklat Teknis Fungsional dan Teknis Manajemen yang biasa diberikan di berbagai instansi dapat dilihat pada Lampiran.

Jika dilihat secara relatif prosentase perubahan paling tinggi terjadi pada jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Adum/Sepada/Sepala, yaitu meningkat 121.54 % selama tiga tahun tersebut. Sementara itu peningkatan jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Sespa/Sepamen secara relatif merupakan yang paling rendah yaitu 0.14 %. Gambaran lengkap mengenai jumlah

pegawai yang telah mengikuti Diklat pada Pelita V dari tahun ke-3 Pelita VI dapat dilihat pada Tabel 3.4.2 berikut ini:

Tabel 3.4.2 Jumlah dan Rata-rata Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural, Teknis Fungsional, dan Teknis Manajemen Pada Instansi Sampel di 5 Kabupaten di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Utara

Jenis Diklat	Akhir Repelita V	Akhir Thn Ke-3 Repelita VI	Persentase Perubahan
Adum/Sepada/Sepala	246	545	121.54
Sepadaya/Sepama	65	143	1.20
Sespa/Sepamen	12	16	33.33
Teknis Fungsional/ Teknis Manajemen	423	653	54.73
Jumlah	736	1347	83.01

Sumber : Data lapangan, Kuesioner, diolah

Meskipun jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari rata-ratanya masih rendah. Rata-rata jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Sespa/Sepama pada akhir Repelita V berjumlah 12 orang dan akhir Tahun ke-3 Repelita VI berjumlah 16 orang ini menunjukkan bahwa betapa sulitnya untuk mengikuti Diklat tersebut pada Propinsi DT I Sumatra Utara khususnya.

Jumlah pegawai yang mengikuti berbagai jenis Diklat teknis fungsional dan teknis manajemen nampak terjadi peningkatan yang tinggi yaitu 54,37%. Berbagai jenis diklat yang diikuti oleh pegawai tersebut pada setiap instansi di DT.I Sumatera Utara dapat dilihat pada Lampiran.

2. Aspek Ketatalaksanaan

Aspek kedua yang dievaluasi adalah aspek ketatalaksanaan. Meskipun banyak hal yang terkait dengan aspek ini, namun hanya sebagai sampel evaluasi diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut: Pelaksanaan rapat koordinasi, ketepatan pelaksanaan proyek, pengawasan yang dilakukan oleh

instansi fungsional dan pengawasan melekat, serta melihat realisasi pelaksanaan program dari rencana 5 tahun yang dicanangkan selama Repelita VI.

Sebagai sarana koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program di Daerah, rapat koordinasi merupakan alat yang biasa dilaksanakan secara umum. Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan pada saat perencanaan, pelaksanaan, maupun pada saat evaluasi hasil kegiatan. Rapat koordinasi yang sudah baku dan diundangkan dengan peraturan perundang-undangan adalah RAKORBANG Tingkat II di Tingkat kabupaten, dan RAKORBANG Tingkat I di Tingkat Propinsi. sedangkan, rapat-rapat lain dilaksanakan atas inisiatif instansinya masing-masing. Frekuensi Maksimum pada Akhir Repelita V terdapat 75 kali rapat dan pada Akhir Tahun ke-3 repelita VI ada 85 kali rapat dengan prosentase perubahannya sebesar 13.33 %.

Tabel 3.4.3 Frekuensi Minimum dan Maksimum Serta frekuensi Rata-rata rapat Koordinasi Selain Rakorbang yang Dilakukan Instansi Sampel di 5 Kabupaten di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Utara

Frekuensi Rapat	Akhir Repelita V	Akhir Thn Ke-3 Repelita VI	Persentase Perubahan
Minimum	0	0	0
Maksimum	75	85	13.33
Rata-rata	10	11	10

Sumber : Data lapangan, Kuesioner, diolah

Keberhasilan dan kualitas pelaksanaan proyek-proyek dapat dilihat dari salah satu indikatornya yaitu ketepatan penjadualan proyek baik dalam memulai pekerjaan, penyelesaian pekerjaan, maupun dalam turunnya anggaran. Berdasarkan informasi dari responden, terdapat instansi yang tidak pernah mengalami keterlambatan baik dalam memulai, menyelesaikan, maupun dalam menerima anggaran proyek. Namun demikian sebagian besar instansi tetap mengalami keterlambatan.

Dalam memulai pekerjaan, keterlambatan maksimum yang dialami oleh beberapa instansi selama 48 bulan. Kemudian dalam penyelesaian proyek, keterlambatan maksimum selama satu tahun. sedangkan dalam menerima anggaran, keterlambatan maksimum yang dialami instansi atau dinas-dinas daerah adalah selama 9 bulan. Data lengkap mengenai hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.4.4 berikut ini:

Tabel 3.4.4 Keterlambatan Minimum dan Maksimum Serta Rata-rata Keterlambatan Penjadualan Proyek Atau Kegiatan Dari Perencanaan Yang Telah Ditetapkan Pada Instansi Sampel di 5 Kabupaten di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Utara

Momen Kegiatan	Akhir Repelita VI (Bulan)	Akhir Thn Ke-3 Repelita V (bulan)	Persentase Perubahan
Pelaksanaan (Memulai Pekerjaan)	0 s.d 48 (1.3)	0 s.d 48 (1.3)	0
Penyelesaian	0 s.d 3 (0.4)	0 s.d 3 (0.4)	0
Turunnya Anggaran	0 s.d 9 (0.6)	0 s.d 9 (0.7)	16.6

Sumber : Data Lapangan, Kuesioner, diolah

Selain itu, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan proyek dipengaruhi oleh kualitas dan frekuensi pengawasan. Berdasarkan data yang diperoleh, secara umum terdapat 5 pengawas fungsional yang biasa melakukan pengawasan kepada instansi-instansi yang ada di daerah yaitu BPK, BPKP, Itwilprop, Itwilcab/Kod, Itjen. Pengawasan lain yaitu yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan (Waskat).

Pengawasan yang dilakukan oleh BPKP terhadap suatu instansi dalam satu tahun paling banyak 5 kali pada akhir Repelita V dan 5 kali pada akhir tahun ke-3 Repelita VI. Pengawasan yang dilakukan BPK terhadap suatu instansi dalam satu tahun paling banyak 10 kali pada akhir Repelita V dan 5 kali pada akhir tahun ke-3 Repelita VI. Pengawasan yang dilakukan oleh Itwilcab/Itwilcab paling banyak 10 kali per tahun pada akhir repelita V dan

pada akhir tahun ke-3 Repelita VI sebanyak 6 kali. Lalu pengawasan Itwilprop sebanyak 10 kali per tahun pada akhir Repelita V dan pada akhir tahun ke-3 Repelita VI sebanyak 5 kali. Sementara itu pengawasan melekat juga sudah merata dilaksanakan oleh semua instansi.

Meskipun demikian, terdapat pula instansi-instansi yang tidak mendapatkan pengawasan oleh salah satu dari instansi fungsional dan pengawasan melekat. Sebagai gambaran mengenai frekuensi pengawasan yang dilakukan setiap instansi fungsional dan waskat terhadap instansi DT II, dapat dilihat pada Tabel 3.4.5 berikut:

Tabel 3.4.5 Frekuensi Pengawasan Minimum dan Maksimum Serta Rata-rata Per Tahun Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Atau Proyek Pada Instansi Sampel di 5 Kabupaten di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Utara

Instansi Pengawas	Akhir Repelita V	Akhir Thn Ke-3 Repelita VI	Persentase Perubahan
BPKP	0 s.d 5 1.3	0 s.d 5 1.1	-15.38
BPK	0 s.d 10 0.3	0 s.d 5 0.3	0
Itwilcab/Itwilkod	0 s.d 10 2	0 s.d 6 1.6	-20
Itwilprop	0 s.d 10 1.9	0 s.d 5 1.4	-26.3
Waskat	0 s.d 26 0.5	0 s.d 26 0.6	20
Lainnya	0 s.d 4 0.1	0 s.d 3 80	700

Sumber : Data Lapangan, Kuesioner, Diolah

Pada akhirnya, tingkat keberhasilan program salah satunya dapat dilihat dari realisasi fisik dari program tersebut sesuai dengan rencana yang telah dicanangkan. Rencana setiap instansi biasanya tertera dengan jelas dalam Sasaran Repelita (SARLITA) yang telah dibuatnya. Dengan membandingkan sasaran tersebut dengan realisasi program yang telah

terlaksana, rata-rata program Repelita VI baru terealisasi 0 % sampai dengan 98 %, seperti terlihat pada Tabel 3.4.6 berikut:

Tabel 3.4.6 Realisasi Maksimum dan Rata-rata Realisasi Pelaksanaan Program Repelita VI Pada Instansi Sampel di 5 Kabupaten di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Utara

Realisasi Program Hingga Akhir Tahun Ke-3 REPELITA VI	Prosentase
Maksimum	98
Rata-rata	48.6

Sumber : Data lapangan, Kuesioner, diolah

Sementara itu, beberapa program Pendayagunaan Aparatur baik dalam Sektor Aparatur maupun di Luar Sektor Aparatur (namun terkait dengan PAN), dapat dilihat pada Lampiran.

3. Aspek Kelembagaan

Salah satu indikator kondisi keorganisasian dapat dilihat dari eselonisasi jabatan yang ada dalam instansi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pada instansi-instansi Daerah Tingkat II di Propinsi DT I Sumatra Utara, namapak terjadi perubahan eselon. Eselon III yang pada akhir Repelita V berjumlah 32 orang, kini pada tahun ke-3 Repelita VI menjadi 131 orang. Ini sejalan dengan adanya persiapan otonomi daerah, dengan pembentukan dinas-dinas baru. Data mengenai jumlah dan rata-rata pegawai yang menduduki eselon dapat dilihat pada Tabel 3.4.7 berikut:

Tabel 3.4.7 Jumlah dan Rata-rata Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Pada Instansi Sampel di 5 Kabupaten di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Utara

Eselon	Akhir Repelita V	Akhir Thn Ke-3 Repelita VI	Persentase Perubahan
III	81	131	61.73
IV	520	558	7.31
V	1206	1496	24.04

Sumber : Data lapangan, Kuesioner, diolah

Eselon IV dan Eselon V pun mengalami peningkatan. Eselon V yang pada akhir Pelita IV berjumlah 502 orang, meningkat menjadi 558 orang pada thun ke-3 Repelita VI. Sedangkan eselon V yang pada akhir Pelita V hanya berjumlah 1206 orang, meningkat menjadi 1446 orang pada tahun ke-3 Repelita VI.

E. Propinsi Daerah Tingkat I Lampung

Propinsi Daerah Tingkat I Lampung merupakan pintu gerbang pulau Sumatera dari arah Pulau Jawa, khususnya melalui penyeberangan laut. Wilayah propinsi Lampung mencakup areal seluas 35.377 kilometer persegi. Secara Administratif, Propinsi Daerah Tingkat I Lampung terdiri dari 4 Kabupaten Daerah Tingkat II, yaitu Kabupaten DT.II Lampung Selatan, Kabupaten DT.II Lampung Tengah, Kabupaten DT.II Lampung Barat, dan Kabupaten DT.II Lampung Utara; serta 1 kotamadya yaitu Kotamadya Bandar Lampung sebagai ibukota propinsi.

Untuk Kepentingan Penelitian ini diambil 3 (tiga) Kabupaten Daerah Tingkat II sebagai sampel, yaitu Kotamadya DT II Bandar Lampung, Kabupaten DT II Lampung Selatan, dan Kabupaten DT II Lampung Tengah. Terhadap kelima Daerah Tingkat II inilah dilakukan Evaluasi Sektor aparatur di Daerah selama 3 tahun pertama Repelita VI. Evaluasi meliputi aspek kepegawaiannya, kelembagaan, dan ketatalaksanaan.

Sementara itu, instansi yang dijadikan sampel dari setiap Kabupaten DT II adalah sebagai berikut:

1. Kotamadya DT.II Bandar Lampung; Bappeda, Itwilkod, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perumahan, Dinas Tata Kota, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pertamanan, Dinas Tata bangunan, dan beberapa bagian di lingkungan Setwilda Tingkat II.
2. Kabupaten DT.II Lampung Selatan; Dinas Perkebunan, Dinas P&K, Dinas Peternakan, Dinas Pariwisata, Dinas Pasar, DLLAJ, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas PU, Dinas Perikanan, Dipenda, BAPPEDA, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kehutanan, dan beberapa bagian di lingkungan Setwilda Tingkat II.
3. Kabupaten DT.II Lampung Tengah (Daerah percontohan otonomi); Dinas Peternakan, Dinas Sosial, Dinas Transmigrasi dan PPH, DIPENDA, Dinas P&K, Dinas PU Ciptakarya, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Dinas Pasar, Dinas PU Pengairan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perdagangan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertambangan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas PU Binamarga, Dinas Koperasi, dan beberapa bagian di lingkungan Setwilda Tingkat II.
4. Dinas-dinas daerah Tingkat I; Dipenda, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata, Dinas P dan K, Dinas Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum.

1. Aspek Kepegawaian

Secara umum, dari akhir Pelita V hingga tahun ke-3 Repelita VI, jumlah pegawai menurun 16,0%. Dilihat dari pendidikannya, pegawai Daerah Tingkat II yang ada di Propinsi DT.I Lampung paling banyak berpendidikan SLTA. Dari akhir pelita V ke tahun ke-3 Repelita VI terjadi penurunan jumlah pegawai terutama yang berpendidikan SLTA (turun 25%) dan

pegawai yang berpendidikan SLTP (turun 30%). Sementara itu jumlah pegawai yang berpendidikan diploma, sarjana (S-1) dan S-2 serta S-3 mengalami peningkatan. Pegawai yang berpendidikan diploma meningkat 14%, S-1 meningkat 37%, dan S-2 plus S-3 meningkat 8%. Data lengkap mengenai jumlah pegawai dan prosentase perubahannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5.1 Jumlah dan Prosentase Pegawai Berdasarkan Pendidikan Pada Instansi Sampel di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung

Pendidikan	Akhir Repelite V	Akhir Thn Ke-3 Repelita VI	Persentase Perubahan
SD atau tdk tamat SD	1.910	2.242	17
SLTP	2.666	1.861	- 30
SLTA	35.896	26.889	- 25
Diploma	1.844	2.108	14
Sarjana (S1)	4.358	2.108	37
S2 atau S3	25	27	8
Jumlah	46.699	39.088	- 16

Sumber : Data lapangan, Kuesioner, diolah

Upaya untuk meningkatkan kemampuan pegawai selama 3 tahun Repelite VI telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, namun jumlahnya masih sangat sedikit. Secara umum jumlah pegawai yang mengikuti diklat Struktural mengalami peningkatan sebesar 10%. Peningkatan yang paling tinggi adalah jumlah pegawai yang diikutsertakan dalam diklat Sepama/Sepamen, yaitu sebanyak 14 orang pada akhir Pelita V menjadi 37 orang pada akhir tahun ke-3 Repelite VI, atau meningkat 164%. Sementara itu pengikutsertaan pegawai dalam diklat Sepama/Sepadya mengalami penurunan 16%. Data lengkap mengenai jumlah pegawai yang mengikuti diklat struktural tersebut dapat diikuti pada Tabel berikut:

Tabel 3.5.2 Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural Pada Instansi Sampel di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung

Jenis Diklat	Akhir Repelita V	Akhir Thn Ke-3 Repelita VI	Persentase Perubahan
Adum/Sepada/Sepala	221	267	20
Sepadya/Sepama	171	143	- 16
Sespa/Sepamen	14	37	164
Jumlah	406	447	10

Sumber : Data lapangan, Kuesioner, diolah

Disamping pengikutsertan pegawai pada berbagai diklat struktural, dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Aparatur Daerah, juga mengirimkan pegawai pada berbagai diklat teknis fungsional dan teknis manajemen. Secara garis besar peningkatan jumlah pegawai yang diikutsertakan pada berbagai diklat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5.3 Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan Manajemen, Serta Lainnya di Instansi sampel Yang Ada di Propinsi DT.I Lampung

Jenis Diklat	Akhir Repelita V	Akhir Thn Ke-3 Repelita VI	Persentase Perubahan
Kursus	1.835	2.041	11,2
Penataran	17	7	- 5,9
Peltihan	7	82	1.071,4
Bimbingan Teknis	1	1	0
Penyuluhan	68	42	- 38,2
Jumlah	1.928	2.173	12,7

Sumber : Data lapangan, Kuesioner, diolah

2. Aspek Ketatalaksanaan

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan di Daerah dilakukan berbagai rapat koordinasi. Dilihat dari perubahan

frekuensinya, rapat koordinasi selain Rakorbang dalam bentuk Rapat Dinas/Koordinasi Bulanan mengalami penurunan sebesar 27%. Sementara itu rapat triwulanan dan rapat insidental mengalami peningkatan, miskipun dalam jumlah yang sedikit. Data lengkap mengenai frekuensi rapat koordinasi selain Rakorbang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5.4 Frekuensi Rapat Koordinasi Selain Rakorbang Yang Dilakukan Instansi sampel Yang Ada di Propinsi DT.I Lampung

Jenis Rapat	Akhir Repelita V	Akhir Thn Ke-3 Repelita VI	Persentase Perubahan
Rapat Bulanan	848	619	-27
Rapat Triwulanan	168	209	24
Rapat Insidental	926	1.010	9
Rata-rata	1.942	1.838	5

Sumber : Data lapangan, Kuesioner, diolah

Indikator ketatalaksanaan lainnya adalah, pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan program baik yang bersifat proyek maupun yang bersifat rutin. Ada 4 (empat) pengawasan yang diperhatikan dalam penelitian ini, 2 (dua) pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh BPKP dan pengawasan oleh BPK, serta dua pengawasan intern dari lingkungan Depdagri sendir, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Itwilcab/Itwilkad dan pengawasan oleh Itwilprop. Secara umum frekuensi pengawasan yang dilakukan oleh semua instansi mengalami penurunan, seperti terlihat pada Tabel 3.5.5 berikut ini:

Tabel 3.5.5 Jumlah Pengawasan Per Tahun Terhadap Seluruh Pelaksanaan Kegiatan Atau Proyek Pada Instansi Sampel di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung

Instansi Pengawas	Akhir Repelite V	Akhir Thn Ke-3 Repelita VI	Persentase Perubahan
BPKP	235	216	- 8,0
BPK	166	109	- 34,3
Itwilcab/Itwilkod	1.372	161	- 8,8
Itwilprop	942	608	- 35,4
Jumlah	2.715	1.094	- 59,7

Sumber : Data Lapangan, Kuesioner, Diolah

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari daerah, penurunan frekuensi pengawasan sebesar 59,7% disebabkan akhir-akhir ini pengawasan hanya dilakukan oleh Instansi Pusat, dengan demikian Daerah menggunakan hasil pemeriksaan atau pengawasan yang telah dilakukan oleh Instansi Pusat tersebut. Dilihat dari aspek efisiensinya, hal ini baik, tetapi cross-check dari Pemerintah Daerah tidak dilakukan langsung.

3. Aspek Kelembagaan

Prosentase pegawai yang menduduki jabatan struktural tidak terlalu banyak. Hal ini terkait dengan jumlah jabatan struktural yang ada pada saat ini yang terbatas. Dilihat dari pertambahannya, pejabat yang meningkat paling tinggi adalah esselon II sebesar 60%, sedangkan peningkatan yang paling rendah adalah esselon V yaitu 24%, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5.6 Perkembangan Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Pada Instansi Sampel di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung

Eselon	Akhir Repelita V	Akhir Thn Ke-3 Repelita VI	Persentase Perubahan
II	5	8	60
III	79	103	30
IV	456	569	24
V	1.184	1.459	23
Jumlah	1.724	2.139	24

Sumber : Data lapangan, Kuesioner, diolah

Memperhatikan data-data pada tabel 3.5.7 di atas, menunjukkan bahwa struktur yang ada cenderung berbentuk piramida, dan hal ini yang diharapkan oleh pemerintah. Meskipun peningkatan tertinggi terjadi pada eselon II, namun secara absolut jumlahnya sedikit, hal ini rasional karena jumlah jabatan tersebut sedikit pula. Sebaliknya meskipun peningkatan eselon lainnya rendah, namun secara absolut jumlahnya banyak, karena memang jumlah jabatan untuk eselon-eselon tersebut relatif banyak juga.

F. Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat

Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat mencakup areal seluas 20.153 kilometer persegi. Propinsi ini merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya.

Secara administratif, Propinsi daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat terdiri atas 6 (enam) Kabupaten Daerah Tingkat II, yaitu Kabupaten DT.II Lombok Barat, Kabupaten DT.II Lombok Tengah, Kabupaten DT.II Lombok Timur, Kabupaten DT.II Sumbawa Besar, Kabupaten DT.II Dompu, dan Kabupaten DT.II Bima, serta 1 Kotamadya DT.II yaitu Kotamadya Mataram, sebagai ibukota propinsi.

Untuk kepentingan penelitian evaluasi midterm Repelita VI sektor aparatur negara di Daerah ini, dari propinsi Nusa Tenggara Barat diambil 5 (lima) Daerah Tingkat II sebagai sampel, yaitu Kotamadya DT.II Mataram, Kabupaten DT.II Lombok Barat, Kabupaten DT.II Lombok Tengah, kabupaten DT.II Lombok Timur, Kabupaten DT.II Sumbawa Besar. Terhadap kelima Kabupaten DT.II inilah dilakukan evaluasi sektor aparatur di daerah selama 3 tahun pertama Repelita VI. Evaluasi meliputi aspek kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan, serta kelembagaan.

Sementara itu, instansi yang dijadikan sampel dari setiap Kabupaten DT.II adalah sebagai berikut:

1. Kotamadya DT.II Mataram: Sekwilda, BAPPEDA, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Peternakan;
2. Kabupaten DT.II Lombok Tengah: Sekwilda, BAPPEDA, Dinas Koperasi & Pembinaan Pengusaha Kecil, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Dinas PU Pengairan, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pertambangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DLLAJ, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perkebunan, Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, dan Dinas Pembangunan Masyarakat Desa.
3. Kabupaten DT.II Lombok Barat: Sekwilda, BAPPEDA, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pariwisata, dan Cabang Dinas Kehutanan.
4. Kabupaten DT.II Sumbawa Besar: Sekwilda, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum.
5. Kabupaten DT.II Bima: Sekwilda, BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dan Dinas Perikanan.

1. Aspek Kepegawaian

Aspek kepegawaian merupakan aspek pertama yang diperhatikan dalam evaluasi midterm Repelita VI Sektor Aparatur Negara di Daerah. Secara umum jumlah pegawai pada instansi sampel mengalami peningkatan sebesar 32,5%.

Berdasarkan tingkat pendidikannya, sebagian besar pegawai berpendidikan maksimal SLTA baik pada Pelita V maupun pada tahun ke-3 Repelita VI, yaitu 62,9% pada akhir Repelita V, dan 57,6% pada saat ini. Secara absolut pegawai berdasarkan semua jenjang pendidikan kecuali S2 dan S3 mengalami peningkatan. Persentase peningkatan yang paling tinggi terjadi pada jumlah pegawai yang berpendidikan SLTP (bertambah 98,2%), kemudian yang berpendidikan sarjana/S1 (bertambah 59,8%). Sedangkan jumlah pegawai yang berpendidikan SLTA, dan Diploma, meskipun secara absolut mengalami peningkatan, namun secara relatif mengalami penurunan. Data lengkap menganai perkembangan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.6.1 berikut:

Level Pendidikan	Jumlah Pegawai (ribuan)	Persentase (%)
SLTA	1.000	62,9
Sarjana/S1	1.000	57,6
SLTP	10	98,2
Diploma	10	59,8
S2	10	10,0
S3	10	10,0
Total	1.620	100,0

Tabel 3.6.1 Jumlah dan Prosentase Pegawai Berdasarkan Pendidikan Pada Instansi Sampel di 5 Kabupaten di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat

Pendidikan	Akhir Repelita V	Akhir Thn Ke-3 Repelita VI	Persentase Perubahan
SD atau tdk tamat SD	191 (9,5)	305 (11,4)	59,7
SLTP	111 (5,5)	220 (7,6)	98,2
SLTA	1267 (62,9)	1537 (57,6)	21,3
Diploma	189 (9,4)	1537 (8,4)	18
Sarjana (S1)	255 (12,6)	382 (14,3)	59,8
S2 atau S3	2 (0,1)	2 (0,07)	0
Jumlah	2.015	2.669	32,5

Sumber : Data lapangan, Kuesioner, diolah

Jumlah pegawai yang telah mengikuti berbagai jenis diklat baik diklat struktural maupun diklat teknis fungsional dan teknis manajemen, secara umum mengalami peningkatan sebesar 80,1% yaitu dari 677 orang pada akhir Repelita V menjadi 1.219 orang pada tahun ke-3 Repelita VI sekarang ini.

Peningkatan paling tinggi secara absolut terjadi pada jenis diklat teknis fungsional dan teknis manajemen yaitu dari 551 orang pada akhir Pelita V menjadi 1.007 orang pada tahun ke-3 Repelita VI sekarang ini. Berbagai jenis diklat teknis fungsional dan teknis manajemen yang diberikan di berbagai instansi dapat dilihat pada Lampiran.

Jika dilihat secara relatif prosentase perubahan paling tinggi terjadi pada jumlah pegawai yang mengikuti diklat Sepama/Sepadya, yaitu meningkat 133,3% selama tiga tahun tersebut. Sementara itu peningkatan jumlah pegawai yang mengikuti diklat Adum/Sepada/Sepala secara relatif

merupakan yang paling rendah yaitu 59,5%. Gambaran lengkap mengenai jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat pada Pelita V dan tahun ke-3 Pelita VI dapat dilihat pada Tabel 3.6.2 berikut ini:

Tabel 3.6.2 Jumlah dan Rata-rata Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural, Teknis Fungsional, dan Teknis Manajemen Pada Instansi Sampel di 5 Kabupaten di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat

Jenis Diklat	Akhir Repelita V	Akhir Thn Ke-3 Repelita VI	Percentase Perubahan
Adum/Sepada/Sepala	111 (2,6)	177 (4,1)	59,5
Sepadya/Sepama	15 (0,3)	35 (0,7)	133,3
Teknis Fungsional/ Teknis Manajemen	551 (12,8)	1,007 (23,4)	82,8
Jumlah	677 (15,7)	1,219 (28,3)	80,1

Sumber : Data lapangan, Kuesioner, diolah

Meskipun jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari rata-ratanya masih rendah. Rata-rata jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Sepama/Sepadya belum mencapai 1, ini menunjukkan sebagian kepala Dinas atau yang menjabat Kepala Dinas (Eselon III) belum mengikuti diklat Sepama/Sepadya yang semestinya menjadi syarat untuk menduduki jabatan itu.

2. Aspek Ketatalaksanaan

Aspek kedua yang dievaluasi adalah aspek ketatalaksanaan. Meskipun banyak hal yang terkait dengan aspek ini, namun hanya sebagai sampel evaluasi diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut: Pelaksanaan rapat koordinasi, ketepatan pelaksanaan proyek, pengawasan yang dilakukan oleh instansi fungsional dan pengawasan melekat, serta melihat realisasi pelaksanaan program dari rencana 5 tahun yang dicanangkan selama Repelita VI.

Sebagai sarana koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program di Daerah, rapat koordinasi merupakan alat yang biasa dilaksanakan secara umum. Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan pada saat perencanaan, pelaksanaan, maupun pada saat evaluasi hasil kegiatan. Rapat koordinasi yang sudah baku dan diundangkan dengan peraturan perundang-undangan adalah RAKORBANG Tingkat II di Tingkat Kabupaten, dan RAKORBANG Tingkat I di Tingkat Propinsi. Sedangkan, rapat-rapat lain dilaksanakan atas inisiatif instansinya masing-masing.

Berdasarkan informasi langsung dari responden, ternyata secara umum rapat koordinasi selain rakorbang tidak dilaksanakan oleh semua instansi. Tetapi di lain pihak terdapat instansi yang melakukan rapat sampai dengan 70 kali per tahun. Secara umum jumlah rapat koordinasi selain rakorbang ini mengalami penurunan 12,9%. Adapun rapat-rapat yang dilaksanakan oleh setiap instansi bermacam-macam. Sebagai gambaran, beberapa jenis rapat yang biasa dilaksanakan dapat dilihat pada Lampiran.

Keberhasilan dan kualitas pelaksanaan proyek dapat dilihat dari salah satu indikatornya yaitu ketepatan penjadualan proyek baik dalam memulai pekerjaan, penyelesaian pekerjaan, maupun dalam turunnya anggaran. Berdasarkan informasi dari responden, terdapat instansi yang tidak pernah mengalami keterlambatan baik dalam memulai, menyelesaikan, maupun dalam menerima anggaran proyek. Namun demikian sebagian besar instansi tetap mengalami keterlambatan.

Dalam memulai pekerjaan, keterlambatan maksimum yang dialami oleh beberapa instansi selama 6 (enam bulan). Kemudian dalam penyelesaian proyek, keterlambatan maksimum selama satu tahun. Sedangkan dalam menerima anggaran, keterlambatan maksimum yang dialami instansi atau dinas-dinas daerah adalah selama 6 (enam) bulan. Data lengkap mengenai hal ini dapat dilihat pada tabel 3.6.3 berikut ini:

Tabel 3.6.3 Keterlambatan Minimum dan Maksimum Serta Rata-rata Keterlambatan Penjadualan Proyek Atau Kegiatan Dari Perencanaan Yang Telah Ditetapkan Pada Instansi Sampel di 5 Kabupaten di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat

Momen Kegiatan	Akhir Repelita VI (Bulan)	Akhir Thn Ke-3 Repelita V (bulan)	Persentase Perubahan
Pelaksanaan (Memulai Pekerjaan)	0 s.d 6 (1.6)	0 s.d 6 (1.9)	18.75
Penyelesaian	0 s.d 12 (0.7)	0 s.d 12 (0.6)	- 14.3
Turunnya Anggaran	0 s.d 6 (1.25)	0 s.d 6 (1.5)	20.0

Sumber : Data Lapangan, Kuesioner, diolah

Selain itu, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan proyek dipengaruhi oleh kualitas dan frekuensi pengawasan. Berdasarkan data yang diperoleh, secara umum terdapat 5 pengawas fungsional yang biasa melakukan pengawasan kepada instansi-instansi yang ada di daerah yaitu BPK, BPKP, Itwilprop, Itwilcab/Kod, Itjen. Pengawasan lain yaitu yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan (Waskat).

Pengawasan yang dilakukan oleh BPKP terhadap suatu instansi dalam satu tahun paling banyak 2 kali pada Pelita V dan 3 Kali pada Repelita VI. Pengawasan yang dilakukan BPK paling banyak 1 kali dalam satu tahun baik pada Pelita V maupun pada Repelita VI. Pengawasan yang dilakukan oleh Itwilcab/Itwilcod paling banyak mencapai 20 kali per tahun pada pelita V dan VI. Lalu pengawasan Itwilprop paling banyak 5 kali per tahun pada pelita V dan VI. Sementara itu pengawasan melekat juga belum merata dilaksanakan oleh semua instansi.

Meskipun demikian, terdapat pula instansi-instansi yang tidak mendapatkan pengawasan oleh salah satu dari instansi fungsional dan pengawasan melekat. Sebagai gambaran mengenai frekuensi pengawasan

yang dilakukan setiap instansi fungsional dan waskat terhadap instansi DT.II, dapat dilihat pada Tabel 3.6.4 berikut:

Tabel 3.6.4 Frekuensi Pengawasan Minimum dan Maksimum Serta Rata-rata Per Tahun Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Atau Proyek Pada Instansi Sampel di 5 Kabupaten di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat

Instansi Pengawas	Akhir Repelita V	Akhir Thn Ke-3 Repelita VI	Persentase Perubahan
BPKP	0 s.d 2 0.6	0 s.d 3 0.4	33.3
BPK	0 s.d 1 0.3	0 s.d 1 0.3	0
Itwilkab/Itwilkod	0 s.d 20 1.6	0 s.d 20 2.2	37.5
Itwilprop	0 s.d 5 1.1	0 s.d 5 1.2	9.1
Waskat	0 s.d 42 2.7	0 s.d 30 1.8	33.3
Lainnya	0 s.d 12 0.4	0 s.d 12 0.4	0

Sumber : Data Lapangan, Kuesioner, Diolah

Pada akhirnya, tingkat keberhasilan program salah satunya dapat dilihat dari realisasi fisik dari program tersebut sesuai dengan rencana yang telah dicanangkan. Rencana setiap instansi biasanya tertera dengan jelas dalam Sasaran Repelita (SARLITA) yang telah dibuatnya. Dengan membandingkan sasaran tersebut dengan realisasi program yang telah terlaksana, rata-rata program repelita VI baru terealisasi 13% sampai dengan 80%, seperti terlihat pada Tabel 3.6.5 berikut:

Tabel 3.6.5 Realisasi Minimum dan Maksimum Serta Rata-rata Realisasi Pelaksanaan Program Repelita VI Pada Instansi Sampel di 5 Kabupaten di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat

Realisasi Program Hingga Akhir Tahun Ke-3 REPELITA VI	Prosentase
Minimum	13.43
Maksimum	80.00
Rata-rata	52.50

Sumber : Data lapangan, Kuesioner, diolah

Sementara itu, beberapa program Pendayagunaan Aparatur Negara baik dalam sektor aparatur maupun di luar sektor aparatur (namun terkait dengan PAN), dapat dilihat pada Lampiran.

3. Aspek Kelembagaan

Salah satu indikator kondisi keorganisasian dapat dilihat dari eselonisasi jabatan yang ada dalam instansi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pada instansi-instansi Daerah Tingkat II di Propinsi DT.I NTB, nampak terjadi perubahan eselon. Eselon III yang pada akhir Repelita V berjumlah 32 orang, kini pada tahun ke-3 Repelita VI menjadi 40 orang. Ini sejalan dengan adanya persiapan otonomi daerah, dengan pembentukan dinas-dinas baru. Data mengenai jumlah dan rata-rata pegawai yang menduduki eselon dapat dilihat pada Tabel 4.6.6 berikut:

Tabel 3.6.6 Jumlah dan Rata-rata Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Pada Instansi Sampel di 5 Kabupaten di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat

Eselon	Akhir Repelita V	Akhir Thn Ke-3 Repelita VI	Persentase Perubahan
III	32 (0.7)	40 (0.9)	25.0
IV	152 (3.5)	182 (4.2)	19.7
V	423 (9.8)	561 (13.1)	32.6

Sumber : Data lapangan, Kuesioner, diolah

Eselon IV dan Eselon V pun mengalami peningkatan. Eselon V yang pada akhir Pelita IV berjumlah 152 orang, meningkat 19,7% menjadi 182 orang pada tahun ke-3 Repelita VI. Sedangkan eselon V yang pada akhir Pelita V hanya berjumlah 423 orang, meningkat 32,6% menjadi 561 orang pada tahun ke-3 Repelita VI.

BAB IV**ANALISIS DAN PEMBAHASAN SERTA REKOMENDASI
TERHADAP HASIL PEMBANGUNAN SEKTOR
APARATUR NEGARA DI DAERAH****A. Pembahasan Umum Terhadap Pembangunan Aparatur di Daerah**

Keberhasilan pembangunan Sektor Aparatur di Daerah terlihat dari terjadinya perubahan yang positif terhadap kondisi-kondisi yang ada. Perubahan ini merupakan implikasi dari adanya tindakan-tindakan yang terencana dengan baik, yang diwujudkan dalam proyek dan program. Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk melihat keberhasilan pembangunan sektor aparatur negara di daerah, dievaluasi beberapa program yang dilaksanakan di Daerah. Hasil evaluasi terhadap beberapa instansi sampel di Daerah Tingkat II yang tersebar di 6 (enam) Propinsi DT.I adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Peringkat Keberhasilan Program-Program
Pembangunan Sektor Aparatur Negara di Daerah

ITEM	PROSENTASE INSTANSI/UNIT KERJA YG TELAH MENGALAMI PENINGKATAN	PERINGKAT/ RANKING KEBERHASILAN SETIAP PROGRAM
1. Program Peningkatan Kemampuan Aparatur di Daerah	72.0	6
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur di Daerah	70.2	7
3. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan di Daerah	78.4	3

Lanjutan Tabel 4.1

ITEM	PROSENTASE INSTANSI/UNIT KERJA YG TELAH MENGALAMI PENINGKATAN	PERINGKAT/RANKING KEBERHASILAN SETIAP PROGRAM
4. Program peningkatan kualitas pelaksanaan program	73.1	5
5. Peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah di daerah dalam melaksanakan pembangunan	83.6	2
6. Program peningkatan kualitas dan frekuensi pengawasan/evaluasi, serta tindak lanjut dari hasil pengawasan dan evaluasi tersebut	76.7	4
7. Program peningkatan kemampuan memobilisasi berbagai sumber keuangan daerah	57.8	9
8. Program peningkatan pelayanan aparatur terhadap masyarakat	85.9	1
9. Program pembentukan atau penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan di Daerah atau yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi instansi	62.8	8
10. Program penataan kembali batas wilayah dan daerah dalam rangka pemekaran dan penyesuaian status daerah tertentu	36.3	11
11. Program peningkatan kemampuan lembaga dan organisasi masyarakat	49.2	10

Sumber: Jawaban responden, kuesioner, diolah.

Dari 11 (sebelas) program yang dilaksanakan di Daerah, keberhasilan yang paling tinggi, adalah dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Dari seluruh instansi yang dievaluasi 85,9% instansi telah mengalami peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat. Sementara itu, 3 (tiga) program yang terlihat masih kurang berhasil adalah Program penataan kembali batas wilayah dan daerah dalam rangka pemekaran dan penyesuaian status daerah tertentu; Program peningkatan kemampuan lembaga dan organisasi masyarakat; serta Program peningkatan kemampuan memobilisasi berbagai sumber keuangan daerah.

Kualitas sumber daya manusia aparatur tercermin antara lain dari tingkat pendidikan dan jenis diklat yang pernah diikuti. Berdasarkan tingkat pendidikannya, sebagian besar pegawai berpendidikan maksimal SLTA baik pada Pelita V maupun pada tahun ke-3 Repelita VI. Secara absolut pegawai berdasarkan semua jenjang pendidikan cenderung mengalami peningkatan. Sementara itu, jumlah pegawai yang telah mengikuti berbagai jenis diklat baik diklat struktural maupun diklat teknis fungsional dan teknis manajemen, juga secara umum mengalami peningkatan. Peningkatan paling tinggi secara absolut terjadi pada jenis diklat teknis fungsional dan teknis manajemen. Kondisi semacam ini, menunjukkan bahwa pada masa yang akan datang perlu ditempuh kebijaksanaan peningkatan kemampuan pegawai melalui berbagai pendidikan bergelar dan berbagai diklat.

Pada instansi-instansi Daerah Tingkat II tertentu, nampak terjadi perubahan eselon dari akhir Repelita V ke tahun ke-3 Repelita VI. Ini antara lain sejalan dengan adanya persiapan otonomi daerah, dengan pembentukan dinas-dinas baru. Secara logis, tuntutan ini perlu diantisipasi dengan penyiapan sumber daya manusianya. Artinya apabila eselonnya bertambah, maka perlu diimbangi dengan pendidikan dan pelatihan yang disyaratkan untuk menduduki eselon tersebut.

Meskipun jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari rata-ratanya masih rendah. Rata-rata jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Sepama/Sepadya misalnya belum mencapai 1, ini menunjukkan bahwa sebagian pejabat eselon III (seperti Kepala Dinas) belum mengikuti diklat Sepama/Sepadya yang semestinya menjadi syarat untuk menduduki jabatan itu.

Berdasarkan data-data kuantitatif seperti dipaparkan tersebut, kemampuan Pegawai Kabupaten/Kodya DT.II secara umum telah mengalami peningkatan dari Akhir Repelita V Sampai Tahun Ke-3 Repelita VI. Kekurangan yang agak menonjol terutama dalam hal Peningkatan kualitas SDM melalui pengikutsertaan dalam berbagai pendidikan berjenjang dalam dan luar negeri, serta dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi kemasyarakatan formal.

Upaya peningkatan disiplin pegawai/aparatur telah banyak dilakukan oleh semua instansi, dan hasilnya pun dapat dilihat terjadi peningkatan disiplin. Kekurangan yang masih ada terutama dalam hal pengenaan sangsi atau teguran bagi pegawai yang melanggar disiplin, seperti terlambat masuk, pulang sebelum waktunya, atau keluar kantor pada jam kerja; kemudian dalam pemberian motivasi berupa materi, untuk meningkatkan disiplin pegawai; serta dalam upaya penghilangan calo-calo atau makelar dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan koordinasi pembangunan baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan, serta evaluasinya, secara umum hampir semua instansi melaksanakan rapat koordinasi selain Rakorbang. Adapun rapat-rapat yang dilaksanakan oleh setiap instansi bermacam-macam, sesuai dengan substansi tugas pokok dan fungsinya, namun pada dasarnya semua itu dilaksanakan dalam rangka koordinasi. Meskipun rapat-rapat koordinasi sering dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya ketidakterpaduan dan ketidakserasan kegiatan yang dilakukan suatu instansi dengan instansi lain yang terkait sering ditemukan. Bahkan, kadang ditemukan pula ketidakterpaduan dua atau lebih kegiatan yang dilakukan oleh suatu instansi. Hal ini menunjukkan bahwa rapat-rapat koordinasi termasuk Rakorbang belum efektif dilaksanakan. Kalupun secara kuantitas sering dilaksanakan, namun dari sisi kualitas belum sesuai dengan harapan.

Jadi, upaya peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah di daerah dalam melaksanakan pembangunan sudah dilaksanakan, dan dampaknya pun sudah terlihat. Kekurangan yang ada terutama dalam hal: Pertama, kurangnya

keterpaduan berbagai kegiatan sejenis dan berkaitan, serta kurangnya keserasian jadual pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai instansi. Kedua, kurangnya keserasian berbagai kegiatan dengan kegiatan lainnya yang sama-sama merupakan tugas suatu instansi.

Dari sisi pelaksanaan, dan turunnya anggaran proyek, terdapat instansi yang tidak pernah mengalami keterlambatan baik dalam memulai, menyelesaikan, maupun dalam menerima anggaran proyek. Namun demikian, sebagian besar instansi mengalami keterlambatan. Dalam memulai pekerjaan, keterlambatan maksimum yang dialami oleh instansi pada umumnya selama 6 (enam) bulan. Kemudian dalam penyelesaian proyek, keterlambatan maksimum secara umum selama satu tahun. Sedangkan dalam menerima anggaran, keterlambatan maksimum yang dialami instansi atau dinas-dinas daerah umumnya adalah selama 6 bulan. Keterlambatan-keterlambatan ini, secara tidak langsung akan berdampak terhadap kualitas output proyek yang dihasilkan. Keterlambatan dalam memulai pekerjaan atau dalam turunnya anggaran misalnya, akan menyebabkan proyek dikerjakan dengan terburu-buru karena berupaya mencapai target waktu. Hal ini pada akhirnya akan mengabaikan kualitas dari proyek itu sendiri, atau paling tidak kualitas yang dihasilkan tidak akan optimal.

Meskipun sering terjadi keterlambatan dalam memulai pekerjaan, penyelesaian pekerjaan, atau dalam turunnya anggaran, namun secara umum telah terjadi peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan proyek dan program. Hasil dari upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dapat dilihat dengan adanya perubahan dari Repelita V ke Repelita VI ini. Kekurangan yang masih ada terutama dalam hal: kurangnya dukungan sumber daya dan sumber dana terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan; kurang berjalanannya mekanisme bottom up dalam perencanaan; dan kurang dilaksanakannya upaya pengumpulan data yang diperlukan untuk menyusun perencanaan pembangunan.

Sementara itu, dilihat dari kualitas pelaksanaan program, juga sudah menunjukkan terjadinya peningkatan dari Repelita V ke Repelita VI.

Kekurangan yang masih ada terutama dalam hal: kurang tepatnya waktu memulai pelaksanaan pekerjaan; kurangnya pengembangan sistem informasi manajemen pembangunan daerah; mekanisme dan prosedur perizinan kegiatan dunia usaha di daerah-daerah Tk.II masih relatif rumit; kurang tepatnya penyelesaian kegiatan sesuai dengan penjadualan yang telah ditetapkan; kurang sesuaianya penyediaan jumlah sumber daya manusia dengan kebutuhan proyek/kegiatan; kurang sesuaianya kualifikasi sumber daya manusia dengan kebutuhan proyek/kegiatan; kurang sesuaianya jumlah dan kualitas material dengan kebutuhan proyek/kegiatan; serta kurang cukupnya jumlah anggaran.

Terdapat 2 pengawas fungsional yang biasa melakukan pengawasan kepada instansi-instansi yang ada di daerah yaitu BPK dan BPKP. Sementara itu, pengawasan internal biasa dilakukan oleh Itwilprop, Itwilcab/Kod, dan Itjen. Pengawasan lainnya dilakukan oleh atasan terhadap bawahan (Waskat). Pengawasan fungsional dan pengawasan internal, tidak merata dilakukan terhadap semua instansi. Secara kumulatif dalam satu tahun, terdapat instansi yang mendapat pengawasan sering sekali, hampir semua pengawas melakukannya. Tetapi ada pula instansi yang mendapatkan pengawasan oleh salah satu atau tidak semua instansi pengawas, bahkan ada pula yang tidak pernah mendapat pengawasan. Pengawasan melekat pun belum merata dilaksanakan oleh semua instansi.

Meskipun demikian, dilihat dari sisi kualitas, upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan dan evaluasi, serta tindak lanjut dari hasil pengawasan dan evaluasi tersebut telah dilakukan, baik pengawasan fungsional, pengawasan internal, maupun pengawasan melekat. Kekurangan yang masih nampak terutama dalam hal: Pelaporan insidental jika menghadapi masalah, jarang dilakukan dengan segera; kurang baiknya pengarsipan terhadap berbagai dokumen kegiatan; dan kurangnya teguran atau pengenaan sangsi terhadap aparat yang melakukan penyimpangan atau penyelewengan.

Dari sisi keuangan, program yang dicanangkan pada Repelita VI adalah upaya memobilisasi berbagai sumber keuangan daerah. Program ini nampaknya telah dilakukan oleh hampir semua daerah, namun hasilnya masih jauh dari sasaran. Beberapa kekurangan terutama dalam hal kurangnya upaya penggalian sumber dana baru; dan kurangnya upaya pengintensifan sumber pendapatan yang berasal dari laba BUMD.

Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu program yang dicanangkan pada Repelita VI. Program ini pun telah dilakukan oleh instansi-instansi di DT.II. Bahkan secara umum program ini berdasarkan informasi dari pimpinan-pimpinan instansi Daerah Tingkat II merupakan program yang paling mencapai keberhasilan. Kelemahan yang masih nampak terutama dalam hal pemberian penerangan kepada masyarakat, mengenai kebijaksanaan pemerintah.

Upaya pembentukan atau penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan di Daerah atau yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi instansi, juga telah dilakukan. Kekurangan yang masih nampak terutama dalam hal upaya pembentukan peraturan perundang-undangan baru dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan di daerah. Demikian pula program penataan kembali batas wilayah dan daerah dalam rangka pemekaran dan penyesuaian status daerah tertentu, serta peningkatan kemampuan lembaga dan organisasi masyarakat, juga telah dilakukan di daerah. Namun hasilnya masih belum optimal.

Pada akhirnya, tingkat keberhasilan program salah satunya dapat dilihat dari realisasi fisik dari program tersebut sesuai dengan rencana yang telah dicanangkan. Rencana setiap instansi biasanya tertera dengan jelas dalam Sasaran Repelita (SARLITA) yang telah dibuatnya. Dengan membandingkan sasaran tersebut dengan realisasi program yang telah terlaksana, rata-rata program repelita VI baru terealisasi 13% sampai dengan 80%. Apabila dibandingkan dengan paruh waktu yang telah dilalui dalam Repelita VI ini, yaitu selama 3 Tahun, maka pencapaian sasaran Repelita VI seyogianya telah mencapai sekitar 60%. Jadi, berdasarkan data yang

diperoleh, masih terdapat instansi yang lamban dalam penyelesaian programnya, sementara itu terdapat pula instansi yang cepat dalam penyelesaian programnya.

D. Aspek Kepegawaian

Berkenaan dengan aspek kepegawaian, diukur kualitas keberhasilan program peningkatan kemampuan aparatur dan keberhasilan program peningkatan disiplin aparatur. Pengukuran keberhasilan kedua program tersebut, dilakukan secara parsial terhadap beberapa indikatornya.

1. Program Peningkatan Kemampuan Pegawai

Untuk mengevaluasi keberhasilan upaya peningkatan kemampuan aparatur, diukur 6 (enam) indikator. Keenam indikator dan prosentase instansi yang sudah berhasil meningkatkan kemampuan aparatur di instansinya, serta ranking keberhasilan setiap indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Indikator	Instansi yang berhasil meningkatkan kemampuan aparatur	Prosentase	Ranking
1.1. Meningkatkan kemampuan teknis dan teknologi	10	100%	1
1.2. Meningkatkan kemampuan administrasi	10	100%	1
1.3. Meningkatkan kemampuan manajemen	10	100%	1
1.4. Meningkatkan kemampuan keterampilan	10	100%	1
1.5. Meningkatkan kemampuan etika dan disiplin	10	100%	1
1.6. Meningkatkan kemampuan pengembangan diri	10	100%	1

Tabel 4.2
Peringkat Keberhasilan Indikator-indikator
Program Peningkatan Kemampuan Aparatur di Daerah

ITEM	PROSENTASE INSTANSI/UNIT KERJA YG TELAH MENGALAMI PENINGKATAN	PERINGKAT/ RANKING KEBERHASILAN SETIAP INDIKATOR
1. Peningkatan kualitas SDM melalui pengikutsertaan dlm berbagai diklat struktural	85.3	1
2. Peningkatan kualitas SDM melalui pengikutsertaan dlm berbagai diklat fungsional	83.8	2
3. Peningkatan kualitas SDM melalui pengikutsertaan dlm berbagai pendidikan berjenjang dalam dan luar negeri	49.7	6
4. Peningkatan kualitas SDM melalui pengikutsertaan dlm berbagai penataran, seminar, lokakarya, atau forum ilmiah lainnya	77.1	3
5. Kesesuaian diklat/pendidikan yang diikuti pegawai dalam pekerjaan, dengan kebutuhan	75.7	4
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi kema syarakatan formal	60.3	5
RATA-RATA PROSENTASE	72.0	

Sumber: Jawaban responden, kuesioner, diolah.

Dari data tersebut terlihat bahwa keberhasilan program peningkatan kemampuan pegawai terutama melalui pengikutsertaan pegawai dalam berbagai jenis pendidikan dan pelatihan, baik struktural maupun teknis fungsional dan teknik manajemen. Keberhasilan ini, terlihat dari meningkatnya jumlah pegawai yang diikutsertakan dalam diklat-diklat tersebut. Peningkatan jumlah pegawai yang mengikuti diklat struktural dan

fungsional dari Pelita V ke tahun ke-3 Repelita VI, di Jawa Barat paling tinggi mencapai 125%, Jawa Timur 70,4%, Yogyakarta 25,8%, Sumatera Utara 83,01%, Lampung 10%, dan Nusa Tenggara Barat 80,1%.

Indikator kemampuan pegawai yang kurang berhasil terutama dalam Peningkatan kualitas SDM melalui pengikutsertaan dalam berbagai pendidikan berjenjang dalam dan luar negeri, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi kemasyarakatan formal. Hal ini juga terlihat dari rendahnya peningkatan jumlah pegawai yang mengikuti program S2 dan S3. Peningkatan jumlah pegawai yang lulus S2 dan S3 dari akhir Repelita V hingga tahun ke-3 Repelita VI, di Jawa Barat hanya mencapai 32,5%, Jawa Timur turun 33,3%, Yogyakarta 41,66%, Sumatera Utara 17,22%, Lampung 8%, dan Nusa Tenggara Barat 0%. Meskipun secara relatif hampir semua daerah mengalami peningkatan lulusan S2 atau S3 kecuali Jawa Timur dan NTB, namun karena peningkatan secara mutlak sangat sedikit, maka dinilai oleh mereka indikator program ini masih belum berhasil.

Indikator lain yang kurang berhasil adalah upaya peningkatan kualitas SDM yang ada dalam organisasi kemasyarakatan formal. Memang dalam kenyataannya pun, selama ini peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan formal lebih dominan berkiprah pada aspek-aspek sosial dan politik. Sementara itu, tidak diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas SDM-nya.

Hal lain yang perlu disoroti di sini adalah masih adanya instansi yang menilai diklat-diklat yang diikuti pegawai belum sesuai dengan pekerjaan atau kebutuhan dalam pekerjaannya. Ini menunjukkan bahwa, penyelenggaraan diklat oleh instansi-instansi tidak didasari oleh analisis kebutuhan pelatihan (*training needs*) terlebih dahulu. Faktor lain yang bisa menyebabkan inkonsistensinya materi diklat dengan tuntutan pekerjaan adalah bahwa pengiriman peserta diklat dilakukan asal-asalan, tidak didasarkan kepada kebutuhan pada instansi atau unit kerjanya.

2. Program Peningkatan Disiplin Pegawai

Untuk mengevaluasi keberhasilan program peningkatan disiplin aparatur, diukur 9 (sembilan) indikator. Kesembilan indikator dan prosentase instansi yang telah mengalami peningkatan positif, serta peringkat keberhasilan setiap indikator dilihat dari jumlah instansi yang mengalami keberhasilan, dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Peringkat Keberhasilan Indikator-indikator
Program Peningkatan Disiplin Aparatur di Daerah

ITEM	PROSENTASE INSTANSI/UNIT KERJA YG TELAH MENGALAMI PENINGKATAN	PERINGKAT/ RANKING KEBERHASILAN SETIAP INDIKATOR
1. Peningkatan disiplin dalam masuk kerja	92.5	1
2. Peningkatan disiplin dalam pulang kerja	89.4	2
3. Peningkatan disiplin dalam pekerjaan, atau pemanfaatan jam kerja	88.0	3
4. Pengenaan sangsi atau teguran bagi pegawai yang melanggar disiplin, seperti ter lambat masuk, pulang sebelum waktunya, atau keluar kantor pada jam kerja	61.3	5
5. Pemberian penghargaan bagi pegawai yang berpredikat disiplin	40.1	9
6. Pemberian motivasi berupa materi, untuk meningkatkan disiplin pegawai	61.0	6
7. Peningkatan disiplin pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	86.0	4

Lanjutan Tabel 4.3

ITEM	PROSENTASE INSTANSI/UNIT KERJA YG TELAH MENGALAMI PENINGKATAN	PERINGKAT/ RANKING KEBERHASILAN SETIAP INDIKATOR
8. Penghapusan pungutan- pungutan liar dalam rangka menciptakan aparatur yang berdisiplin, bersih, dan berwibawa	60.3	7
9. Penghilangan calo-calo atau makelar dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat	53.4	8
RATA-RATA PROSENTASE	70.2	

Sumber: Jawaban responden, Kuesioner, Diolah

Dari Tabel tersebut terlihat bahwa lebih dari 88% instansi di daerah telah berhasil meningkatkan disiplin pegawai dalam masuk kerja, pulang kerja, dan pemanfaatan jam kerja. Meskipun demikian, upaya pihak instansi (pemerintah) untuk meningkatkan disiplin dengan memberikan penghargaan diakui masih belum dilaksanakan oleh mayoritas instansi. Padahal, ini merupakan unsur penting yang dapat dimanfaatkan sebagai motivator bagi pegawai untuk meningkatkan disiplin dalam bekerja.

Indikator lain yang belum berhasil dilaksanakan adalah penghapusan pungutan-pungutan liar dalam rangka menciptakan aparatur yang berdisiplin, bersih, dan berwibawa; serta penghilangan calo-calo atau makelar dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sulitnya mengubah kondisi seperti ini, disertai dengan kurangnya pengenaan sangsi dan teguran kepada pegawai yang melanggar disiplin atau melakukan penyelewengan. Artinya, bahwa perangkat ketentuan yang mengatur penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang masih belum efektif mengcegah terjadinya hal-hal demikian. dan satu hal yang mesti diperhatikan, bahwa sangsi akan dapat diterapkan dengan efektif apabila ada percontohan dari atasan dalam segala hal.

3. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tersebut, untuk meningkatkan kualitas Aparatur Negara di Daerah pada masa yang akan datang, selain melanjutkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah relatif berhasil, juga perlu ditempuh melalui kebijaksanaan: (1) Peningkatan program pendidikan berjenjang (bergelar) bagi pegawai, baik di dalam maupun di Luar Negeri; (2) Peningkatan kualitas SDM pada organisasi-organisasi kemasyarakatan formal, baik melalui pendidikan bergelar, maupun diklat-diklat, kursus-kursus, penataran, serta pengikutsertaan dalam berbagai forum ilmiah lainnya; (3) Peningkatan muatan materi diklat dan peningkatan kesesuaian materi diklat dengan tuntutan pekerjaan. Oleh karena itu, sebelum diselenggarakan susu diklat perlu dilakukan *training needs* terlebih dahulu; (4) Pemberian penghargaan bagi pegawai yang berdisiplin; (4) Penghilangan calo-calo atau makelar dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta Penghapusan pungutan-pungutan liar dalam rangka menciptakan aparatur yang berdisiplin, bersih, dan berwibawa. Untuk itu, perlu percontohan yang positif dari pihak atasan dalam segala hal.

D. Aspek Ketatalaksanaan

Berkenaan dengan aspek ketatalaksanaan, diukur kualitas keberhasilan dari 7 program sesuai dengan prioritas yang dicanangkan sektor aparatur di Daerah pada Repelita VI. Ketujuh program tersebut adalah program peningkatan kualitas perencanaan pembangunan; Program peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan; Program peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah di Daerah dalam melaksanakan pembangunan; Program peningkatan kualitas pengawasan dan evaluasi; Program peningkatan kemampuan memobilisasi sumber keuangan Daerah; Program peningkatan pelayanan terhadap masyarakat; Dan program pembentukan atau penyempurnaan perangkat perundang-undangan Daerah.

1. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan

Untuk mengevaluasi keberhasilan program peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Daerah, diukur 6 (enam) indikator. Keenam indikator dan prosentase instansi yang telah mengalami peningkatan positif, serta peringkat keberhasilan setiap indikator dilihat dari jumlah instansi yang mengalami keberhasilan, dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut:

**Tabel 4.4 Peringkat Keberhasilan Indikator-indikator
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Pembangunan di Daerah**

ITEM	PROSENTASE INSTANSI/UNIT KERJA YG TELAH MENGALAMI PENINGKATAN	PERINGKAT/ RANKING KEBERHASILAN SETIAP INDIKATOR
1. Kesesuaian rencana-rencana kerja dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat	79.1	3
2. Dukungan sumber daya dan sumber dana terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	76.7	4
3. Mekanisme bottom up dalam perencanaan	70.6	6
4. Penggunaan proyek/kegiatan yang telah lalu sebagai bahan/proyeksi pada tahun berikutnya, dalam rangka perencanaan dari bawah	76.4	5
5. Pengumpulan data yang diperlukan untuk menyusun perencanaan pembangunan	81.5	2
6. Kejelasan sasaran dalam se tiap perencanaan yang dibuat	86.3	1
RATA-RATA PROSENTASE	78.4	

Sumber: Jawaban responden, kuesioner, diolah.

Dari Tabel tersebut terlihat bahwa sasaran yang dibuat dalam setiap perencanaan secara umum sudah jelas, demikian juga perencanaan yang dibuat sebagian besar disusun berdasarkan data-data yang dikumpulkan terlebih dahulu. Rencana yang dibuat pun, di atas kertas sudah relevan dengan tuntutan masyarakat. Demikian menurut mayoritas responden.

Kelemahan yang paling nampak dari upaya peningkatan kualitas perencanaan ini adalah kurang berjalananya mekanisme *bottom up planning* dan penggunaan proyek-proyek yang sudah dilaksanakan bagi perencanaan selanjutnya. Berdasarkan informasi ini dapat diinterpretasi bahwa mekanisme Rakorbang yang selama ini diandalkan sebagai upaya *bottom up planning* belum efektif.

Kelemahan lain juga terlihat dari kurangnya dukungan sumber daya dan sumber dana untuk mendukung perencanaan yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia di Daerah Tingkat II masih kurang memadai baik dilihat dari segi kuantitas dan terutama dari segi kualitas. Sebagian besar pegawai DT.II didominasi oleh pegawai yang berpendidikan SD, SLTP, dan SLTA. Di Jawa Barat, lebih dari 60% pegawainya berpendidikan maksimal SD, SLTP, dan SLTA. Demikian juga di daerah-daerah lainnya.

2. Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Program

Untuk mengevaluasi keberhasilan program peningkatan kualitas pelaksanaan program pembangunan di Daerah, diukur 20 (dua puluh) indikator. Keduapuluh indikator dan prosentase instansi yang telah mengalami peningkatan positif, serta peringkat keberhasilan setiap indikator dilihat dari jumlah instansi yang mengalami keberhasilan, dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5 Peringkat Keberhasilan Indikator-indikator Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Program Pembangunan di Daerah

ITEM	PROSENTASE INSTANSI/UNIT KERJA YG TELAH MENGALAMI PENINGKATAN	PERINGKAT/ RANKING KEBERHASILAN SETIAP INDIKATOR
1. Kejelasan pembagian kerja dalam pelaksanaan kegiatan	79.5	6
2. Kejelasan tanggung jawab pada tiap tingkatan manajemen dalam kegiatan atau proyek	86.0	1.5
3. Pembinaan kerja sama dalam berbagai kegiatan	86.0	1.5
4. Efisiensi sumber daya manusia/personil dalam setiap kegiatan atau proyek	81.5	5
5. Efisiensi penggunaan sumber dana dalam setiap kegiatan atau proyek	82.8	3
6. Ketepatan waktu memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai jadual yang telah ditentukan	73.0	11
7. Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan/ kegiatan sesuai jadual yang telah ditetapkan	77.1	8
8. Kesesuaian hasil dengan rencana yang telah ditetapkan	81.9	4
9. Pengembangan sistem informasi manajemen pembangunan daerah	67.4	13
10. Penyederhanaan mekanisme dan prosedur perizinan kegiatan dunia usaha di daerah-daerah Tk.II	62.2	20
11. Kesesuaian pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan	75.7	9
12. Ketepatan memulai kegiatan/proyek dengan penjadualan yang telah ditetapkan	68.5	12
13. Ketepatan penyelesaian kegiatan sesuai dengan penjadualan yang telah ditetapkan	73.6	10
14. Ketepatan penyediaan jumlah sumber daya manusia dengan kebutuhan proyek/kegiatan	65.1	15.5

Lanjutan Tabel 4.5

ITEM	PROSENTASE INSTANSI/UNIT KERJA YG TELAH MENGALAMI PENINGKATAN	PERINGKAT/ RANKING KEBERHASILAN SETIAP INDIKATOR
15. Kesesuaian kualifikasi sumber daya manusia dengan kebutuhan proyek/kegiatan	64.4	18
16. Ketepatan jumlah material dengan kebutuhan proyek/kegiatan	62.7	19
17. Kesesuaian kualitas material dengan kebutuhan proyek/kegiatan	65.1	15.5
18. Inovasi metode baru dalam pelaksanaan kegiatan/proyek	64.7	17
19. Kecukupan jumlah anggaran	66.1	14
20. Kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan/proyek	77.7	7
RATA-RATA PROSENTASE	73.1	

Sumber: Jawaban responden, kuesioner, diolah.

Tanggung jawab yang diberikan pada tiap tingkatan manajemen dalam kegiatan atau proyek dirasakan oleh hampir seluruh instansi (86%) sudah cukup jelas. Demikian juga pembinaan kerja sama dalam berbagai kegiatan sudah cukup baik dilaksanakan.

Kelemahan yang menonjol dalam pelaksanaan program pembangunan adalah dalam hal penyederhanaan mekanisme dan prosedur perizinan kegiatan dunia usaha di daerah-daerah Tk.II; Kesesuaian kualifikasi sumber daya manusia dengan kebutuhan proyek/kegiatan; Dan ketepatan jumlah material dengan kebutuhan proyek/kegiatan.

Kemudahan mekanisme dan prosedur perizinan kegiatan dunia usaha di Daerah Tingkat II, dan ketersediaan sumber daya manusia sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, merupakan dua unsur penentu utama bagi peningkatan kemampuan Daerah dalam menerima otonomi Daerah.

Kemudahan mekanisme dan prosedur perizinan berkaitan langsung dengan gairah Daerah dalam meningkatkan aktivitas ekonominya, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan asli Daerah. Sementara itu kualifikasi SDM terkait erat dengan kemampuan Daerah dalam mengembangkan berbagai potensi yang ada di Daerah. Dengan demikian, apabila kedua faktor ini masih relatif lemah, maka kemungkinan besar penerimaan otonomi akan mendapat hambatan.

Kelemahan lain yang menonjol dalam aspek peningkatan kualitas pelaksanaan program adalah kurangnya pengembangan sistem informasi manajemen pembangunan daerah, kurang tepatnya memulai kegiatan/proyek dengan penjadualan yang telah ditetapkan, kurang sesuainya kualitas material dengan kebutuhan proyek/kegiatan, serta kurangnya inovasi metode baru dalam pelaksanaan kegiatan/proyek.

3. Program Peningkatan Koordinasi Antar Instansi Pemerintah di Daerah

Untuk mengevaluasi keberhasilan program peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah di Daerah, diukur 5 (lima) indikator. Kelima indikator dan prosentase instansi yang telah mengalami peningkatan positif, serta peringkat keberhasilan setiap indikator dilihat dari jumlah instansi yang mengalami keberhasilan, dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut:

Indikator	Peringkat	Instansi yang mengalami peningkatan positif (%)	Instansi yang mengalami peningkatan positif (jumlah)
1. Koordinasi antar instansi pemerintah di Daerah	1	75	12
2. Koordinasi antar instansi pemerintah di Daerah	2	75	12
3. Koordinasi antar instansi pemerintah di Daerah	3	75	12
4. Koordinasi antar instansi pemerintah di Daerah	4	75	12
5. Koordinasi antar instansi pemerintah di Daerah	5	75	12

Tabel 4.6 Peringkat Keberhasilan Indikator-indikator Program Peningkatan Koordinasi Antar Instansi Pemerintah di Daerah

ITEM	PROSENTASE INSTANSI/UNIT KERJA YG TELAH MENGALAMI PENINGKATAN	PERINGKAT/ RANKING KEBERHASILAN SETIAP INDIKATOR
1. Peningkatan koordinasi dalam perencanaan kegiatan	90.1	1
2. Peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan	88.0	2
3. Peningkatan koordinasi dalam pengawasan, monitoring dan evaluasi	86.0	3
4. Keterpaduan berbagai kegiatan sejenis dan berkaitan, serta keserasian jadual pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai instansi	76.7	5
5. Keserasian berbagai kegiatan dengan kegiatan lainnya yang sama-sama merupakan tugas suatu instansi	77.3	4
RATA-RATA PROSENTASE	83.6	

Sumber: Jawaban responden, kuesioner, diolah.

Koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, di atas kertas diakui oleh lebih dari 85% telah mengalami peningkatan positif. Namun demikian, dalam prakteknya ternyata masih banyak terjadi ketidakserasan dan ketidakterpaduan pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa instansi.

4. Program Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Evaluasi

Untuk mengevaluasi keberhasilan program peningkatan kualitas pengawasan/ evaluasi, diukur 12 (duabelas) indikator. Keduabelas indikator dan prosentase instansi yang telah mengalami peningkatan positif, serta

peringkat keberhasilan setiap indikator dilihat dari jumlah instansi yang mengalami keberhasilan, dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7 Peringkat Keberhasilan Indikator-indikator
Program Peningkatan Kualitas Pengawasan/Evaluasi di Daerah

ITEM	PROSENTASE INSTANSI/UNIT KERJA YG TELAH MENGALAMI PENINGKATAN	PERINGKAT/ RANKING KEBERHASILAN SETIAP INDIKATOR
1. Monitoring terhadap kegiatan atau proyek yang dilaksanakan	83.9	2
2. Efektivitas monitoring terhadap berbagai kegiatan	81.2	4
3. Pelaksanaan pelaporan rutin setiap kegiatan/proyek	77.4	7
4. Pelaksanaan pelaporan tidak rutin jika menghadapi masalah	60.3	12
5. Pengarsipan terhadap berbagai dokumen kegiatan	74.0	10
6. Peneguran atau pengenaan sangsi terhadap aparat yang melakukan penyimpangan atau penyelewengan	65.1	11
7. Pelaksanaan evaluasi pada setiap akhir kegiatan	76.7	8
8. Penggunaan hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan bagi kegiatan selanjutnya.	79.5	6
9. Peningkatan pengawasan penggunaan keuangan daerah	82.5	3
10. Kelengkapan isi laporan dalam memuat hal-hal sbb: * Jenis pekerjaan * Waktu (Jadual) pelaksanaan * Instansi yang terkait * Kegiatan yg telah selesai	74.7	9

Lanjutan Tabel 4.7

ITEM	PROSENTASE INSTANSI/UNIT KERJA YG TELAH MENGALAMI PENINGKATAN	PERINGKAT/ RANKING KEBERHASILAN SETIAP INDIKATOR
11. Peningkatan kualitas pengawasan intern	84.9	1
12. Peningkatan kualitas pengawasan fungsional	79.8	5
RATA-RATA PROSENTASE	76.7	

Sumber: Jawaban responden, kuesioner, diolah.

Tiga urutan pertama indikator yang paling banyak berhasil ditingkatkan oleh instansi-instansi di Daerah adalah: (1) Peningkatan kualitas pengawasan intern; (2) Monitoring terhadap kegiatan atau proyek yang dilaksanakan; Dan (3) peningkatan pengawasan penggunaan keuangan daerah.

Pengawasan intern terdiri dari pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat di lingkungan instansi teknisnya masing-masing dan pengawasan intern dari inspaktorat wilayah kabupaten/Kodya/Propinsi. Meningkatnya kualitas pengawasan intern ternyata sejalan dengan menurunnya frekuensi pengawasan intern itu sendiri. Seperti terlihat pada data yang diperoleh dari setiap instansi sampel, frekuensi pengawasan intern oleh inspektorat menurun dari Repelita V. Di Jawa Barat frekuensi pengawasan ini menurun rata-rata 70% per tahun; Di Jawa Timur frekuensi pengawasan oleh itwilkab/itwilkod menurun rata-rata 31,1%, oleh itwilprop menurun 46,4%; Di Yogyakarta frekuensi pengawasan oleh itwilkab/itwilkod menurun 30%, oleh itwilprop menurun 30%; Di Sumatera Utara frekuensi pengawasan oleh itwilkab/itwilkod menurun 20%, oleh itwilprop menurun 26,3%; Di Lampung frekuensi pengawasan oleh itwilkab/itwilkod menurun 8,8%, oleh itwilprop menurun 35,4%. Hanya di NTB yang mengalami peningkatan frekuensi pengawasan intern.

Kualitas pengawasan fungsional (yang dilakukan oleh BPK dan BPKP) menduduki peringkat 5 dalam keberhasilannya. Sebanyak 79,85 instansi di Daerah merasakan terjadinya peningkatan kualitas pengawasan fungsional ini. Memperhatikan frekuensinya (seperti tertera pada Bab III), pengawasan fungsional ini pun secara umum mengalami penurunan. Di Jawa Barat pengawasan oleh BPKP menurun rata-rata 50%, sedangkan pengawasan oleh BPK meningkat rata-rata 50% juga; Di Jawa Timur pengawasan oleh BPKP menurun 40,3% dan oleh BPK menurun 31,8%; Di Yogyakarta pengawasan oleh BPKP dan BPK tidak mengalami perubahan; Di Sumatera Utara frekuensi pengawasan oleh BPKP menurun 15,4% dan oleh BPK tetap; Di Lampung frekuensi pengawasan oleh BPKP dan BPK masing masing menurun 8,0% dan 34,3%, Di NTB frekuensi pengawasan oleh BPKP naik 33,3% sedangkan oleh BPK tidak mengalami perubahan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa frekuensi pengawasan intern dan frekuensi pengawasan fungsional mengalami peningkatan. Meskipun frekuensinya mengalami penurunan, namun kualitasnya --seperti diakui oleh para pimpinan instansi-- mengalami peningkatan.

Meningkatnya kualitas pengawasan yang dibarengi oleh **menurunnya** frekuensi pengawasan menunjukkan bahwa: banyaknya pengawasan tidak menjamin efektivitas dan efisiensi pembangunan, bahkan tidak mustahil dengan banyaknya pengawasan justru membebani anggaran, menimbulkan pemborosan atau inefisiensi. Hal ini cukup logis, karena apabila pengawasan dilakukan terlalu sering terhadap suatu pekerjaan, akan mengakibatkan banyaknya waktu yang tersita bagi pengelola pekerjaan itu untuk mempersiapkannya. Selain itu pemborosan anggaran pun akan terjadi, karena diakui atau tidak bahwa biaya formal suatu pengawasan tidaklah sedikit, belum lagi ditambah biaya informal.

Pengawasan dikatakan berkualitas apabila mampu menindaklanjuti hasil yang diperoleh dari pengawasan tersebut. Dari jawaban responden yang telah dikompilasi, secara umum menunjukkan bahwa pada saat menghadapi

masalah sering laporan tidak dibuat atau diabaikan. Laporan sering hanya memuat yang baik-baik saja sehingga dari hasil pengawasan yang demikian, tidak pernah ada tindak lanjut perbaikan. Laporan tidak dapat dibuat tanpa adanya evaluasi. Secara umum menurut responden, hasil evaluasi tidak digunakan sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan selanjutnya.

Kelemahan lain yang diakui oleh instansi-instansi di Daerah adalah: Kurangnya pengarsipan terhadap berbagai dokumen kegiatan; Kurangnya peneguran atau pengenaan sangsi terhadap aparat yang melakukan penyimpangan atau penyelewengan; Kurangnya dilakukannya evaluasi pada setiap akhir kegiatan; Serta kurangnya kelengkapan isi laporan yang dibuat dalam memuat aspek-aspek yang perlu dalam laporan itu.

5. Program Peningkatan Kemampuan Mobilisasi Berbagai Sumber Keuangan Daerah

Memobilisasi sumber keuangan daerah dimaksudkan sebagai mengintensifkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak, retribusi, keuntungan BUMD, penerimaan dari dinas, bagi hasil pajak dan bukan pajak serta penerimaan lainnya. Di lain pihak mobilisasi keuangan daerah meliputi juga upaya optimalisasi penggunaan keuangan Daerah.

Untuk mengevaluasi keberhasilan program peningkatan kemampuan mobilisasi berbagai sumber keuangan daerah, diukur 10 (sepuluh) indikator. Kesepuluh indikator dan prosentase instansi yang telah mengalami peningkatan positif, serta peringkat keberhasilan setiap indikator dilihat dari jumlah instansi yang mengalami keberhasilan, dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8 Peringkat Keberhasilan Indikator-indikator Program Peningkatan Kemampuan Mobilisasi Berbagai Sumber Keuangan Daerah

ITEM	PROSENTASE INSTANSI/UNIT KERJA YG TELAH MENGALAMI PENINGKATAN	PERINGKAT/ RANKING KEBERHASILAN SETIAP INDIKATOR
1. Intensifikasi sumber keuangan yang telah ada (pengoptimalan sumber dana yang ada)	70.2	1
2. Ekstensifikasi sumber dana dengan perluasan jangkauan sumber yang telah ada	62.7	4
3. Diversifikasi sumber dana dengan menggali sumber dana baru.	53.8	8
4. Peningkatan PAD dari mengintensifkan sumber pendapatan yang berasal dari laba BUMD	31.8	10
5. Peningkatan intensitas usaha BUMD melalui peningkatan modal, peningkatan kualitas SDM, perluasan dan diversifikasi pasar, serta diversifikasi produk	46.2	9
6. Peningkatan PAD dengan pengintensifan sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah	62.0	5
7. Peningkatan efisiensi dan pengelolaan bantuan termasuk Inpres serta pinjaman	58.9	6
8. Peningkatan keikutsertaan swasta dalam pembangunan Daerah	57.9	7
9. Pengoptimalan penggunaan keuangan Daerah	67.8	2
10. Perbaikan pengelolaan keuangan Daerah	66.4	3
RATA-RATA PROSENTASE	57.8	

Sumber: Jawaban responden, kuesioner, diolah.

Secara umum program peningkatan kemampuan mobilisasi berbagai sumber keuangan daerah, masih kurang berhasil. Sebanyak 3 indikator yang peningkatannya telah dialami oleh lebih dari 65% instansi sampel di Daerah. Ketiga indikator tersebut adalah: (1) Intensifikasi sumber keuangan yang telah ada (pengoptimalan sumber dana yang ada); (2) Pengoptimalan penggunaan keuangan Daerah; Dan (3) perbaikan pengelolaan keuangan Daerah.

Lima indikator yang peningkatannya hanya dialami oleh kurang dari 60% instansi di Daerah adalah: (1) Diversifikasi sumber dana dengan menggali sumber dana baru; (2) Peningkatan PAD dari mengintensifkan sumber pendapatan yang berasal dari laba BUMD; (3) Peningkatan intensitas usaha BUMD melalui peningkata modal, peningkatan kualitas SDM, perluasan dan diversifikasi pasar, serta diversifikasi produk; (4) Peningkatan efisiensi dan pengelolaan bantuan termasuk Inpres serta pinjaman; (5) Peningkatan keikutsertaan swasta dalam pembangunan Daerah.

Upaya diversifikasi sumber dana masih kurang dilaksanakan oleh Daerah. Mereka banyak terpaku kepada sumber-sumber yang telah ada. Disamping kurangnya kreatifitas, juga dalam kenyataannya potensi sumber keuangan yang potensial telah banyak diambil oleh Pusat. Alhasil, pelaksanaan otonomi Daerah Tingkat II yang selama ini sedang dipersiapkan, akan mendapat hambatan terutam dalam hal keuangan.

Sumber keuangan Daerah yang secara yuridis ditetapkan dalam UU Nomor 5 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, belum semuanya dapat dioptimalkan. Laba BUMD misalnya, belum dapat diandalkan dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, bahkan tidak sedikit BUMD yang rugi. Menurut data yang diperoleh, peningkatan PAD dari pengintensifan sumber pendapatan yang berasal dari laba BUMD masih belum dirasakan. Hanya 31,8% daerah yang telah merasakan kontribusi peningkatan laba BUMD ini.

Adapun faktor penyebab lemahnya peran BUMD ini, seperti dikemukakan responden adalah kurangnya upaya peningkata modal, kualitas

SDM, perluasan dan diversifikasi pasar, serta diversifikasi produk. Modal BUMD sangat tergantung kepada kekayaan Daerah yang dipisahkan. Akumulasi dari sebagian laba untuk dijadikan tambahan modal tidak memungkinkan. Sumber Daya Manusia BUMD banyak didominasi oleh lulusan SD, SLTP dan SLTA. Demikian juga jenis usaha yang dilakukan BUMD terbatas kepada jenis-jenis usaha tertentu saja seperti air minum, kebersihan, dan lain-lain.

Keikutsertaan swasta dalam pembangunan Daerah jika belum memperlihatkan peran yang cukup baik. Swasta masih banyak mengkonsentrasi usahanya di Pusat atau kota-kota besar, dan terbatas pada usaha-usaha tertentu yang secara ekonomis dapat memberikan keuntungan yang tinggi. Kemitraan antara pemerintah Daerah dengan Pengusaha Swasta belum terjalin dengan baik.

6. Program Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat

Untuk mengevaluasi keberhasilan program peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, diukur 5 (lima) indikator. Kelima indikator dan prosentase instansi yang telah mengalami peningkatan positif, serta peringkat keberhasilan setiap indikator dilihat dari jumlah instansi yang mengalami keberhasilan, dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9 Peringkat Keberhasilan Indikator-indikator Program
Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat

ITEM	PROSENTASE INSTANSI/UNIT KERJA YG TELAH MENGALAMI PENINGKATAN	PERINGKAT/ RANKING KEBERHASILAN SETIAP INDIKATOR
1. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat	87.7	1
2. Pemberian penerangan kepada masyarakat, mengenai kebijaksanaan pemerintah.	86.6	3
3. Ketanggapan aparat terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang	87.0	2
4. Penjelasan kepada masyarakat mengenai pembangunan serta manfaat langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat	84.3	4
5. Penyiapan dukungan dan pembinaan gerakan peranserta masyarakat terhadap program-program pembangunan	83.9	5
RATA-RATA PROSENTASE	85.9	

Sumber: Jawaban responden, kuesioner, diolah.

Secara umum program peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, telah mengalami peningkatan hampir di seluruh instansi. Namun demikian diantara kelima indikator tersebut, dua diantaranya menduduki peringkat paling bawah yaitu: Pemberian penjelasan kepada masyarakat mengenai pembangunan serta manfaat langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat, dan penyiapan dukungan dan pembinaan gerakan peranserta masyarakat terhadap program-program pembangunan di Daerah.

7. Program Pembentukan/Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Untuk mengevaluasi keberhasilan program pembentukan/penyempurnaan peraturan perundang-undangan Daerah, diukur 4 (empat)

indikator. Keempat indikator dan prosentase instansi yang telah mengalami peningkatan positif, serta peringkat keberhasilan setiap indikator dilihat dari jumlah instansi yang mengalami keberhasilan, dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10 Peringkat Keberhasilan Indikator-indikator Program Pembentukan/Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan Daerah

ITEM	PROSENTASE INSTANSI/UNIT KERJA YG TELAH MENGALAMI PENINGKATAN	PERINGKAT/ RANKING KEBERHASILAN SETIAP INDIKATOR
1. Pembentukan peraturan perundang-undangan baru dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan di daerah	65.1	1
2. Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	61.3	3
3. Penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan daerah yang sudah tidak relevan dengan situasi dan kondisi	64.4	2
4. Penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat	60.3	4
RATA-RATA PROSENTASE	62.8	

Sumber: Jawaban responden, kuesioner, diolah.

Sekitar 62,8% Daerah Tingkat II sampel telah mencapai peningkatan positif dalam upaya pembentukan dan penyempurnaan peraturan-perundang-undangan Daerah. Berdasarkan 4 indikator yang diukur, pembentukan peraturan perundang-undangan baru dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan di daerah menduduki peringkat pertama. Sementara itu, penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan

daerah sesuai dengan tuntutan dan partisipasi masyarakat, menduduki peringkat terakhir dari 4 indikator itu.

Penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan masih dirasakan belum sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, agar peraturan-perundangan dapat berperan mewujudkan ketertiban hukum, pengayoman hukum, dan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan keadilan yang makin merata, maka haruslah memperhatikan keserasian strategi pembangunan hukum yang memperhatikan faktor historis dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, pada saat pembentukan perangkat hukum tersebut.

Kondisi demikian menunjukkan, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, mengatur masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan lain-lain, Daerah lebih berorientasi kepada pembentukan peraturan perundang-undangan baru, ketimbang menyempurnakan peraturan yang telah ada. Dampak dari hal ini, banyak peraturan yang kurang sesuai tetapi tidak dicabut pemberlakumannya, namun di lain pihak juga banyak peraturan-peraturan baru.

8. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tersebut, untuk penyempurnaan aspek ketatalaksanaan Aparatur Negara di Daerah pada masa yang akan datang, selain melanjutkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah relatif berhasil, juga perlu ditempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan dengan prioritas sebagai berikut:

1. *Peningkatan kemampuan memobilisasi berbagai sumber keuangan daerah*, dengan orientasi kepada: (1) Diversifikasi sumber dana dengan menggali sumber dana baru; (2) Peningkatan peran BUMD, peningkatan modal, peningkatan kualitas SDM, perluasan dan diversifikasi pasar, serta diversifikasi produk; (3) Peningkatan efisiensi dan pengelolaan bantuan termasuk Inpres serta pinjaman; (4) Peningkatan peran serta swasta dalam pembangunan Daerah.

2. *Penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan di Daerah*, dengan orientasi terutama kepada penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan tuntutan dan partisipasi masyarakat.
3. *Peningkatan kualitas pelaksanaan program*, dengan orientasi kepada: (1) Penyederhanaan mekanisme dan prosedur perizinan kegiatan dunia usaha di daerah-daerah Tk.II; (2) Peningkatan kesesuaian kualifikasi sumber daya manusia dengan kebutuhan proyek/kegiatan; (3) Peningkatan ketepatan jumlah material dengan kebutuhan proyek/kegiatan; dan (4) Pengembangan sistem informasi manajemen pembangunan daerah.
4. *Peningkatan kualitas pengawasan dan evaluasi*, serta tindak lanjut dari hasil pengawasan dan evaluasi tersebut, dengan orientasi kepada: (1) Pembudayaan pelaporan apabila menghadapi masalah; (2) Objektivitas pelaporan, dan tindak lanjut dari hasil pengawasan itu; (3) Pemanfaatan hasil evaluasi untuk bahan perbaikan bagi kegiatan selanjutnya; (4) Peningkatan pengarsipan terhadap berbagai dokumen kegiatan; (5) Pengefektifan peneguran atau pengenaan sangsi terhadap aparat yang melakukan penyimpangan atau penyelewengan; (6) Pembudayaan evaluasi pada setiap akhir kegiatan; Serta (7) Peningkatan kelengkapan isi laporan yang dibuat dalam memuat aspek-aspek yang perlu dalam laporan itu.
5. *Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Daerah*, dengan orientasi kepada: (1) Penyempurnaan pelaksanaan mekanisme *bottom up planning* dan penggunaan proyek-proyek yang sudah dilaksanakan bagi perencanaan selanjutnya; (2) Peningkatan dukungan kualitas sumber daya manusia dalam perencanaan di Daerah; (3) Peningkatan sumber dana untuk mendukung perencanaan yang telah ditetapkan.
6. *Peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah di Daerah dalam melaksanakan pembangunan*, dengan orientasi kepada: (1) Keterpaduan berbagai kegiatan sejenis dan berkaitan, serta keserasian jadual pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai instansi; (2) Keserasian berbagai kegiatan dengan kegiatan lainnya yang sama-sama merupakan tugas suatu instansi.
7. *Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat*, dengan orientasi kepada: (1) Pemberian penjelasan kepada masyarakat mengenai pembangunan

serta manfaat langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat; (2) Penyiapan dukungan dan pembinaan gerakan peranserta masyarakat terhadap program-program pembangunan di Daerah

C. Aspek Kelembagaan

Berkenaan dengan aspek kelembagaan, diukur keberhasilan program penataan kembali batas wilayah dan daerah dalam rangka pemekaran dan penyesuaian status daerah tertentu, serta program peningkatan kemampuan lembaga dan organisasi masyarakat. Pengukuran keberhasilan kedua program tersebut, dilakukan secara parsial terhadap beberapa indikatornya.

1. Program Penataan Kembali Batas Wilayah dan Daerah Dalam Rangka Pemekaran dan Penyesuaian Status Daerah Tertentu

Untuk mengevaluasi keberhasilan program penataan kembali batas wilayah dan daerah dalam rangka pemekaran dan penyesuaian status daerah tertentu, diukur 2 (dua) indikator. Kedua indikator dan prosentase instansi yang sudah berhasil dalam kedua indikator tersebut, serta ranking keberhasilan setiap indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut ini:

Tabel 4.11 Peringkat Keberhasilan Indikator-indikator Program Penataan Kembali Batas Wilayah dan Daerah Dalam Rangka Pemekaran dan Penyesuaian Status Daerah Tertentu

ITEM	PROSENTASE INSTANSI/UNIT KERJA YG TELAH MENGALAMI PENINGKATAN	PERINGKAT/ RANKING KEBERHASILAN SETIAP INDIKATOR
1. Optimalisasi penataan kembali batas wilayah dan daerah	34.9	2
2. Manfaat penataan kembali batas wilayah dan daerah bagi peningkatan efisiensi pelaksanaan pembangunan dan administrasi pemerintahan	37.7	1
RATA-RATA PROSENTASE	36.3	

Sumber: Jawaban responden, kuesioner, diolah.

Dari dua indikator ini, terlihat bahwa penataan kembali batas wilayah dan daerah belum optimal dilaksanakan. Artinya, secara umum keberadaan daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang lebih kecil dalam suatu Kabupaten DT.II yang ada saat ini sudah kurang relevan lagi dengan tuntutan perkembangan. Dimaklumi, bahwa selama beberapa tahun telah terjadi perkembangan-perkembangan dalam komponen-komponen pembentukan suatu Daerah atau wilayah pemerintahan, antara lain adalah jumlah penduduk yang meningkat cepat. Perkembangan ini menuntut penataan kembali batas-batas daerah dan wilayah yang ada.

Sebenarnya, penataan kembali batas daerah dan batas wilayah telah dilakukan, namun dibandingkan dengan tuntutan yang semakin tinggi penataan yang telah dilakukan itu belum optimal. Hasil penataan yang telah dilakukan diakui oleh 37,7% Daerah yang menjadi sampel, telah dirasakan manfaatnya.

Kekurangmanfaatan penataan batas wilayah, disebabkan oleh tidak sesuainya penataan wilayah tersebut dengan fungsi pengembangan wilayah. Fungsi pengembangan wilayah pada dasarnya: *Pertama*, agar kota mampu mampu mengakomodasi penyebaran penduduk serta sarana dan prasarana sesuai dengan kapasitas daya tampung yang direncanakan oleh pengembangan kota; *Kedua*, agar kota mampu berfungsi sebagai salah satu pusat pelayanan bagi pengembangan wilayah kabupaten. *Ketiga*, agar kota mampu melayani penduduk yang ada di dalam maupun di sekitarnya, terutama yang menyangkut kebutuhan lahan untuk perumahan dan pemukiman, sarana dan prasarana sosial ekonomi, dan transportasi.

2. Program Peningkatan Kemampuan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Untuk mengevaluasi keberhasilan program peningkatan kemampuan lembaga dan organisasi masyarakat, diukur 4 (empat) indikator. Keempat indikator dan prosentase instansi yang sudah berhasil dalam kedua indikator tersebut, serta ranking keberhasilan setiap indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut ini:

Tabel 4.12 Peringkat Keberhasilan Indikator-indikator Program Peningkatan Kemampuan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

ITEM	PROSENTASE INSTANSI/UNIT KERJA YG TELAH MENGALAMI PENINGKATAN	PERINGKAT/ RANKING KEBERHASILAN SETIAP INDIKATOR
1. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi kemasyarakatan	51.0	1
2. Pemanfaatan organisasi kemasyarakatan sebagai agen pembangunan	48.3	3
3. Peningkatan kemanfaatan organisasi kemasyarakatan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat	48.0	4
4. Peningkatan relevansi misi dan tujuan organisasi kemasyarakatan dengan kebutuhan masyarakat	49.3	2
RATA-RATA PROSENTASE	49.2	

Sumber: Jawaban responden, kuesioner, diolah.

Secara umum program peningkatan kemampuan lembaga dan organisasi masyarakat masih kurang berhasil. Untuk semua indikator, instansi yang telah mencapai peningkatan kurang dari 60%. Indikator program yang paling sedikit dapat dicapai oleh instansi-instansi di Daerah adalah pemanfaatan organisasi kemasyarakatan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, dan pemanfaatan organisasi kemasyarakatan sebagai agen pembangunan.

Pemanfaatan organisasi kemasyarakatan sebagai agen pembangunan belum berhasil. Begitu juga manfaat organisasi kemasyarakatan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini disebabkan belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi kemasyarakatan yang seharusnya, yaitu:

1. Mengadakan pembinaan politik kepada generasi muda yang tergabung dalam OKFP (Organisasi Kemasyarakatan Fungsional Pemuda), maupun yang di luar OKFP;
2. Mengadakan kunjungan kerja kepada Ormas untuk mengenal lebih dekat keberadaan organisasi kemasyarakatan;
3. Mengadakan kunjungan kerja kepada Ormas untuk mengenal lebih dekat keberadaan organisasi kemasyarakatan;
4. Mengadakan pengarahan/pembinaan kepada Ormas pada waktu Musda/Muscab atau pada waktu hari ulang tahun berdirinya organisasi;
5. Memberikan bantuan fasilitas baik berupa dana atau sarana;
6. Memberikan petunjuk pada waktu audiensi kepada Ormas oleh Walikota.

3. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tersebut, untuk penyempurnaan aspek kelembagaan Aparatur Negara di Daerah pada masa yang akan datang, selain melanjutkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah relatif berhasil, juga perlu ditempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Penataan Kembali Batas Wilayah dan Daerah Dalam Rangka Pemekaran dan Penyesuaian Status Daerah Tertentu, baik dari segi jumlahnya maupun dari segi kemanfaatannya bagi peningkatan efisiensi pelaksanaan pembangunan dan administrasi pemerintahan;
2. Peningkatan Kemampuan Lembaga dan Organisasi Masyarakat, dengan urutan prioritas: (1) Peningkatan kemanfaatan organisasi kemasyarakatan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat; (2) Pemanfaatan organisasi kemasyarakatan sebagai agen pembangunan; (3) Peningkatan relevansi misi dan tujuan organisasi kemasyarakatan dengan kebutuhan masyarakat; (4) Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi kemasyarakatan.

B A B V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian evaluasi Midterm Repelita VI (tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-3) Sektor Aparatur Negara di Daerah, dilakukan terhadap tiga aspek yaitu Aspek Kepegawaian, Aspek Ketatalaksanaan dan Pengawasan, dan Aspek Kelembagaan. Berdasarkan ketiga aspek tersebut, dievaluasi 11 (sebelas) program sesuai dengan yang dicanangkan dalam Repelita VI.

Hasil evaluasi terhadap kesebelas program tersebut menunjukkan bahwa, keberhasilan yang paling tinggi, adalah dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Dari seluruh instansi yang dievaluasi 85,9% instansi telah mengalami peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sementara itu, 3 (tiga) program yang terlihat masih kurang berhasil adalah Program penataan kembali batas wilayah dan daerah dalam rangka pemekaran dan penyesuaian status daerah tertentu; Program peningkatan kemampuan lembaga dan organisasi masyarakat; serta Program peningkatan kemampuan memobilisasi berbagai sumber keuangan daerah. Sedangkan kinerja setiap program adalah sebagai berikut:

1. *Program Peningkatan Kemampuan Pegawai*; Kualitas sumber daya manusia aparatur tercermin antara lain dari tingkat pendidikan dan jenis diklat yang pernah diikuti. Berdasarkan tingkat pendidikannya, sebagian besar pegawai berpendidikan maksimal SLTA baik pada Pelita V maupun pada tahun ke-3 Repelita VI. Secara absolut pegawai berdasarkan semua jenjang pendidikan cenderung mengalami peningkatan. Sementara itu, jumlah pegawai yang telah mengikuti berbagai jenis diklat baik diklat struktural maupun diklat teknis fungsional dan teknis manajemen, juga secara umum mengalami peningkatan. Peningkatan paling tinggi secara absolut terjadi pada jenis diklat teknis fungsional dan teknis manajemen. Kondisi semacam ini,

menunjukkan bahwa pada masa yang akan datang perlu ditempuh kebijaksanan peningkatan kemampuan pegawai melalui berbagai pendidikan bergelar dan berbagai diklat.

Pada instansi-instansi Daerah Tingkat II tertentu, nampak terjadi perubahan eselon dari akhir Repelita V ke tahun ke-3 Repelita VI. Ini antara lain sejalan dengan adanya persiapan otonomi daerah, dengan pembentukan dinas-dinas baru. Secara logis, tuntutan ini perlu diantisipasi dengan penyiapan sumber daya manusianya. Artinya apabila eselonnya bertambah, maka perlu diimbangi dengan pendidikan dan pelatihan yang disyaratkan untuk menduduki eselon tersebut.

Meskipun jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari rata-ratanya masih rendah. Rata-rata jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Sepama/Sepadya misalnya belum mencapai 1, ini menunjukkan bahwa sebagian pejabat eselon III (seperti Kepala Dinas) belum mengikuti diklat Sepama/Sepadya yang semestinya menjadi syarat untuk menduduki jabatan itu.

Berdasarkan data-data kuantitatif, kemampuan Pegawai Kabupaten/Kodya DT.II secara umum telah mengalami peningkatan dari Akhir Repelita V Sampai Tahun Ke-3 Repelita VI. Kekurangan yang agak menonjol terutama dalam hal Peningkatan kualitas SDM melalui pengikutsertaan dalam berbagai pendidikan berjenjang dalam dan luar negeri, serta dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi kemasyarakatan formal.

2. *Program peningkatkan disiplin pegawai/aparatur;* Program ini telah banyak dilakukan oleh semua instansi, dan hasilnya pun dapat dilihat terjadi peningkatan disiplin. Kekurangan yang masih ada terutama dalam hal pengenaan sangsi atau teguran bagi pegawai yang melanggar disiplin, seperti terlambat masuk, pulang sebelum waktunya, atau keluar kantor pada jam kerja; kemudian dalam pemberian motivasi berupa

materi, untuk meningkatkan disiplin pegawai; serta dalam upaya penghilangan calo-calo atau makelar dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

3. *Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan*; Sasaran yang dibuat dalam setiap perencanaan secara umum sudah jelas, demikian juga perencanaan yang dibuat sebagian besar disusun berdasarkan data-data yang dikumpulkan terlebih dahulu. Rencana yang dibuat pun, di atas kertas sudah relevan dengan tuntutan masyarakat.

Kelemahan yang paling nampak dari upaya peningkatan kualitas perencanaan ini adalah kurang berjalannya mekanisme *bottom up planning* dan penggunaan proyek-proyek yang sudah dilaksanakan bagi perencanaan selanjutnya. Berdasarkan informasi ini dapat diinterpretasi bahwa mekanisme Rakorbang yang selama ini diandalkan sebagai upaya *bottom up planning* belum efektif.

Kelemahan lain juga terlihat dari kurangnya dukungan sumber daya dan sumber dana untuk mendukung perencanaan yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia di Daerah Tingkat II masih kurang memadai baik dilihat dari segi kuantitas dan terutama dari segi kualitas. Sebagian besar pegawai DT.II didominasi oleh pegawai yang berpendidikan SD, SLTP, dan SLTA.

4. *Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Program*; Dari sisi pelaksanaan, dan turunnya anggaran proyek, terdapat instansi yang tidak pernah mengalami keterlambatan baik dalam memulai, menyelesaikan, maupun dalam menerima anggaran proyek. Namun demikian, sebagian besar instansi mengalami keterlambatan. Dalam memulai pekerjaan, keterlambatan maksimum yang dialami oleh instansi pada umumnya selama 6 (enam) bulan. Kemudian dalam penyelesaian proyek, keterlambatan maksimum secara umum selama satu tahun. Sedangkan dalam menerima anggaran, keterlambatan maksimum yang dialami instansi atau dinas-dinas daerah umumnya adalah selama 6 bulan.

Keterlambatan-keterlambatan ini, secara tidak langsung akan berdampak terhadap kualitas output proyek yang dihasilkan. Keterlambatan dalam memulai pekerjaan atau dalam turunnya anggaran misalnya, akan menyebabkan proyek dikerjakan dengan terburu-buru karena berupaya mencapai target waktu. Hal ini pada akhirnya akan mengabaikan kualitas dari proyek itu sendiri, atau paling tidak kualitas yang dihasilkan tidak akan optimal.

Meskipun sering terjadi keterlambatan dalam memulai pekerjaan, penyelesaian pekerjaan, atau dalam turunnya anggaran, namun secara umum telah terjadi peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan proyek dan program. Hasil dari upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dapat dilihat dengan adanya perubahan dari Repelita V ke Repelita VI ini. Kekurangan yang masih ada terutama dalam hal: kurangnya dukungan sumber daya dan sumber dana terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan; kurang berjalannya mekanisme bottom up dalam perencanaan; dan kurang dilaksanakannya upaya pengumpulan data yang diperlukan untuk menyusun perencanaan pembangunan.

Sementara itu, dilihat dari kualitas pelaksanaan program, juga sudah menunjukkan terjadinya peningkatan dari Repelita V ke Repelita VI. Kekurangan yang masih ada terutama dalam hal: kurang tepatnya waktu memulai pelaksanaan pekerjaan; kurangnya pengembangan sistem informasi manajemen pembangunan daerah; mekanisme dan prosedur perizinan kegiatan dunia usaha di daerah-daerah Tk.II masih relatif rumit; kurang tepatnya penyelesaian kegiatan sesuai dengan penjadualan yang telah ditetapkan; kurang sesuaiannya penyediaan jumlah sumber daya manusia dengan kebutuhan proyek/kegiatan; kurang sesuaiannya kualifikasi sumber daya manusia dengan kebutuhan proyek/kegiatan; kurang sesuaiannya jumlah dan kualitas material dengan kebutuhan proyek/kegiatan; serta kurang cukupnya jumlah anggaran.

5. *Program Peningkatan Koordinasi Antar Instansi Pemerintah di Daerah;* Dalam rangka meningkatkan koordinasi pembangunan baik

dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan, serta evaluasinya, secara umum hampir semua instansi melaksanakan rapat koordinasi selain Rakorbang. Adapun rapat-rapat yang dilaksanakan oleh setiap instansi bermacam-macam, sesuai dengan substansi tugas pokok dan fungsinya, namun pada dasarnya semua itu dilaksanakan dalam rangka koordinasi. Meskipun rapat-rapat koordinasi sering dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya ketidakterpaduan dan ketidakserasan kegiatan yang dilakukan suatu instansi dengan instansi lain yang terkait sering ditemukan. Bahkan, kadang ditemukan pula ketidakterpaduan dua atau lebih kegiatan yang dilakukan oleh suatu instansi. Hal ini menunjukkan bahwa rapat-rapat koordinasi termasuk Rakorbang belum efektif dilaksanakan. Kalupun secara kuantitas sering dilaksanakan, namun dari sisi kualitas belum sesuai dengan harapan.

Upaya peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah di daerah dalam melaksanakan pembangunan sudah dilaksanakan, dan dampaknya pun sudah terlihat. Kekurangan yang ada terutama dalam hal: Pertama, kurangnya keterpaduan berbagai kegiatan sejenis dan berkaitan, serta kurangnya keserasian jadual pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai instansi. Kedua, kurangnya keserasian berbagai kegiatan dengan kegiatan lainnya yang sama-sama merupakan tugas suatu instansi.

6. *Program Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Evaluasi;* Terdapat 2 pengawas fungsional yang biasa melakukan pengawasan kepada instansi-instansi yang ada di daerah yaitu BPK dan BPKP. Sementara itu, pengawasan internal biasa dilakukan oleh Itwilprop, Itwilcab/Kod, dan Itjen. Pengawasan lainnya dilakukan oleh atasan terhadap bawahan (Waskat). Pengawasan fungsional dan pengawasan internal, tidak merata dilakukan terhadap semua instansi. Secara kumulatif dalam satu tahun, terdapat instansi yang mendapat pengawasan sering sekali, hampir semua pengawas melakukannya. Tetapi ada pula instansi yang mendapatkan pengawasan oleh salah satu atau tidak semua instansi pengawas, bahkan ada pula yang tidak pernah mendapat pengawasan.

Pengawasan melekat pun belum merata dilaksanakan oleh semua instansi.

Meskipun demikian, dilihat dari sisi kualitas, upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan dan evaluasi, serta tindak lanjut dari hasil pengawasan dan evaluasi tersebut telah dilakukan, baik pengawasan fungsional, pengawasan internal, maupun pengawasan melekat. Kekurangan yang masih nampak terutama dalam hal: Pelaporan insidental jika menghadapi masalah, jarang dilakukan dengan segera; kurang baiknya pengarsipan terhadap berbagai dokumen kegiatan; dan kurangnya teguran atau pengenaan sangsi terhadap aparat yang melakukan penyimpangan atau penyelewengan.

7. *Program Peningkatan Kemampuan Memobilisasi Berbagai Sumber Keuangan Daerah*; Program ini nampaknya telah dilakukan oleh hampir semua daerah, namun hasilnya masih jauh dari sasaran. Beberapa kekurangan terutama dalam hal; kurangnya upaya penggalian sumber dana baru; dan kurangnya upaya pengintensifan sumber pendapatan yang berasal dari laba BUMD.
8. *Program Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat*; Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu program yang dicanangkan pada Repelita VI. Program ini pun telah dilakukan oleh instansi-instansi di DT.II. Bahkan secara umum program ini berdasarkan informasi dari pimpinan-pimpinan instansi Daerah Tingkat II merupakan program yang paling mencapai keberhasilan. Kelemahan yang masih nampak terutama dalam hal pemberian penerangan kepada masyarakat, mengenai kebijaksanaan pemerintah.
9. *Program pembentukan atau penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan di Daerah atau yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi instansi*; Upaya pembentukan atau penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan di Daerah atau yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi instansi, juga telah dilakukan.

Kekurangan yang masih nampak terutama dalam hal upaya pembentukan peraturan perundang-undangan baru dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan di daerah. Demikian pula program penataan kembali batas wilayah dan daerah dalam rangka pemekaran dan penyesuaian status daerah tertentu, serta peningkatan kemampuan lembaga dan organisasi masyarakat, juga telah dilakukan di daerah. Namun hasilnya masih belum optimal.

10. *Program Penataan Kembali Batas Wilayah dan Daerah Dalam Rangka Pemekaran dan Penyesuaian Status Daerah Tertentu;* Secara umum keberadaan daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang lebih kecil dalam suatu Kabupaten DT.II yang ada saat ini sudah kurang relevan lagi dengan tuntutan perkembangan. Dimaklumi, bahwa selama beberapa tahun telah terjadi perkembangan-perkembangan dalam komponen-komponen pembentukan suatu Daerah atau wilayah pemerintahan, antara lain adalah jumlah penduduk yang meningkat cepat. Perkembangan ini menuntut penataan kembali batas-batas daerah dan wilayah yang ada.

Penataan kembali batas daerah dan batas wilayah telah dilakukan, namun dibandingkan dengan tuntutan yang semakin tinggi penataan yang telah dilakukan itu belum optimal. Hasil penataan yang telah dilakukan diakui oleh 37,7% Daerah yang menjadi sampel, telah dirasakan manfaatnya, sementara 62,3% Daerah lainnya kurang merasakan manfaat penataan wilayah tersebut. Kekurangmanfaatan penataan batas wilayah, disebabkan oleh tidak sesuainya penataan wilayah tersebut dengan fungsi pengembangan wilayah yang seharusnya.

11. *Program Peningkatan Kemampuan Lembaga dan Organisasi Masyarakat;* Secara umum program peningkatan kemampuan lembaga dan organisasi masyarakat masih kurang berhasil. Untuk semua indikator, instansi yang telah mencapai peningkatan kurang dari 60%. Indikator program yang paling sedikit dapat dicapai oleh instansi-instansi

di Daerah adalah pemanfaatan organisasi kemasyarakatan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, dan pemanfaatan organisasi kemasyarakatan sebagai agen pembangunan. Hal ini disebabkan belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi kemasyarakatan sesuai dengan yang seharusnya.

Pada akhirnya, tingkat keberhasilan program salah satunya dapat dilihat dari realisasi fisik dari program tersebut sesuai dengan rencana yang telah dicanangkan, yang biasanya tertera dengan jelas dalam Sasaran Repelita (SARLITA) yang telah dibuatnya. Dengan membandingkan sasaran tersebut dengan realisasi program yang telah terlaksana, rata-rata program repelita VI baru terealisasi antara 13% sampai dengan 80%. Apabila dibandingkan dengan paruh waktu yang telah dilalui dalam Repelita VI ini, yaitu selama 3 Tahun, maka pencapaian sasaran Repelita VI seyogianya telah mencapai sekitar 60%. Jadi, berdasarkan data yang diperoleh, masih terdapat instansi yang lamban dalam penyelesaian programnya, sementara itu terdapat pula instansi yang cepat dalam penyelesaian programnya.

B. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka untuk meningkatkan kualitas kinerja Sektor Aparatur Negara di Daerah pada masa yang akan datang, selain melanjutkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah relatif berhasil, juga perlu ditempuh melalui kebijaksanaan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kualitas Aparatur perlu ditempuh melalui kebijaksanaan: (1) Peningkatan program pendidikan berjenjang (bergelar) bagi pegawai, baik di dalam maupun di Luar Negeri; (2) Peningkatan kualitas SDM pada organisasi-organisasi kemasyarakatan formal, baik melalui pendidikan bergelar, maupun diklat-diklat, kursus-kursus, penataran, serta pengikutsertaan dalam berbagai forum ilmiah lainnya; (3) Peningkatan muatan materi diklat dan peningkatan kesesuaian materi diklat dengan tuntutan pekerjaan. Oleh karena itu, sebelum

- diselenggarakan susu diklat perlu dilakukan *training needs* terlebih dahulu; (4) Pemberian penghargaan bagi pegawai yang berdisiplin; (5) Penghilangan calo-calo atau makelar dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta Penghapusan pungutan-pungutan liar dalam rangka menciptakan aparatur yang berdisiplin, bersih, dan berwibawa. Untuk itu, perlu percontohan yang positif dari pihak atasan dalam segala hal.
2. Untuk penyempurnaan aspek ketatalaksanaan Aparatur Negara di Daerah, perlu ditempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan dengan prioritas sebagai berikut:
- Prioritas pertama*; Peningkatan kemampuan memobilisasi berbagai sumber keuangan daerah, dengan orientasi kepada: (1) Diversifikasi sumber dana dengan menggali sumber dana baru; (2) Peningkatan peran BUMD peningkatan modal, peningkatan kualitas SDM, perluasan dan diversifikasi pasar, serta diversifikasi produk; (3) Peningkatan efisiensi dan pengelolaan bantuan termasuk Inpres serta pinjaman; (4) Peningkatan peran serta swasta dalam pembangunan Daerah.
 - Prioritas kedua*; Penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan di Daerah, dengan orientasi terutama kepada penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan tuntutan dan partisipasi masyarakat.
 - Prioritas ketiga*; Peningkatan kualitas pelaksanaan program, dengan orientasi kepada: (1) Penyederhanaan mekanisme dan prosedur perizinan kegiatan dunia usaha di daerah-daerah Tk.II; (2) Peningkatan kesesuaian kualifikasi sumber daya manusia dengan kebutuhan proyek/kegiatan; (3) Peningkatan ketepatan jumlah material dengan kebutuhan proyek/kegiatan; dan (4) Pengembangan sistem informasi manajemen pembangunan daerah.
 - Prioritas keempat*; Peningkatan kualitas pengawasan dan evaluasi, serta tindak lanjut dari hasil pengawasan dan evaluasi tersebut, dengan orientasi kepada: (1) Pembudayaan pelaporan apabila menghadapi masalah; (2) Objektivitas pelaporan, dan tindak lanjut dari hasil pengawasan itu; (3) Pemanfaatan hasil evaluasi untuk bahan perbaikan

bagi kegiatan selanjutnya; (4) Peningkatan pengarsipan terhadap berbagai dokumen kegiatan; (5) Pengefektifan peneguruan atau pengenaan sangsi terhadap aparat yang melakukan penyimpangan atau penyelewengan; (6) Pembudayaan evaluasi pada setiap akhir kegiatan; Serta (7) Peningkatan kelengkapan isi laporan yang dibuat dalam memuat aspek-aspek yang perlu dalam laporan itu.

- e. *Prioritas kelima*; Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Daerah, dengan orientasi kepada: (1) Penyempurnaan pelaksanaan mekanisme *bottom up planning* dan penggunaan proyek-proyek yang sudah dilaksanakan bagi perencanaan selanjutnya; (2) Peningkatan dukungan kualitas sumber daya manusia dalam perencanaan di Daerah; (3) Peningkatan sumber dana untuk mendukung perencanaan yang telah ditetapkan.
 - f. *Prioritas keenam*; Peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah di Daerah dalam melaksanakan pembangunan, dengan orientasi kepada: (1) Keterpaduan berbagai kegiatan sejenis dan berkaitan, serta keserasian jadual pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai instansi; (2) Keserasian berbagai kegiatan dengan kegiatan lainnya yang sama-sama merupakan tugas suatu instansi.
 - g. *Prioritas ketujuh*; Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, dengan orientasi kepada: (1) Pemberian penjelasan kepada masyarakat mengenai pembangunan serta manfaat langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat; (2) Penyiapan dukungan dan pembinaan gerakan peranserta masyarakat terhadap program-program pembangunan di Daerah
3. Untuk penyempurnaan aspek kelembagaan Aparatur Negara di Daerah perlu ditempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan: *Pertama*, Penataan Kembali Batas Wilayah dan Daerah Dalam Rangka Pemekaran dan Penyesuaian Status Daerah Tertentu, baik dari segi jumlahnya maupun dari segi kemanfaatannya bagi peningkatan efisiensi pelaksanaan pembangunan dan administrasi pemerintahan; *Kedua*, Peningkatan Kemampuan Lembaga dan Organisasi Masyarakat, dengan urutan prioritas: (1) Peningkatan

kemanfaatan organisasi kemasyarakatan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat; (2) Pemanfaatan organisasi kemasyarakatan sebagai agen pembangunan; (3) Peningkatan relevansi misi dan tujuan organisasi kemasyarakatan dengan kebutuhan masyarakat; (4) Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryant, Carolie & Louise G. White, *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Djumara, Noorsyamsa, *Menuju Format Baru Pelayanan Umum*, Lembaga Administrasi Negara, 1994.
- Kunarjo, *Perencanaan Dan Pembiayaan Pembangunan*, UI-Press, Jakarta, 1992.
- Lembaga Administrasi Negara, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Haji Masagung, Jakarta, 1993.
- Lembaga Administrasi Negara, *Manajemen Modern Menyongsong PJP II*, Jakarta, 1993.
- Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (REPELITA VI), Buku IV dan Buku V, Republik Indonesia
- Siagian, Sondang P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.
- Sugandha, Dann, *Masalah Otonomi Serta Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1981.

Sugandha, Dann, *Koordinasi Sebagai Pemersatu Gerak Dalam Proses Administrasi*, Ilham Jaya, Bandung, 1984.

Sukirno, Sadono, *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta, 1982.

Tjokroamidjojo, Bintoro, *Manajemen Pembangunan*, Haji Masagung, Jakarta, 1987.

...

...

...

...

...

...

...

ORGANISASI PENELITIAN

Berdasarkan SK Ketua LAN RI Nomor 234 O/IX/6/41996 tentang Susunan Personalia Tim Pelaksana Proyek Penelitian adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Pembina Program | : DR. J.B. Kristiadi |
| | Drs. Poltak Panggabean |
| 2. Penanggung Jawab | : Dr. Karhi Nisjar S., Ak.MM. |
| 3. Penanggung Jawab | |
| Operasional/Peneliti | : Drs. Desi Fernanda, M.Soc.Sc. |
| 4. Koordinator/Peneliti | : Dra. Elis Kantiningsih, MSi. |
| 5. Peneliti | : Dra. Sedarmayanti, MPd. |
| 6. Peneliti | : Drs. Desi Fernanda, M.Soc.Sc. |
| 7. Peneliti | : Drs. Deddy Mulyadi, MSi. |
| 8. Peneliti | : Drs. H. Jusuf Taudjiri |
| 9. Peneliti | : Dr. Hj. Enin Rukmini, MS. (Alm) |
| 10. Pembantu Peneliti | : Dra. Hayuni Rachmawati |
| 11. Pembantu Peneliti | : Dra. Yunaslis Uyun |
| 12. Pembantu Peneliti | : Baban Sobandi, SE. |
| 13. Pembantu Peneliti | : Tri Widodo Wahyu Utomo, SH. |
| 14. Pembantu Peneliti | : Dra. Laksmi Fitriani |
| 15. Pembantu Peneliti | : Gugum Gumelar, SH. |
| 16. Pembantu Peneliti | : Drs. Ramdani Priatna |
| 17. Pembantu Peneliti | : Kania Damayanti, SE. |
| 18. Pembantu Peneliti | : Drs. Syarifudin Hidayat |

LAMPIRAN-I/1

**KUESIONER
EVALUASI MIDTERM REPELITA VI
TAHUN KE-1 S.D TAHUN KE-3**

IDENTITAS RESPONDEN

NAMA :
JABATAN :
NAMA INSTANSI :
ALAMAT INSTANSI :

PETUNJUK PENGISIAN

BAGIAN I:

Pada Bagian I Bapak/Ibu/Sdr dimohon untuk mengisi daftar isian yang kami sediakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan.

BAGIAN II:

1. Pada Bagian II Bapak/Ibu/Sdr dimohon untuk menilai peningkatan kualitas pelaksanaan dari masing-masing program atau kegiatan, ATAU dengan cara membandingkan kondisi akhir Pelita V dengan kondisi sekarang (akhir tahun ke-3 Repelita VI) untuk masing-masing program/kegiatan.
2. Terdapat lima kategori jawaban, yaitu: **Peningkatan Tinggi, Peningkatan Rendah, Tidak Terjadi Peningkatan (Tetap), Terjadi Sedikit Penurunan, dan Terjadi Penurunan Drastis.**
3. Penilaian dilakukan dengan cara memberi tanda silang (X) pada kolom yang tersedia, sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Sdr. terhadap setiap pernyataan yang disampaikan.

DAFTAR ISI AN

1. Jumlah pegawai pada instansi yang Bapak pimpin;

Akhir Repelita V	Saat Ini	Pertambahan

2. Jumlah pegawai pada instansi yang Bapak pimpin berdasarkan eselon:

Eselon	Jumlah Akhir Repelita V	Jumlah Saat Ini
II		
III		
IV		
V		
Jumlah		

3. Jumlah Pegawai pada instansi yang Bapak pimpin berdasarkan pendidikan;

Pendidikan	Jumlah Akhir Repelita V	Jumlah Saat Ini
SD atau tdk tamat SD		
SLTP		
SLTA		
Diploma		
Sarjana (S1)		
S2 atau S3		
Jumlah		

4. Jumlah Pegawai pada instansi Bapak pada setiap Bidang/Bagian/Sub Bagian/ Sub Bidang;

5. Jumlah pegawai pada instansi Bapak berdasarkan Diklat-diklat yang telah diikutinya:

A. DJKLAT STRUKTURAL

JENIS DIKLAT	Jumlah lulusan s.d. Akhir Repelita V	Jumlah lulusan s.d Saat ini
ADUM		
SEPADADA		
SEPALALA		
SEPADYA/SEPAMA		
SESPA/SEPAMEN		
Jumlah		

B. DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL ATAU TEKNIS MANAJEMEN

JENIS DIKLAT (Sebutkan)	Jumlah lulusan s.d. Akhir Repelita V	Jumlah lulusan s.d Saat ini
Jumlah		

6. Penggunaan Metode Baru dalam Perencanaan:

JENIS RENCANA (Sebutkan)	Metode Yang Digunakan Hingga Akhir Repelita V	Metode Yang Digunakan Pada Repelita VI

7. Frekuensi rapat atau pertemuan-pertemuan selain RAKORBANG dalam rangka meningkatkan kelancaran pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan instansi lain;

JENIS RAPAT/PERTEMUAN (Sebutkan)	Frekuensi per tahun Hingga Pada Repelita V	Frekuensi Per Tahun Pada Repelita VI

8. Rata-rata keterlambatan penjadualan proyek atau kegiatan dari perencanaan yang telah ditetapkan

Momen Kegiatan	Lamanya Keterlambatan Pada Repelita V (Bulan/Minggu)	Lamanya Keterlambatan Pada Repelita VI (Bulan/Minggu)
Pelaksanaan		
Penyelesaian		
Turunnya Anggaran		

9. Rata-rata frekuensi pengawasan per tahun terhadap pelaksanaan kegiatan atau proyek yang dilaksanakan instansi Bapak;

Pengawas	Frekuensi Pengawasan Pada Repelita V	Frekuensi Pengawasan Pada Repelita VI
BPKP		
BPK		
Itwilcab		
Itwilprop		
Lainnya (Sebutkan)		

10. Dalam melaksanakan program-program tahunan, sudah barang tentu mengacu kepada sasaran-sasaran lima tahunan yang dibuat instansi Bapak. Menurut perkiraan Bapak, sudah berapa prosen program yang terlaksana dari keseluruhan program Repelita VI?
-

Mohon Bapak lampirkan juga SARLITA instansi Bapak!

BAGIAN II

K U E S I O N E R
EVALUASI MIDTERM REPELITA VI
TAHUN KE-1 S.D TAHUN KE-3

A. ASPEK KEPEGAWAIAN

1. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pegawai;

ITEM	PENINGKATAN/PENURUNAN DIBANDING DENGAN PRESTASI HINGGA AKHIR PELITA V				
	Pening-katan <i>TINGGI</i>	Pening-katan <i>RENDAH</i>	Tidak terjadi pening-katan <i>(TETAP)</i>	Terjadi <i>SEDIKIT</i> penuru-nan	Terjadi Penurun-nan <i>DRASTIS</i>
1. Peningkatan kualitas SDM pada instansi Bapak melalui pengikutsertaan dalam berbagai diklat struktural					
2. Peningkatan kualitas SDM pada instansi Bapak melalui pengikutsertaan dalam berbagai diklat Fungsional					
3. Peningkatan kualitas SDM pada instansi Bapak melalui pengikutsertaan dalam berbagai pendidikan berjenjang dalam dan luar negeri					
5. Kesesuaian diklat/pendidikan yang diikuti pegawai dalam pekerjaan, dengan kebutuhan					
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi kemasyarakatan formal					

2. Upaya peningkatkan disiplin pegawai/aparatur;

ITEM	PENINGKATAN/PENURUNAN DIBANDING DENGAN PRESTASI HINGGA AKHIR PELITA V				
	Pening-katan <i>TINGGI</i>	Pening-katan <i>RENDAH</i>	Tidak terjadi pening-katan <i>(TETAP)</i>	Terjadi <i>SEDIKIT</i> penuru-nan	Terjadi Penurun-nan <i>DRASTIS</i>
1. Peningkatan disiplin dalam masuk kerja					
2. Peningkatan disiplin dalam pulang kerja					
3. Peningkatan disiplin dalam pekerjaan, atau pemanfaatan jam kerja					
4. Pengenaan sangsi atau teguran bagi pegawai yang melanggar disiplin, seperti terlambat masuk, pulang sebelum waktunya, atau keluar kantor pada jam kerja					
5. Pemberian penghargaan bagi pegawai yang berpredikat disiplin					
6. Pemberian motivasi berupa materi, untuk meningkatkan disiplin pegawai					
7. Peningkatan disiplin pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat					
8. Penghapusan pungutan-pungutan liar dalam rangka menciptakan aparatur yang berdisiplin, bersih, dan berwibawa					
9. Penghilangan calo-calo atau makelar dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat					

B. ASPEK KETATALAKSANAAN

3. Upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan;

ITEM	PENINGKATAN/PENURUNAN DIBANDING DENGAN PRESTASI HINGGA AKHIR PELITA V				
	Pening-katan <i>TINGGI</i>	Pening-katan <i>RENDAH</i>	Tidak terjadi pening-katan (<i>TETAP</i>)	Terjadi <i>SEDIKIT</i> penuru-nan	Terjadi Penurun-nan <i>DRASTIS</i>
1. Kesesuaian rencana-rencana kerja dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat					
2. Dukungan sumber daya dan sumber dana terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan					
3. Pekanisme bottom up dalam perencanaan					
4. Penggunaan proyek/kegiatan yang telah lalu sebagai bahan/proyeksi pada tahun berikutnya, dalam rangka perencanaan dari bawah					
5. Pengumpulan data yang diperlukan untuk menyusun perencanaan pembangunan					
6. Kejelasan sasaran dalam setiap perencanaan yang dibuat					

4. Upaya peningkatan kualitas pelaksanaan program;

ITEM	PENINGKATAN/PENURUNAN DIBANDING DENGAN PRESTASI HINGGA AKHIR PELITA V				
	Pening-katan <i>TINGGI</i>	Pening-katan <i>RENDAH</i>	Tidak terjadi pening-katan <i>(TETAP)</i>	Terjadi <i>SEDIKIT</i> penuru-nan	Terjadi Penurun-nan <i>DRASTIS</i>
1. Kejelasan pembagian kerja dalam pelaksanaan kegiatan					
2. Kejelasan tanggung jawab pada tiap tingkatan manajemen dalam kegiatan atau proyek					
3. Pembinaan kerja sama dalam berbagai kegiatan					
4. Efisiensi sumber daya manusia/personil dalam setiap kegiatan atau proyek					
5. Efisiensi penggunaan sumber dana dalam setiap kegiatan atau proyek					
6. Ketepatan waktu memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai jadual yang telah ditentukan					
7. Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan/kegiatan sesuai jadual yang telah ditetapkan					
8. Kesesuaian hasil dengan rencana yang telah ditetapkan					
9. Pengembangan sistem informasi manajemen pembangunan daerah					
10. Penyederhanaan mekanisme dan prosedur perizinan kegiatan dunia usaha di daerah-daerah Tk.II					
11. Kesesuaian pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan					

ITEM	PENINGKATAN/PENURUNAN DIBANDING DENGAN PRESTASI HINGGA AKHIR PELITA V				
	Pening-katan <i>TINGGI</i>	Pening-katan <i>RENDAH</i>	Tidak terjadi pening-katan (<i>TETAP</i>)	Terjadi <i>SEDIKIT</i> penuru-nan	Terjadi Penuru-nan <i>DRASTIS</i>
12. Ketepatan memulai kegiatan/proyek dengan penjadualan yang telah ditetapkan					
13. Ketepatan penyelesaian kegiatan sesuai dengan penjadualan yang telah ditetapkan					
14. Ketepatan penyediaan jumlah sumber daya manusia dengan kebutuhan proyek/kegiatan					
15. Kesesuaian kualifikasi sumber daya manusia dengan kebutuhan proyek/kegiatan					
16. Ketepatan jumlah material dengan kebutuhan proyek/kegiatan					
17. Kesesuaian kualitas material dengan kebutuhan proyek/kegiatan					
18. Inovasi metode baru dalam pelaksanaan kegiatan/proyek					
19. Kecukupan jumlah anggaran					
20. Kemampuan manejemen dalam mengelola kegiatan/proyek					

5. Peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah di daerah dalam melaksanakan pembangunan;

ITEM	PENINGKATAN/PENURUNAN DIBANDING DENGAN PRESTASI HINGGA AKHIR PELITA V				
	Pening-katan <i>TINGGI</i>	Pening-katan <i>RENDAH</i>	Tidak terjadi pening-katan <i>(TETAP)</i>	Terjadi <i>SEDIKIT</i> penuru-nan	Terjadi Penurun-nan <i>DRASTIS</i>
1. Peningkatan koordinasi dalam perencanaan kegiatan					
2. Peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan					
3. Peningkatan koordinasi dalam pengawasan, monitoring dan evaluasi					
4. Keterpaduan berbagai kegiatan sejenis dan berkaitan, serta keserasian jadual pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai instansi					
5. Keserasian berbagai kegiatan dengan kegiatan lainnya yang sama-sama merupakan tugas suatu instansi					

6. Upaya peningkatan kualitas dan frekuensi pengawasan/evaluasi, serta tindak lanjut dari hasil pengawasan dan evaluasi tersebut;

ITEM	PENINGKATAN/PENURUNAN DIBANDING DENGAN PRESTASI HINGGA AKHIR PELITA V				
	Pening-katan <i>TINGGI</i>	Pening-katan <i>RENDAH</i>	Tidak terjadi pening-katan <i>(TETAP)</i>	Terjadi <i>SEDIKIT</i> penuru-nan	Terjadi Penurun-nan <i>DRASTIS</i>
1. Monitoring terhadap kegiatan atau projek yang dilaksanakan					
2. Efektivitas monitoring terhadap berbagai kegiatan					
3. Pelaksanaan pelaporan rutin setiap kegiatan/proyek					
4. Pelaksanaan pelaporan tidak rutin jika menghadapi masalah					
5. Pengarsipan terhadap berbagai dokumen kegiatan					
6. Peneguran atau pengenaan sangsi terhadap aparat yang melakukan penyimpangan atau penyelewengan					
7. Pelaksanaan evaluasi pada setiap akhir kegiatan					
8. Penggunaan hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan bagi kegiatan selanjutnya					
9. Peningkatan pengawasan penggunaan keuangan daerah					
10. Kelengkapan isi laporan dalam memuat hal-hal sbb: * Jenis pekerjaan * Waktu (Jadual) pelaksanaan * Instansi yang terkait * Kegiatan yg telah selesai					

ITEM	PENINGKATAN/PENURUNAN DIBANDING DENGAN PRESTASI HINGGA AKHIR PELITA V				
	Pening-katan <i>TINGGI</i>	Pening-katan <i>RENDAH</i>	Tidak terjadi pening-katan <i>(TETAP)</i>	Terjadi <i>SEDIKIT</i> penuru-nan	Terjadi Penurun-nan <i>DRASTIS</i>
11. Peningkatan kualitas pengawasan intern					
12. Peningkatan kualitas pengawasan fungsional					

7. Upaya peningkatan kemampuan memobilisasi berbagai sumber keuangan daerah;

ITEM	PENINGKATAN/PENURUNAN DIBANDING DENGAN PRESTASI HINGGA AKHIR PELITA V				
	Pening-katan <i>TINGGI</i>	Pening-katan <i>RENDAH</i>	Tidak terjadi pening-katan <i>(TETAP)</i>	Terjadi <i>SEDIKIT</i> penuru-nan	Terjadi Penurun-nan <i>DRASTIS</i>
1. Intensifikasi sumber keuangan yang telah ada (pengoptimalan sumber dana yang ada)					
2. Ekstensifikasi sumber dana dengan perluasan jangkauan sumber yang telah ada					
3. Diversifikasi sumber dana dengan menggali sumber dana baru.					
4. Peningkatan PAD dari mengintensifkan sumber pendapatan yang berasal dari laba BUMD					
5. Peningkatan intensitas usaha BUMD melalui peningkatan modal, peningkatan kualitas SDM, perluasan dan diversifikasi pasar, serta diversifikasi produk)					

ITEM	PENINGKATAN/PENURUNAN DIBANDING DENGAN PRESTASI HINGGA AKHIR PELITA V				
	Pening-katan <i>TINGGI</i>	Pening-katan <i>RENDAH</i>	Tidak terjadi pening-katan <i>(TETAP)</i>	Terjadi <i>SEDIKIT</i> penuru-nan	Terjadi Penurun-nan <i>DRASTIS</i>
6. Peningkatan PAD dengan pengintensifan sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah					
7. Peningkatan efisiensi dan pengelolaan bantuan termasuk Inpres serta pinjaman					
8. Peningkatan keikutsertaan swasta dalam pembangunan Daerah					
9. Pengoptimalan penggunaan keuangan Daerah					
10. Perbaikan pengelolaan keuangan Daerah					

8. Upaya peningkatan pelayanan aparat terhadap masyarakat;

ITEM	PENINGKATAN/PENURUNAN DIBANDING DENGAN PRESTASI HINGGA AKHIR PELITA V				
	Pening-katan <i>TINGGI</i>	Pening-katan <i>RENDAH</i>	Tidak terjadi pening-katan <i>(TETAP)</i>	Terjadi <i>SEDIKIT</i> penurun-nan	Terjadi Penurun-nan <i>DRASTIS</i>
1. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat					
2. Pemberian penerangan kepada masyarakat, mengenai kebijaksanaan pemerintah					
3. Ketanggapan aparat terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang					
4. Penjelasan kepada masyarakat mengenai pembangunan serta manfaat langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat					
5. Penyiapan dukungan dan pembinaan gerakan perantara masyarakat terhadap program-program pembangunan					

9. Upaya pembentukan atau penyempurnaan perangkat peraturan perundang-undangan di Daerah atau yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi instansi;

ITEM	PENINGKATAN/PENURUNAN DIBANDING DENGAN PRESTASI HINGGA AKHIR PELITA V				
	Pening-katan <i>TINGGI</i>	Pening-katan <i>RENDAH</i>	Tidak terjadi pening-katan (<i>TETAP</i>)	Terjadi <i>SEDIKIT</i> penuru-nan	Terjadi Penurun-nan <i>DRASTIS</i>
1. Pembentukan peraturan perundang-undangan baru dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan di daerah					
2. Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan					
3. Penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan daerah yang sudah tidak relevan dengan situasi dan kondisi					
4. Penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan tuntutan dan partisipasi masyarakat.					

C. ASPEK KELEMBAGAAN

10. Upaya penataan kembali batas wilayah dan daerah dalam rangka pemekaran dan penyesuaian status daerah tertentu;

ITEM	PENINGKATAN/PENURUNAN DIBANDING DENGAN PRESTASI HINGGA AKHIR PELITA V				
	Pening-katan <i>TINGGI</i>	Pening-katan <i>RENDAH</i>	Tidak terjadi pening-katan <i>(TETAP)</i>	Terjadi <i>SEDIKIT</i> penuru-nan	Terjadi Penurun-nan <i>DRASTIS</i>
1. Optimalisasi penataan kembali batas wilayah dan daerah					
2. Manfaat penataan kembali batas wilayah dan daerah bagi peningkatan efisiensi pelaksanaan pembangunan dan administrasi pemerintahan					

11. Upaya peningkatan kemampuan lembaga dan organisasi masyarakat;

ITEM	PENINGKATAN/PENURUNAN DIBANDING DENGAN PRESTASI HINGGA AKHIR PELITA V				
	Pening-katan <i>TINGGI</i>	Pening-katan <i>RENDAH</i>	Tidak terjadi pening-katan <i>(TETAP)</i>	Terjadi <i>SEDIKIT</i> penurunan	Terjadi Penurunan <i>DRASTIS</i>
1. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi kemasyarakatan					
2. Pemanfaatan organisasi kemasyarakatan sebagai agen pembangunan					
3. Peningkatan kemanfaatan organisasi kemasyarakatan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat					
4. Peningkatan relevansi misi dan tujuan organisasi kemasyarakatan dengan kebutuhan masyarakat					

LAMPIRAN-II/1

**BERBAGAI JENIS DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL
DAN TEKNIS MANAJEMEN YANG DIIKUTI PEGAWAI
INSTANSI SAMPEL DI DAERAH TINGKAT II
YANG ADA DI ENAM PROPINSI DT.I**

A. PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Jenis Diklat Teknis Fungsional/Manajemen	Jumlah Alumni Akhir Repelita V	Jumlah Alumni Akhir Thn Ke-3 Repelita VI	Persentase Perubahan
- P P N S	1 - 11	1 - 11	0
- Bendaharawan	4 - 34	6 - 31	80-100 %
- Penguji Pembinaan T-K DLLAJR	14	16	14,29
- Bendaharawan	30	33	10
- KMP	3	5	66,67
- Bendaharawan	-	6	100
- Perencanaan Teknis	-	1	100
- Drainase	-	4	100
- Manajemen Proyek	-	12	100
- Penataan Ruangan	-	3	100
- Perkoperasian	47	47	0
- KMR	26	26	0
- Auditing	24	24	0
- Akuntansi	21	21	0
- Pendidikan khusus PKL	9	3	33,33
- KMP	3	7	133,33
- Bendaharawan	2	4	50
- Bendaharawan	3	9	200
- Kearsipan	2	3	16,67
- Kesehatan Masyarakat	-	3	100
- Perpustakaan	3	2	33,33
- KMP	5	5	0
- Kebendaharawanan	3	3	0

Lanjutan Jawa Barat ...

Jenis Diklat Teknis Fungsional/Manajemen	Jumlah Alumni Akhir Repelita V	Jumlah Alumni Akhir Thn Ke-3 Repelita VI	Persentase Perubahan
- TMPPD	2	9	
- P5D	2	2	0
- KMP	3	8	
- Bendaharawan	7	9	
- Amdal	4	8	
- Manajemen Proyek	1	1	0
- Perencanaan	1	1	0
- Analisis Manajemen	-	1	100
- Manajemen Transmigrasi	-	1	100
- Penggerak Swadaya Masyarakat	-	13	100
- Pimpro / KMP	5	5	0
- Bendaharawan	3	1	
- Kursus Kemitraan	1	1	0
- Arsiparis	3	2	
- Perpustakaan	1	1	0
- Pelatihan KMP	-	7	100
- Penataran Bendaharawan	-	2	100
- Penataran Kearsipan	-	3	100
- Latihan Perpustakaan	-	1	100
- Kursus Komputer	-	4	100
- Penataran Bidang Teknis Kepegawaian	-	3	100
- Latihan Perencanaan	-	1	100
- Penataran P4/Pola Terpadu	-	12	100
- Orientasi Lat. UDKP	-	4	100
- Orientasi Latihan Pelatih IDT	-	4	100
- Pelatihan Pelatih P3MD	-	2	100
- Pelatihan Pelatih LPDT	-	2	100
- Pelatihan Pelatih PRA	-	7	100
- Pelatihan Asisten UED-SP	-	2	100

Lanjutan Jawa Barat ...

Jenis Diklat Teknis Fungsional/Manajemen	Jumlah Alumni Akhir Repelita V	Jumlah Alumni Akhir Thn Ke-3 Repelita VI	Persentase Perubahan
- Pelatihan Teknis Prasarana Desa	-	1	100
- Pelatihan/Orientasi PAB-PLP	-	2	100
- Pelatihan Tata Guna Air	-	1	100
- Pelatihan TTG	-	-	0
- Kursus Kader Pengairan Desa	-	2	100
- Kursus/Latihan Kerja PMD	-	10	100
- Kursus Administrasi Desa TK. Prop. Jabar	-	3	100
- Penataran Pendidikan Kependudukan	-	2	100
- Penataran Petugas Teknis Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan DT. II se-Jabar	-	8	100
- Penataran Pegawai RI TK. Kabupaten	-	51	100
- Kursus Orientasi Pembangunan Daerah/Desa	-	7	100
- Pendidikan & Latihan Peningkatan Integrasi Program K/KB & PKK	-	7	100
- Management Motivation Training	-	8	100
- Latihan Pemantapan Kesadaran Bela Negara dan Peningkatan Kemampuan pertahanan Sipil	-	10	100
- Intensive English Course	-	12	100

Lanjutan Jawa Barat ...

Jenis Diklat Teknis Fungsional/Manajemen	Jumlah Alumni Akhir Repelita V	Jumlah Alumni Akhir Thn Ke-3 Repelita VI	Persentase Perubahan
- Penataran Kewaspadaan Nasional	-	7	100
- Patihan ISK UDKP	-	15	100
- Latihan Bimbingan Teknis Prasarana Desa	-	22	100
- Pelatihan P3MD	-	11	100
- Latihan Pembina LPDT	-	17	100
- Latihan Pelatih LPDT	-	1	100
- Latihan Pendamping IDT	-	104	100
- Penataran P4	-	92	100
- Orientasi Latihan Profil Desa	-	10	100
- Pelatihan Tata Guna Air	-	8	100
- Latihan Bela Negara	-	2	100
- Intensive English Course	-	-	100
- Ijin Belajar	-	7	100
- Pelatihan KPD/KPD Remaja	-	5.572	100
- Pelatihan P3MD	-	451	100
- Pelatihan LKMD	-	2.706	100
- Pelatihan Pendamping IDT	-	88	100
- Pelatihan Teknis Prasarana Desa	-	-	0
- Orientasi Inpres Desa	-	2.255	100
- Orientasi Profil Desa	-	451	100
- Pelatihan PPKL-UED	-	54	100
- Pelatihan Pengelola Perpustakaan	-	1.353	100
- Pembina KPD Desa	-	451	100
- Orientasi Pokmas IDT	-	189	100

Lanjutan Jawa Barat ...

Jenis Diklat Teknis Fungsional/Manajemen	Jumlah Alumni Akhir Repelita V	Jumlah Alumni Akhir Thn Ke-3 Repelita VI	Persentase Perubahan
- Orlat-Kader Desa Wisma	-	13.530	100
- Orlat TPK3PKK	-	11.275	100
- Orlat Pola Asuh Anak	-	13.530	100
- Orlat Poksus UP2PKKk	-	13.530	100
- Latihan P3PKK	-	410	100
- Orlat BKB	-	11.275	100
- P P N S	14	39	178,57
- Manajemen Proyek	1	2	100
- Bendaharawan	31	31	0
- Manajemen Kependidikan	-	10	100
- Pustakawan/ Dokumentasi	2	-	100
- M B O	1	-	100
- Analisis Manajemen	1	-	100
- Analisis Jabatan	1	-	100
- Pelatihan Petugas	78	78	0
- U K S	21	53	152,38
- Pelatihan Imunisasi	49	58	18,37
- Konseling Bidan	-	30	100
- Penataran IUD	7	23	228,57
- Kantory Galer	-	33	100
- Bendaharawan	12	12	0
- Komputer	3	5	66,67
- K M P	1	1	0
- Diklat Fungsional	1	1	0
- Diklat Teknis Mgt.	1	1	0
- Arsiparis	11	18	
- Pustakawan	3	3	
- Sandi Katel	1	2	
- Bendaharawan	18	11	
- K M P	5	19	
- P P N S	3	1	
- Mapatok	23	-	

Lanjutan Jawa Barat ...

Jenis Diklat Teknis Fungsional/Manajemen	Jumlah Alumni Akhir Repelita V	Jumlah Alumni Akhir Thn Ke-3 Repelita VI	Persentase Perubahan
- Arsiparis	2	2	0
- P P N S	1	1	0
- Bendaharawan	4	6	50
- Orientasi Aparat	4	4	0
- Teknis Subtantif Pariwisata	-	2	100
- Bidang Obyek & Atraksi	4	6	50
- Rural Development	1	1	0
- Proyект Mgt. Sistem	2	2	0
- Bimbingan Tek. Sospol	2	2	0
- Teknis Kepegawaian	3	4	33
- Analisis Jabatan	2	2	0
- Amdal Analisis Faksing Tipe A - B	1	1	0
- Penyehatan Lingkungan Bidang Persampahan	1	1	0
- Lingkungan PLP	-	1	100
- Perbendaharawan Daerah	-	1	100

Sumber: Data lapangan, Kuesioner, diolah

B. PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

INSTANSI	JENIS DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL DAN TEKNIS MANAJEMEN
BAPPEDA	Tata Naskah, KPTPD, TOT LPTPD, TMPP/KOPD, Diklat LN PSD, KMP, PDRB, Metodologi
DINAS PENDAPATAN DAERAH	Kursus Keuangan Daerah, Bendahara Khusus Penerima, Administrasi Keuangan Daerah, KMP, Bendaharawan Daerah, Manajemen Proyek, Analisis Jabatan, Komputerisasi Ma patda, Diklat Teknis Orientasi Pembangunan Daerah, Pengenalan Studi Bidang Keuangan Daerah
DINAS KESEHATAN	Pelatihan Petugas Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Pelatihan Petugas Imunisasi, Pelatihan Teknis Fungsional, Pelatihan Peningkatan Keterampilan Manajemen, Latihan Pengelola Obat Puskesmas Daerah, Pelatihan Teknis Perawatan Individu di Ruang Rawat Inap, Pelatihan Ice Fack Freacer FCM 20 EK, Latihan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pelatihan Keterampilan Pelaksana Kesehatan Anak/Tbu/Bayi, Pelatihan Management Program Imunisasi, Pelatihan Petugas Sanitasi Puskesmas, Pelatihan Program P2 Kusta, Pelatihan Teknis Fungsional Terpadu Dokter Puskesmas, Pentaloka Tim Pelatih Kader Posyandu, Pelatihan Keterampilan Gizi, Pelatihan Kesehatan Jiwa, Pelatihan Dokter Terhadap Kawasan Industri, Pelatihan Pemeriksaan Kualitas Air, Pelatihan Program AMS dan AIDS, Pelatihan Petugas Pengumpulan Data Anggaran Kesehatan, Pelatihan Penilik Jasaboga dan Restoran, Pelatihan Komputer, Pelatihan Laboratorium, Pelatihan Peralatan ADKL, Pelatihan/penataran Management Kesehatan, KPS, Kesling, KMP
DINAS P & K	Bendaharawan
DINAS PERKEBUNAN	APP, Latihan PPS, Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu Kapas, Sekolah Lapangan PHT Kelapa, Diklat PL II Komoditi Kelapa dan Jambu Mete, Diklat P4K bagi PPL, Kursus Teknik Budidaya Karet, Kelapa dan Kopi, Budidaya Tanaman Perkebunan, Manajer PMU-PK, Pimpro Penghijauan, Manajemen Kepemimpinan, Manajemen Seminar, Manajemen Proyek, Kursus Penyuluhan, Kursus Teknik Produksi, PPL Polivalen, Kepegawaian, Diklat PPS, Amdal Pertanian, Pelatihan Petugas UPPT, Kearsipan, Bendaharawan, BP3G, Proteksi Tanaman Perkebunan, SLPHT, GKM, PPM Supervisor, Dasar I dan II bagi PP
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN	Penyuluhan Pertanian, Statistik/Sensus Pertanian, Bendaharawan Kepegawaian Kearsipan, Manajemen Proyek, Perencanaan Pembangunan Pertanian

Lanjutan Jawa Timur...

INSTANSI	JENIS DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL DAN TEKNIS MANAJEMEN
DINAS PERIKANAN	Latihan Akselerasi Pembangunan Perikanan, Kursus Perkreditan, Latihan Amdal, Pelatihan PPNS, Latihan Dasar PPL, K P3 L, Pelatihan Petugas Pengamat Penyakit Ikan, Perikanan, Latihan Intam, Latihan Budidaya Air Payau, Kursus Keterampilan Management Pelelangan Ikan, Latihan Pemberian Udang Galah, Kursus Bendaharawan, Diklat Partisipasi, Latihan Manajer Koperasi Perikan Kursus Keterampilan Manajer Ikan, Latihan Pembangunan Administrasi Kepegawaian, Kursus Administasi Keuangan Daerah, Kursus Aneka Ikan, Latihan Pasca Panen, Latihan Keterampilan Khusus Pemberian Udang Skala Rumah Tangga, Latihan Petugas Pemasaran, Penataran Investarisasi Barang, Latihan Keterampilan Permesinan Bagi PPUP, Latihan Manajer BBI, Latihan Orientasi PPL, PPNS, KMP, Kepegawaian
DINAS PETERNAKAN	Petugas Teknis Perternakan, Keuangan, Kepegawaian, KMP, Bendaharawan Daerah
DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH	Management proyek, Teknisi Quality Control, Operator Komputer, PTPD, P3KT, Diklat LPJK, Atm. Teknik & Sumur IPJK, Pengawas, Perencanaan Jalan/Jembatan, Bendaharawan, BPP & Panitia Lelang
DINAS SOSIAL	Manajemen Proyek, Berdaharawan, Kearsipan, Bimbingan & Penyuluhan
DINAS PARIWISATA	Keuangan P3KT, Administrasi Perkantoran, Bendaharawan
DINAS PASAR	Kier Master, Bendaharawan, KMP
DINAS KEBERSIHAN & PERTAMANAN	Manajemen Audit, Manajemen Proyek
DINAS PERDAGANGAN	Teknik Perdagangan Luar Negeri, Analisa Kebijaksanaan Ekonomi, Bendaharawan, Manajemen Proyek, Perencanaan & Tatalaksana Pembangunan Daerah
DINAS TRANSMIGRASI	Motivator, PSM, Bendaharawan, PKM, LPTPD
DINAS PENGAIRAN	Manajemen Proyek, Perencanaan Tatalaksana Pembangunan Daerah, Teknik Pengairan, Perencanaan Tenaga Kerja, Bendaharawan
DINAS TENAGA KERJA	Pentakerja, DJJ Perantara, Bendaharawan, Pengawas KK
DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	Local Government Finance, Pelatihan KPTD, Kursus Pemerintahan, Perencanaan Wilayah Pesisir, Bendaharawan, Operator Komputer, Lelang/BPP, Manajemen Proyek

Lanjutan Jawa Timur...

INSTANSI	JENIS DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL DAN TEKNIS MANAJEMEN
DINAS LALU LINTAS & ANGKUTAN JALAN	PPNS, Transportasi, Motoris, Pengujian Kendaraan, Jembatan Timbang
DINAS PERINDUSTRIAN	Pengendalian Limbah, SNI, Apresiasi ISO 9000, Manajemen Usaha Kecil, Bendaharawan, KMP
DINAS PU CIPTA KARYA	Manajemen, Fungsional
DINAS PU BINA MARGA	KMP, Bendaharawan, Pengawas Bangunan
DINAS PMD	Bendaharawan, KMP, Perpustakaan
DINAS PENGAWASAN BANGUNAN	KMP, Wanpro, BPP, KBD, PTUN, PPNS, Teknik Penyuluhan, Teknik Pengawasan
DINAS TATA KOTA	KMP, Bendaharawan, BPP/Panitia Lelang
BAGIAN ORGANISASI	P4, Organisasi & Manajemen, Analisis Jabatan, Analisis Kemampuan Manajemen, Manajemen Proyek, Analisis Sistem Programmer, Bendaharawan, Tata Naskah dan Kearsipan, Analis Manajemen Modal, KBPP, ODM/AM, AKM
BAGIAN HUKUM	Manajemen Proyek, PTUN, Kuasa Hukum di Daerah, Bendaharawan A, Pelaksanaan Mapeda, SJDIH, Teknik Penyusunan Per-UU-an, Manajemen Proyek, Pelelangan/BPP
BAGIAN KEUANGAN	Kursus Administrasi Keuangan Daerah, Bendaharawan, BPP/ Panitia Lelang, KMP
BAGIAN PER-EKONOMIAN	KMP, Bendaharawan
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	KMP, BPP, Bendahara
BAGIAN KEPEGAWAIAN	MOT, Profesional Kediklatan, Teknis Kearsipan, Komputer

Sumber: Data Lapangan, Kuesioner, diolah.

C. PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	Daerah Tingkat II	Instansi	Jenis Diklat Teknis Fungsional dan Manajemen
1.	DT II Bantul	Setwilda	Penataran Pembinaan Karir, Manajemen Proyek, Latihan Jabatan, Arsiparis, Bendaharawan, KKD, Komputer, Manajemen Keuangan, LKD, Amdal, Analisis Jabatan, Administrasi Kepegawaian.
		Dinas PU	Manajemen Proyek, Manajemen Keuangan, Karsipan, Manajemen Jalan, Pengawasan, Amdal, Manajemen Perkotaan.
		Dipenda	Bendaharawan Daerah, Manajemen Proyek, PPNS, LKD, Arsiparis, Manajemen Keuangan, Perpajakan, Auditing.
		Din. Kesehatan	Manajemen Proyek, Manajemen Puskesmas, Kepemimpinan, Perkantoran, Komputer, Bendaharawan, KMP.
		Itwilcab	PPNS, MA, KMP, Bendaharawan, Pengawas Keuangan Negara, Perkantoran, Manajemen Audit, Manajemen Proyek.
		Set DPRD	Karsipan, Kepegawaian, Perpustakaan, Komputer, Bendaharawan, Manajemen Keuangan.
		BP - 7	Manajemen Proyek, Bendaharawan, PKD, Karsipan, Perpustakaan.
		Kantor Sospol	Manajemen Proyek, Bendaharan, Litsus, Perkantoran, Komputer, Karsipan, Kepegawaian.
2.	DT II Gunung Kidul	Setwilda	KMP, TOT KBD, Bendaharawan A, Audit Lingkungan, Auditing, Komputer, SJDI Hukum, Analisis Jabatan, Organisasi dan Manajemen, Latihan Jabatan, Kepegawaian, Pengelola Keuangan Daerah, TOC, KMP, PKT, MOT, Kehumasan.

Lanjutan DI Yogyakarta...

No.	Daerah Tingkat II	Instansi	Jenis Diklat Teknis Fungsional dan Manajemen
		Kantor Sospol	Manajemen Proyek, Bendaharawan, Arsiparis, Perpustakaan, Kearsipan Pola Baru.
		Catatan Sipil	K M P
		Dipenda	Bendahawan, Manajemen Proyek, Pengawas Keuangan Negara, Pembantu Pengelola Keuangan, Komputer.
		Din. Pertanian	SIMPRO, Penyuluhan, Latihan Pembina Pembangunan Masyarakat Desa, Latihan Pengawasan Benih, PTUW, Administrasi Perkantoran, Manajemen Usaha Tani, Komputer, Bendaharawan, Penggunaan Pestisida.
		Dinas Peternakan	Kursus Mantri Hewan, Bendaharawan, Laboratorium Kesehatan Hewan, Manajemen Proyek, Paramedis Peternakan, Hijauan Makanan Ternak, Pemeriksaan Daging, Vaksinatur.
		Bappeda	TMPP, KMP, TOT, Arsiparis, Pustakawan.
		Dinas PU	Manajemen Proyek, Bendaharawan A, Analisis Jabatan, Desain Jalan dan Jembatan, Teknik Laboratorium, Latihan Perencanaan Pembangunan Pedesaan, Upgrading Orientasi Pem-bangunan, Teknik Penilaian Proyek, Latihan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Program PAB dan PLP Pedesaan, Pelatihan Tahap Analisa dan Evaluasi Jalan Kabupaten Perencanaan Proyek-proyek Transportasi, Program Perbaikan Kampung, Latihan Perencanaan Program Penyediaan Air dan Penyehatan Lingkungan.

Lanjutan DI Yogyakarta...

No.	Daerah Tingkat II	Instansi	Jenis Diklat Teknis Fungsional dan Manajemen
3.	DT II Sleman	Setwilda	KMP, Bendaharawan, Keuangan, Auditing, Bendaharawan Daerah, Perpustakaan, Manajemen, MOT, Analisis Kemampuan Aparatur, Karsipan Pola Baru, Analisis Jabatan, Suskalak, TOT, TOC, Kehumasan, Pembinaan Perangkat Daerah, Komputer, GMP, Manajemen Kepegawaian.
		Dinas Pertambangan	KMP, KBD.
		Din. Perikanan	Manajemen Proyek.
		Dipenda	Hukum Tata Usaha Negara, Paf. Pack, Bendaharawan Type A, Bendaharawan Daerah, KMP, Kursus IPAIR, LKD, Komputer, Karsipan, Karsipan Pola Baru, Auditing, Perpajakan Daerah, Pelatihan Peningkatan PAD, TOT, PPNS, Keuangan.
		Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah	Manajemen Proyek, Peraturan, Performance Evaluation, Spesialis Agroma Ekonomi, Pengembangan dan Reboisasi, KMP, SIM, P3KT, Tata Guna Air, Penanganan Pasca Panen, Kader Koperasi, TGA, Perencanaan Jalan Hutan, Bendaharawan, Pengembangan Pengelolaan Hutan Rakyat, Mandor Persemaian, Amdal, Pengembangan dan Pengelolaan Hutan Rakyat, Pengembangan Lombok dan Tomat, Petugas Hutan Rakyat, Mandor Penyuluhan, Perlebaran, Pembinaan Kader KSDA.
		Disnaker	Peningkatan Manajemen, Pengawas Keuangan Negara, Bendaharawan, Pengantar Kerja, Pengantar Ketenaga Kerjaan, Peraturan Pemerintahan.

Lanjutan DI Yogyakarta...

No.	Daerah Tingkat II	Instansi	Jenis Diklat Teknis Fungsional dan Manajemen
		Bappeda	LAU, LKPD, LUPD, TMPP, TOT, AMDAL A, B, C, Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Tata Ruang, Manajemen Proyek, Bendaharawan Proyek.
		Dinas Pertanian Tanaman Pangan	Manajemen Proyek, Bendaharawan, Perencanaan.
4.	DT II Kulon Progo	Setwilda	SJDI, Suspindagri, PPNS, Analisa Jabatan, Job Training Kependudukan, Kepegawaian, Amdal, Perpustakaan, Operator Radio Komunikasi, Peraturan, O. M, Bendahara, Kehumasan, Kearsipan, Keuangan Daerah, Tata Guna Air, Perangkat Daerah, Manajemen Proyek, BUKP, Perpustakaan, Penatalaksanaan Program Penataan Ruang, TOT Umum, DK, TOC, KMP, Pembukuan, Pengelola Keuangan.
		Din.Pertanian	KMP, Bendaharawan.
		Din. Peternakan	Manajemen Proyek.
		Dinas PU	Anjab, Bendaharawan Daerah, KMP, Survey dan Desain Jembatan, Desain Jalan, Perencanaan Pemeliharaan Jalan, PPNS, Komputer, Kursus Dasar Pengukuran Bangunan, Program Penataan Ruang, Keterampilan Pengelolaan Peralatan, Amdal, Pengawas Pekerjaan, Pengawas Perumahan Daerah, Keterampilan Jasa Kontruksi, Penyediaan Air Bersih dan Pengelolaan Lingkungan, Konstruksi Manajemen Quility Control, Perencanaan Penanaman Modal.
		Dipenda	Manajemen Proyek, TOT Bendaharawan, Bendaharawan, Komputer, PPNS.

Lanjutan DI Yogyakarta...

No.	Daerah Tingkat II	Instansi	Jenis Diklat Teknis Fungsional dan Manajemen
		Din. Kesehatan	Manajemen Perkantoran, Uji Coba Media Aida, Kader Malaria Desa, Amdal.
5.	Kodya Yogyakarta	Setwilda	TOT, KMP, Bendaharawan A, Manajemen Keuangan Daerah, KKD, Anjab, Anjab Lanjutan Perpustakaan, Komputer, PPNS, Arsiparis, Amdal.
		Din. Kesehatan	Manajemen Kepegawaian, Fungsional Perawat, Laboratorium.
		Din. Peternakan	Bendaharawan, Kepegawaian, Pengulitan, Penyuluhan, Pengawas Obat Hewan, Kesmaket, Mantri Hewan, Teknis Perunggaran, Intensifikasi Ayam Baru, Statistik Peternakan, Pasca Panen, Susu, Daging dan Telur, Manajemen Proyek, Pratun, Pemeriksa Pengawas Pertanian, Teknis PPL.
		Dipenda	LKD, Bendaharawan, PPNS, Manajemen Proyek, Penilaian Harta, Pembinaan Perangkat Daerah.
		Bappeda	Administrasi Perencanaan Pembangunan, TNPP, PPN, PPD, Bendaharawan A, Anjab, Perpustakaan
		Dinas PU	Aplikasi Bina Marga, Pimpro, Manajemen Praktis, Manajemen Proyek, Manajemen Energi, Manajemen Pembangunan Kota, Orientasi Perkerasan Beton Aspal dan Beton Semen, Orientasi Teknik Jalan, Perencanaan Kota, Pengawas PDAM, NWP, Tata Laksana Pembangunan, Amdal, Proyek Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Limbah.

Sumber : Data Lapangan, Kuesioner Diolah.

D. PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

1. **Setwilda:** Bimbingan teknis, Administrasi Kepegawaian dan Perkantoran, Bimbingan Penyuluhan Hukum, Kursus Bendaharawan A, Pengawasan Keuangan Negara, Penataran Kehumasan, Manajemen Proyek, Analisis Manajemen, KMP, MOT, TOT, Diklat Teknis Komputer, Pelatihan Keuangan, Tata Naskah Dinas, Administrasi Personalia, SJD I, Analisis Jabatan, Diklat Protokol, Diklat Santel, Pra Jaksa, Pusdiklat Mobil Tangga, Organisasi dan Metode, Bintek Analisis Manajemen.
2. **Dinas Pertanian:** Administrasi Kepegawaian dan Perkantoran, Penyuluhan Pertanian, Budi Daya Bawang Putih, latihan dasar II PPS, Pembinaan wanita tani, tata Guna Air, Manajemen Proyek, Pengawasan melekat, Grand Water, Kursus Petugas PL II P2RT.
3. **Dinas Perkebunan:** Manajemen sasaran dan Keuangan, Fokus Orientasi Penarapan, Manajemen Orientasi PPS/PPL, Latihan dasar PPL, Latihan PPUP Perkebunan.
4. **Bappeda:** TMPPD;LPTPD, Pengantar keuangan Negara, KOPD, TOT Perencanaan Pembangunan Daerah, Penataan Ruang daerah, Penataan Ruangan kawasan Industri dan Pariwisata, teknik Manajemen dan Perencanaan Pembangunan Tingkat Dasar, Diklat SDM, Manajemen Proyek, Perpustakaan,
5. **Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA):** Kearsipan, bendaharawan, Komputerisasi, Pendidikan Perpajakan, Pelaksanaan Bendaharaan Daerah.
6. **Dinas Peternakan:** Inseminator, Pemeriksaan Kebuntingan Sapi, Asisten Teknis Embrio, Pengawas Mutu Pakan, latihan dasar PPL, Kursus IB.
7. **Dinas Pertanian Tanaman Pangan:** Sistem Manajemen, Tata naskah Dinas, Statistik, PPL, Bendaharawan.
8. **Dinas Kesehatan:** Pelatihan Mikroskopik, Pelatihan PHN, Bidan Desa, Gawat Darurat.
9. **Dinas LLAJ:** Kursus Perkantoran, Kepegawaian, PPNS, PKB, Pengembangan Jaringan.

10. **Dinas Pariwisata:** Manajemen Pariwisata, Kursus Bendaharawan, Penyuluhan Tenaga Penyuluhan Pariwisata Tingkat WTW-A, Pembangunan Obyek dan Daya Tarik Wisata Daerah.
11. **Dinas PU Binamarga:** Pengawasan, Pimpro, Laboratorium, Manajemen Proyek, Bendaharawan A.
12. **Dinas Koperasi dan PPK:** Diklat PKL, Pimpro,
13. **Dinas Perindustrian:** teknik Keterampilan Administrasi, Proyek Desain Dan Evaluasi, Diklat Penyuluhan Industri Kecil, Diklat Pengendalian/Pencemaran Industri dan gangguan Lingkungan, Diklat Peningkatan Profesi Madya Bidang Sektoral, Gugus Kendali Mutu Penyuluhan Industri, Fasilitator, GKM, Analisis jabatan, Komputer, Bendaharawan.
14. **Dinas P dan K:** Diklat Perkantoran, Diklat Kepegawaian, Bendaharawan A dan B.
15. **Dinas Perikanan:** Latihan dasar PPL, Latihan Dasar PPM, Pengendalian Dampak Lingkungan, Kursus Bendaharawan, Budi Daya Air Payau, Manajemen Usaha Perikanan, Pengolahan Ikan, Budi Daya Air Tawar.
16. **Dinas Pasar:** Ketata Usahaan, Intensifikasi, Perencanaan, Pola Arsip In aktif, Manajemen Proyek.
17. **Dinas Kebersihan dan Pertamanan:** Pelatihan Persampaahan, Orientasi Organisasi dan Metode, Administrasi Kepegawaian, Kursus Bendaharawan, Penataran staf BAPPEDA, Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian,
18. **Dinas Tenaga Kerja:** Kearsipan, tata Naskah Dinas, Hubungan Perburuhan, Pendayagunaan Tenaga Kerja,
19. **Dinas Peralatan dan Perbengkelan:** Analisis Jabatan, Kursus Bendaharawan,
20. **Dinas Pekerjaan Umum:** Maintenance, LPPU, Pemetaan, PLP, Manajemen Proyek, Apresiasi Penataan Ruang Desa,

F. PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT

INSTANSI	JENIS DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL/MANAJEMEN
1. SETWILDA TK.II	Bimbingan teknis sengketa hukum, Bimbingan dan Penyuluhan Hukum terpadu; Diklat Pengendalian Pencemaran Bagi Aparat Pembina; Diklat Pengujian kendaraan bermotor; Diklat pengelolaan terminanl; Diklat Peningkatan kemampuan usaha pariwisata; Kursus Teknik Sipil; Kursus Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN); Diklat Program Toll For Efectif Districe; Diklat Dinamika Kelompok; Penataran SJDI, Teknik perundang-undangan; Bimbingan teknis produk-produk hukum; Penataran Perpajakan; Penataran Kejuru-sitaan; Diklat PKN; Diklat Audit Manajemen; Diklat TOT Bendaharawan; Diklat Bendaharawan A; Diklat Bendaharawan Daerah; TOT Profesional Kediklatan; TOT Bendaharawan; Kursus Komputer; Penataran Otonomi Daerah; Analisis Jabatan; Analisis kemampuan Aparatur; OM; TOT Manajemen Pimpro; Teknik Administrasi Kepegawaian; Amdal; Kursus Keuangan Daerah; TOT KMP; TOT IDT; Komputer; KMP; TOT Umum; LKD; KKD; Diklat Pimpro; Diklat Bendaharawan; Bimbingan Pemantapan Penyuluhan Hukum Terpadu; Waskat; Diklat Retikatpda; Diklat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia; (PPSDM); Diklat Perpustakaan dan Dokumentasi; Kursus Bahasa Inggris; Diklat Komputeri sasi data pokok; TOT Pengadaan Barang dan Jasa; Diklat Bahasa Indonesia; Management Of Training (MOT); Diklat Telekomunikasi; Kursus Manajemen Proyek;
2. DINAS PERKEBUNAN	Lat.tan. Obat dan rempah; Penggunaan dan pengawasan Pestisida; Budidaya sorgum, kapas, kelapa; Agribisnis dan budidaya kopi; Manajemen Agribisnis; Perencanaan; Bendaharawan; Latihan Dasar PPL; Latihan Teknik Budi daya Perkebunan; Latihan Petugas PHKTK Lapangan dalam rangka PHBK.
3. DINAS PERIKANAN	Budidaya perikanan; Penangkapan ikan; Teknik penyuluhan; Penangganan/Pengelolaan Udang hasil budidaya tambak; Keterampilan dan teknis penangkapan ikan dengan lampara dasar; Keterampilan penangkapan tuna segar; Pemberian ikan nila merah; Latihan PGWPP khusus teknik budi daya laut; DPG-UPGK; Mina padi; Penyakit ikan; Agribisnis budidaya air tawar; Pemberian ikan sistem genogenetis; Budidaya rumput laut; Keterampilan budidaya air payau; Budidaya tripang; Penangkapan ikan; Budidaya udang galah; Mesin kapal perikanan; PTUN; Teknik Penangkapan ikan; Latihan Budidaya ikan; Pemberian ikan; Teknik pengolahan ikan; Bendaharawan.

Lanjutan Nusa Tenggara Barat...

INSTANSI	JENIS DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL/MANAJEMEN
4. BAPPEDA TK.II	TMPPD; PPD; PDE; Kursus Bendahara; Kursus Komputer; Diklat Program Perencanaan Nasional; Amdal; PPN; ICZPM; Project design and evaluation; Kursus Manajemen Proyek; Teknik Manajemen Perencanaan Pembangunan;
5. DINAS PMD	Bendaharawan; TOT IDT; PDT; BKB; PABPLP; PKK;
6. DINAS PU PENGAIRAN	Juru Ukur; Juru Pengairan; PTGA; Pengamat; Laboratorium; Pengawasan; Perencanaan teknis; Penataran Bendaharawan; Desiminasi Petunjuk PPL; Materi Kepres 16/1994; Pelatihan Penyusunan P3K.
7. DINAS PU CIPTAKARYA	Kursus bendaharawan; Diklat Juknis Bidang PAB & PLP; Diklat kebersihan dan penyehatan lingkungan; Penataran Bendaharawan; Desiminasi Petunjuk PPL; Materi Kepres 16/1994; Pelatihan Penyusunan P3K;
8. DINAS PU BINAMARGA	Kursus KPS; Kursus PMS, KM PIP; Kursus teknik kepegawaian; Kursus Amdal; TOT Umum Widyaishwara; Penataran Bendaharawan; Desiminasi Petunjuk PPL; Materi Kepres 16/1994; Pelatihan Penyusunan P3K.
9. DINAS TRANS-MIG RASI DAN PPH	Jupen/PSM; Dasar Komunikasi; PIP; TOC; Bendaharawan;
10. DINAS PENDAPATAN DAERAH	KKD; Kursus Pendapatan daerah; Kursus Bendaharawan; TOT Bendaharawan; Kursus Pamong Praja; Penataran Waskat; Kursus dasar-dasar Pemeriksaan; Komputerisasi MAPATDA; Proyek Manajemen System; Analisis Jabatan; Penataran Perpajakan; Penataran Waskat; KKD; Penataran Kewaspadaan Nasional; PTUN; Kursus perencanaan; Manajemen proyek;
11. DINAS PETERNAKAN	Forage production; Animal management; Parasitologi Viteriner; Patologi Viteriner; Diklat Program Perencanaan Nasional; Penyakit Hewan; IB; Penyuluhan; Keuangan; Kesmavet;
12. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN	PDE; Manajemen Proyek; Latihan dasar I & II bagi PNS Fungsional (PPL dan PPS); Latihan Pembenihan; Latihan petugas pengairan; Latihan usaha tani; Latihan DPG (Diversifikasi Pangan dan Gizi); Diklat Teknik Manajemen; Latihan Pengawasan Keuangan Negara; Latihan Pengawasan Pestisida; Latihan Pemupukan berimbang;
13. DINAS KESEHATAN	Dilat Bidan; Diklat Perawat; Diklat Dokter; Diklat Dokter Gigi;
14. DINAS LLAJ	Diklat PKB; Diklat Pembinaan Transportasi; Diklat Pembinaan terminal; Diklat trafic Light;

Lanjutan Nusa Tenggara Barat...

INSTANSI	JENIS DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL/MANAJEMEN
15. DINAS PER-TAMBANGAN	Zonasi bahan galian golongan C; Diklat Aparatur Kwalifikasi C;
16. DINAS PARIWISATA	Pelatihan penyuluhan wisata; Pelatihan Manajemen Kepariwisataan terpadu; Kursus bendaharawan; Kursus KMP; Kursus penataan obyek wisata; Penataran Pamong Praja; Suspim Pemdagri; Kepegawaian dan Perpustakaan; AMDAL A dan C; Analisis jabatan;
17. DINAS SOSIAL	LDTKS; LKPPS; Latihan Pemantapan PSK; Latihan manajemen UKS; Latihan Pulahta/SIKS;
18. DINAS PER-DAGANGAN	PPL; TOT; Bendaharawan; Standardisasi mutu; Perdagangan Luar Negeri/Dalam negeri;
19. DINAS KOPERASI DAN PPK	Diklat Konsultasi Manajemen Koperasi; Diklat penyusunan program; Diklat Manajemen Audit; Diklat Pasca Panen; Diklat Pembinaan KUD Mandiri; Diklat Kewirausahaan;
20. CADIN KEHUTANAN	KKMA; KP I; KP II; Keterampilan tenaga Kehutanan;
21. DINAS PENDI-DIK AN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Desa Terpadu; Manajemen Proyek; Suspin; Kursus Kearsipan; Kursus Peng. Agraria; Bendaharawan Proyek; Manajemen Proyek; Pendalaman Kepres 16/1994; PPBN; Kearsipan Inaktif;

Sumber: Data Lapangan, Kuesioner, diolah

LAMPIRAN-III/1

Jawaban Responden Mengenai Peningkatan Kualitas Pegawai

JAWABAN NOMOR 1.1	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	99	35.11	99	35.11
PENINGKATAN RENDAH	150	53.19	249	88.30
T E T A P	32	11.35	281	99.65
SEDIKIT PENURUNAN	1	.35	282	100.00
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	282	100.00
 TOTAL	 282	 100.00		

JAWABAN NOMOR 1.2	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	136	46.74	136	46.74
PENINGKATAN RENDAH	108	137.11	244	83.85
T E T A P	27	9.28	271	93.13
SEDIKIT PENURUNAN	2	.69	273	93.81
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	273	93.81
TIDAK MENJAWAB	18	6.19	291	100.00
 TOTAL	 291	 100.00		

JAWABAN NOMOR 1.3	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	65	22.26	65	2.26
PENINGKATAN RENDAH	80	27.40	145	49.66
T E T A P	92	31.51	237	81.16
SEDIKIT PENURUNAN	2	.68	239	81.85
PENURUNAN DRASTIS	2	.68	241	82.53
TIDAK MENJAWAB	51	17.47	292	100.00
 TOTAL	 292	 100.00		

JAWABAN NOMOR 1.4	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	109	37.33	109	37.33
PENINGKATAN RENDAH	116	39.73	225	77.05
T E T A P	47	16.10	272	93.15
SEDIKIT PENURUNAN	0	.00	272	93.15
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	272	93.15
TIDAK MENJAWAB	20	6.85	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 1.5	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	109	37.33	109	37.33
PENINGKATAN RENDAH	112	38.36	221	75.68
T E T A P	52	17.81	273	93.49
SEDIKIT PENURUNAN	5	1.71	278	95.21
PENURUNAN DRASTIS	1	.34	279	95.55
TIDAK MENJAWAB	13	4.45	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 1.6	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	110	37.67	176	60.27
PENINGKATAN RENDAH	69	23.63	245	83.90
T E T A P	5	1.71	250	85.62
SEDIKIT PENURUNAN	1	.34	251	85.96
PENURUNAN DRASTIS	41	14.04	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

Pendapat Responden Mengenai Peningkatan Disiplin Pegawai

JAWABAN NOMOR 2.1	FREQUENCY	PERCENT	...CUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	189	64.73	189	64.73
PENINGKATAN RENDAH	81	27.74	270	92.47
T E T A P	13	4.45	283	96.92
SEDIKIT PENURUNAN	0	.00	283	96.92
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	283	96.92
TIDAK MENJAWAB	9	3.08	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 2.2	FREQUENCY	PERCENT	...CUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	167	57.19	167	57.19
PENINGKATAN RENDAH	94	32.19	261	89.38
T E T A P	21	7.19	282	96.58
SEDIKIT PENURUNAN	4	1.37	286	97.95
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	286	97.95
TIDAK MENJAWAB	6	2.05	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 2.3	FREQUENCY	PERCENT	...CUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	161	55.14	161	55.14
PENINGKATAN RENDAH	96	32.88	257	88.01
T E T A P	28	9.59	285	97.60
SEDIKIT PENURUNAN	1	.34	286	97.95
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	286	97.95
TIDAK MENJAWAB	6	2.05	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

EVALUASI MIDTERM PELITA VI SEKTOR APARATUR NEGARA

JAWABAN NOMOR 2.4	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	98	33.56	98	33.56
PENINGKATAN RENDAH	81	27.74	179	61.30
T E T A P	56	19.18	235	80.48
SEDIKIT PENURUNAN	27	9.25	262	89.73
PENURUNAN DRASTIS	20	6.85	282	96.58
TIDAK MENJAWAB	10	3.42	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 2.5	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	42	14.38	42	14.38
PENINGKATAN RENDAH	75	25.68	117	40.07
T E T A P	117	40.07	234	80.14
SEDIKIT PENURUNAN	4	1.37	238	81.51
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	238	81.51
TIDAK MENJAWAB	54	18.49	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 2.6	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	84	28.77	84	28.77
PENINGKATAN RENDAH	94	32.19	178	60.96
T E T A P	76	26.03	254	86.99
SEDIKIT PENURUNAN	3	1.03	257	88.01
PENURUNAN DRASTIS	1	.34	258	88.36
TIDAK MENJAWAB	34	11.64	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 2.7	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	166	56.85	166	56.85
PENINGKATAN RENDAH	85	29.11	251	85.96
T E T A P	23	7.88	274	93.84
SEDIKIT PENURUNAN	1	.34	275	94.18
PENURUNAN DRASTIS	1	.34	276	94.52
TIDAK MENJAWAB	16	5.48	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 2.8	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	130	44.52	130	44.52
PENINGKATAN RENDAH	46	15.75	176	60.27
T E T A P	28	9.59	204	69.86
SEDIKIT PENURUNAN	7	2.40	211	72.26
PENURUNAN DRASTIS	16	5.48	227	77.74
TIDAK MENJAWAB	65	22.26	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 2.9	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	121	41.44	121	41.44
PENINGKATAN RENDAH	35	11.99	156	53.42
T E T A P	25	8.56	181	61.99
SEDIKIT PENURUNAN	5	1.71	186	63.70
PENURUNAN DRASTIS	23	7.88	209	71.58
TIDAK MENJAWAB	83	28.42	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

**Pendapat Responden Tentang Peningkatan Kualitas Perencanaan
Pembangunan**

JAWABAN NOMOR 3.1	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	147	50.34	147	50.34
PENINGKATAN RENDAH	84	28.77	231	79.11
T E T A P	31	10.62	262	89.73
SEDIKIT PENURUNAN	1	.34	263	90.07
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	263	90.07
TIDAK MENJAWAB	29	9.93	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 3.2	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	92	31.51	92	31.51
PENINGKATAN RENDAH	132	45.21	224	76.71
T E T A P	38	13.01	262	89.73
SEDIKIT PENURUNAN	7	2.40	269	92.12
PENURUNAN DRASTIS	1	.34	270	92.47
TIDAK MENJAWAB	22	7.53	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 3.3	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	126	43.15	126	43.15
PENINGKATAN RENDAH	80	27.40	206	70.55
T E T A P	51	17.47	257	88.01
SEDIKIT PENURUNAN	0	.00	257	88.01
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	257	88.01
TIDAK MENJAWAB	35	11.99	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 3.4	FREQUENCY	PERCENT	...CUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	125	42.81	125	42.81
PENINGKATAN RENDAH	98	33.56	223	76.37
T E T A P	39	13.36	262	89.73
SEDIKIT PENURUNAN	0	.00	262	89.73
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	262	89.73
TIDAK MENJAWAB	30	10.27	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 3.5	FREQUENCY	PERCENT	...CUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	150	51.37	150	51.37
PENINGKATAN RENDAH	88	30.14	238	81.51
T E T A P	33	11.30	271	92.81
SEDIKIT PENURUNAN	0	.00	271	92.81
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	271	92.81
TIDAK MENJAWAB	21	7.19	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 3.6	FREQUENCY	PERCENT	...CUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	166	56.85	166	56.85
PENINGKATAN RENDAH	86	29.45	252	86.30
T E T A P	18	6.16	270	92.47
SEDIKIT PENURUNAN	0	.00	270	92.47
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	270	92.47
TIDAK MENJAWAB	22	7.53	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

Pendapat Responden Tentang Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Program

JAWABAN NOMOR 4.1	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	163	55.82	163	55.82
PENINGKATAN RENDAH	69	23.63	232	79.45
T E T A P	42	14.38	274	93.84
SEDIKIT PENURUNAN	0	.00	274	93.84
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	274	93.84
TIDAK MENJAWAB	18	6.16	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 4.2	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	164	56.16	164	56.16
PENINGKATAN RENDAH	87	29.79	251	85.96
T E T A P	26	8.90	277	94.86
SEDIKIT PENURUNAN	0	.00	277	94.86
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	277	94.86
TIDAK MENJAWAB	15	5.14	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 4.3	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	177	60.62	177	60.62
PENINGKATAN RENDAH	74	25.34	251	85.96
T E T A P	25	8.56	276	94.52
SEDIKIT PENURUNAN	0	.00	276	94.52
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	276	94.52
TIDAK MENJAWAB	16	5.48	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 4.4	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	128	43.84	128	43.84
PENINGKATAN RENDAH	110	37.67	238	81.51
T E T A P	40	13.70	278	95.21
SEDIKIT PENURUNAN	0	.00	278	95.21
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	278	95.21
TIDAK MENJAWAB	14	4.79	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 4.5	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	159	54.64	159	54.64
PENINGKATAN RENDAH	82	28.18	241	82.82
T E T A P	31	10.65	272	93.47
SEDIKIT PENURUNAN	1	.34	273	93.81
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	273	93.81
TIDAK MENJAWAB	18	6.19	291	100.00
TOTAL	291	100.00		

JAWABAN NOMOR 4.6	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	118	40.41	118	40.41
PENINGKATAN RENDAH	95	32.53	213	72.95
T E T A P	58	19.86	271	92.81
SEDIKIT PENURUNAN	3	1.03	274	93.84
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	274	93.84
TIDAK MENJAWAB	18	6.16	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 4.7	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	133	45.55	133	45.55
PENINGKATAN RENDAH	92	31.51	225	77.05
T E T A P	46	15.75	271	92.81
SEDIKIT PENURUNAN	2	.68	273	93.49
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	273	93.49
TIDAK MENJAWAB	19	6.51	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 4.8	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	141	48.29	141	48.29
PENINGKATAN RENDAH	98	33.56	239	81.85
T E T A P	35	11.99	274	93.84
SEDIKIT PENURUNAN	0	.00	274	93.84
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	274	93.84
TIDAK MENJAWAB	18	6.16	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 4.9	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	97	33.33	97	33.33
PENINGKATAN RENDAH	99	34.02	196	67.35
T E T A P	59	20.27	255	87.63
SEDIKIT PENURUNAN	1	.34	256	87.97
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	256	87.97
TIDAK MENJAWAB	35	12.03	291	100.00
TOTAL	291	100.00		

JAWABAN NOMOR 4.10	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	89	30.58	89	30.58
PENINGKATAN RENDAH	92	31.62	181	62.20
T E T A P	45	15.46	226	77.66
SEDIKIT PENURUNAN	2	.69	228	78.35
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	228	78.35
TIDAK MENJAWAB	63	21.65	291	100.00
TOTAL	291	100.00		

JAWABAN NOMOR 4.11	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	123	42.12	123	42.12
PENINGKATAN RENDAH	98	33.56	221	75.68
T E T A P	48	16.44	269	92.12
SEDIKIT PENURUNAN	1	.34	270	92.47
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	270	92.47
TIDAK MENJAWAB	22	7.53	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 4.12	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	85	29.11	85	29.11
PENINGKATAN RENDAH	115	39.38	200	68.49
T E T A P	64	21.92	264	90.41
SEDIKIT PENURUNAN	4	1.37	268	91.78
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	268	91.78
TIDAK MENJAWAB	24	8.22	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 4.13CUMULATIVE...			
	FREQUENCY	PERCENT	FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	118	40.41	118	40.41
PENINGKATAN RENDAH	97	33.22	215	73.63
T E T A P	58	19.86	273	93.49
SEDIKIT PENURUNAN	1	.34	274	93.84
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	274	93.84
TIDAK MENJAWAB	18	6.16	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 4.14CUMULATIVE...			
	FREQUENCY	PERCENT	FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	76	26.03	76	26.03
PENINGKATAN RENDAH	114	39.04	190	65.07
T E T A P	76	26.03	266	91.10
SEDIKIT PENURUNAN	6	2.05	272	93.15
PENURUNAN DRASTIS	1	.34	273	93.49
TIDAK MENJAWAB	19	6.51	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 4.15CUMULATIVE...			
	FREQUENCY	PERCENT	FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	67	22.95	67	22.95
PENINGKATAN RENDAH	121	41.44	188	64.38
T E T A P	78	26.71	266	91.10
SEDIKIT PENURUNAN	4	1.37	270	92.47
PENURUNAN DRASTIS	1	.34	271	92.81
TIDAK MENJAWAB	21	7.19	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 4.16	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	81	27.74	81	27.74
PENINGKATAN RENDAH	102	34.93	183	62.67
T E T A P	76	26.03	259	88.70
SEDIKIT PENURUNAN	4	1.37	263	90.07
PENURUNAN DRASTIS	1	.34	264	90.41
TIDAK MENJAWAB	28	9.59	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 4.17	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	95	32.53	95	32.53
PENINGKATAN RENDAH	95	32.53	190	65.07
T E T A P	71	24.32	261	89.38
SEDIKIT PENURUNAN	1	.34	262	89.73
PENURUNAN DRASTIS	1	.34	263	90.07
TIDAK MENJAWAB	29	9.93	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 4.18	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	67	22.95	67	22.95
PENINGKATAN RENDAH	122	41.78	189	64.73
T E T A P	69	23.63	258	88.36
SEDIKIT PENURUNAN	0	.00	258	88.36
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	258	88.36
TIDAK MENJAWAB	34	11.64	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

.....CUMULATIVE...

JAWABAN NOMOR 4.19 FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

PENINGKATAN TINGGI	54	18.49	54	18.49
PENINGKATAN RENDAH	139	47.60	193	66.10
T E T A P	63	21.58	256	87.67
SEDIKIT PENURUNAN	11	3.77	267	91.44
PENURUNAN DRASTIS	2	.68	269	92.12
TIDAK MENJAWAB	23	7.88	292	100.00

TOTAL 292 100.00

.....CUMULATIVE...

JAWABAN NOMOR 4.20 FREQUENCY PERCENT FREQUENCY PERCENT

PENINGKATAN TINGGI	120	41.10	120	41.10
PENINGKATAN RENDAH	107	36.64	227	77.74
T E T A P	44	15.07	271	92.81
SEDIKIT PENURUNAN	0	.00	271	92.81
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	271	92.81
TIDAK MENJAWAB	21	7.19	292	100.00

TOTAL 292 100.00

**Pendapat Responden Tentang Peningkatan Koordinasi Antar Instansi
Pemerintah Di Daerah Dalam Melaksanakan Pembangunan**

JAWABAN NOMOR 5.1	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	175	59.93	175	59.93
PENINGKATAN RENDAH	88	30.14	263	90.07
T E T A P	16	5.48	279	95.55
SEDIKIT PENURUNAN	0	.00	279	95.55
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	279	95.55
TIDAK MENJAWAB	13	4.45	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 5.2	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	166	56.85	166	56.85
PENINGKATAN RENDAH	91	31.16	257	88.01
T E T A P	22	7.53	279	95.55
SEDIKIT PENURUNAN	0	.00	279	95.55
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	279	95.55
TIDAK MENJAWAB	13	4.45	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 5.3	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	156	53.42	156	53.42
PENINGKATAN RENDAH	95	32.53	251	85.96
T E T A P	25	8.56	276	94.52
SEDIKIT PENURUNAN	0	.00	276	94.52
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	276	94.52
TIDAK MENJAWAB	16	5.48	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 5.4	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	110	37.67	110	37.67
PENINGKATAN RENDAH	114	39.04	224	76.71
T E T A P	47	16.10	271	92.81
SEDIKIT PENURUNAN	1	.34	272	93.15
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	272	93.15
TIDAK MENJAWAB	20	6.85	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 5.5	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	103	35.40	103	35.40
PENINGKATAN RENDAH	122	41.92	225	77.32
T E T A P	42	14.43	267	91.75
SEDIKIT PENURUNAN	1	.34	268	92.10
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	268	92.10
TIDAK MENJAWAB	23	7.90	291	100.00
TOTAL	291	100.00		

**Pendapat Responden Tentang Peningkatan Kualitas dan Frakuensi
Pengawasan/Evaluasi Serta Tindak Lanjut Dari Hasil Pengawasan dan
Evaluasi**

JAWABAN NOMOR 6.1	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	167	57.19	167	57.19
PENINGKATAN RENDAH	78	26.71	245	83.90
T E T A P	26	8.90	271	92.81
SEDIKIT PENURUNAN	0	.00	271	92.81
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	271	92.81
TIDAK MENJAWAB	21	7.19	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 6.2	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	140	47.95	140	47.95
PENINGKATAN RENDAH	97	33.22	237	81.16
T E T A P	33	11.30	270	92.47
SEDIKIT PENURUNAN	0	.00	270	92.47
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	270	92.47
TIDAK MENJAWAB	22	7.53	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 6.3	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	137	46.92	137	46.92
PENINGKATAN RENDAH	89	30.48	226	77.40
T E T A P	41	14.04	267	91.44
SEDIKIT PENURUNAN	1	.34	268	91.78
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	268	91.78
TIDAK MENJAWAB	24	8.22	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 6.4	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	78	26.71	78	26.71
PENINGKATAN RENDAH	98	33.56	176	60.27
T E T A P	73	25.00	249	85.27
SEDIKIT PENURUNAN	10	3.42	259	88.70
PENURUNAN DRASTIS	3	1.03	262	89.73
TIDAK MENJAWAB	30	10.27	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 6.5	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	117	40.07	117	40.07
PENINGKATAN RENDAH	99	33.90	216	73.97
T E T A P	50	17.12	266	91.10
SEDIKIT PENURUNAN	2	.68	268	91.78
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	268	91.78
TIDAK MENJAWAB	24	8.22	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 6.6	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	108	36.99	108	36.99
PENINGKATAN RENDAH	82	28.08	190	65.07
T E T A P	50	17.12	240	82.19
SEDIKIT PENURUNAN	11	3.77	251	85.96
PENURUNAN DRASTIS	7	2.40	258	88.36
TIDAK MENJAWAB	34	11.64	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 6.7	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	141	48.29	141	48.29
PENINGKATAN RENDAH	83	28.42	224	76.71
T E T A P	42	14.38	266	91.10
SEDIKIT PENURUNAN	3	1.03	269	92.12
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	269	92.12
TIDAK MENJAWAB	23	7.88	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 6.8	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	138	47.26	138	47.26
PENINGKATAN RENDAH	94	32.19	232	79.45
T E T A P	35	11.99	267	91.44
SEDIKIT PENURUNAN	1	.34	268	91.78
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	268	91.78
TIDAK MENJAWAB	24	8.22	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 6.9	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	172	58.90	172	58.90
PENINGKATAN RENDAH	69	23.63	241	82.53
T E T A P	26	8.90	267	91.44
SEDIKIT PENURUNAN	0	.00	267	91.44
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	267	91.44
TIDAK MENJAWAB	25	8.56	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 6.10	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	138	47.26	138	47.26
PENINGKATAN RENDAH	80	27.40	218	74.66
T E T A P	46	15.75	264	90.41
SEKITIK PENURUNAN	0	.00	264	90.41
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	264	90.41
TIDAK MENJAWAB	28	9.59	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 6.11	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	167	57.19	167	57.19
PENINGKATAN RENDAH	81	27.74	248	84.93
T E T A P	24	8.22	272	93.15
SEKITIK PENURUNAN	0	.00	272	93.15
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	272	93.15
TIDAK MENJAWAB	20	6.85	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 6.12	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	145	49.66	145	49.66
PENINGKATAN RENDAH	88	30.14	233	79.79
T E T A P	30	10.27	263	90.07
SEKITIK PENURUNAN	0	.00	263	90.07
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	263	90.07
TIDAK MENJAWAB	29	9.93	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

**Pendapat Responden Tentang Peningkatan Kemampuan Mobilisasi
Berbagai Sumber Keuangan Daerah**

JAWABAN NOMOR 7.1	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	129	44.18	129	44.18
PENINGKATAN RENDAH	76	26.03	205	70.21
T E T A P	26	8.90	231	79.11
SEDIKIT PENURUNAN	1	.34	232	79.45
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	232	79.45
TIDAK MENJAWAB	60	20.55	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 7.2	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	83	28.42	83	28.42
PENINGKATAN RENDAH	100	34.25	183	62.67
T E T A P	37	12.67	220	75.34
SEDIKIT PENURUNAN	5	1.71	225	77.05
PENURUNAN DRASTIS	1	.34	226	77.40
TIDAK MENJAWAB	66	22.60	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 7.3	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	66	22.60	66	22.60
PENINGKATAN RENDAH	91	31.16	157	53.77
T E T A P	58	19.86	215	73.63
SEDIKIT PENURUNAN	0	.00	215	73.63
PENURUNAN DRASTIS	2	.68	217	74.32
TIDAK MENJAWAB	75	25.68	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 7.4	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	32	10.96	32	10.96
PENINGKATAN RENDAH	61	20.89	93	31.85
T E T A P	57	19.52	150	51.37
SEDIKIT PENURUNAN	1	.34	151	51.71
PENURUNAN DRASTIS	1	.34	152	52.05
TIDAK MENJAWAB	140	47.95	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 7.5	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	27	9.25	27	9.25
PENINGKATAN RENDAH	57	19.52	84	28.77
T E T A P	51	17.47	135	46.23
SEDIKIT PENURUNAN	0	.00	135	46.23
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	135	46.23
TIDAK MENJAWAB	157	53.77	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 7.6	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	105	35.96	105	35.96
PENINGKATAN RENDAH	76	26.03	181	61.99
T E T A P	29	9.93	210	71.92
SEDIKIT PENURUNAN	1	.34	211	72.26
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	211	72.26
TIDAK MENJAWAB	81	27.74	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 7.7	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	96	32.88	96	32.88
PENINGKATAN RENDAH	76	26.03	172	58.90
T E T A P	26	8.90	198	67.81
SEDIKIT PENURUNAN	4	1.37	202	69.18
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	202	69.18
TIDAK MENJAWAB	90	30.82	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 7.8	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	84	28.77	84	28.77
PENINGKATAN RENDAH	85	29.11	169	57.88
T E T A P	33	11.30	202	69.18
SEDIKIT PENURUNAN	1	.34	203	69.52
PENURUNAN DRASTIS	1	.34	204	69.86
TIDAK MENJAWAB	88	30.14	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 7.9	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	129	44.18	129	44.18
PENINGKATAN RENDAH	69	23.63	198	67.81
T E T A P	24	8.22	222	76.03
SEDIKIT PENURUNAN	3	1.03	225	77.05
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	225	77.05
TIDAK MENJAWAB	67	22.95	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 7.10	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	119	40.75	119	40.75
PENINGKATAN RENDAH	75	25.68	194	66.44
TETAP	23	7.88	217	74.32
SEDIKIT PENURUNAN	2	.68	219	75.00
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	219	75.00
TIDAK MENJAWAB	73	25.00	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

**Pendapat Responden Tentang Peningkatan Pelayanan Aparat
Terhadap Masyarakat**

JAWABAN NOMOR 8.1	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	181	61.99	181	61.99
PENINGKATAN RENDAH	75	25.68	256	87.67
T E T A P	12	4.11	268	91.78
SEDIKIT PENURUNAN	0	.00	268	91.78
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	268	91.78
TIDAK MENJAWAB	24	8.22	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 8.2	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	173	59.25	173	59.25
PENINGKATAN RENDAH	80	27.40	253	86.64
T E T A P	18	6.16	271	92.81
SEDIKIT PENURUNAN	0	.00	271	92.81
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	271	92.81
TIDAK MENJAWAB	21	7.19	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 8.3	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	170	58.22	170	58.22
PENINGKATAN RENDAH	84	28.77	254	86.99
T E T A P	16	5.48	270	92.47
SEDIKIT PENURUNAN	0	.00	270	92.47
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	270	92.47
TIDAK MENJAWAB	22	7.53	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 8.4	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	170	58.22	170	58.22
PENINGKATAN RENDAH	76	26.03	246	84.25
T E T A P	21	7.19	267	91.44
SEDIKIT PENURUNAN	0	.00	267	91.44
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	267	91.44
TIDAK MENJAWAB	25	8.56	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 8.5	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	147	50.34	147	50.34
PENINGKATAN RENDAH	98	33.56	245	83.90
T E T A P	21	7.19	266	91.10
SEDIKIT PENURUNAN	1	.34	267	91.44
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	267	91.44
TIDAK MENJAWAB	25	8.56	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

**Pendapat Responden Tentang Pembentukan Atau Penyempurnaan
Perangkat Peraturan Perundang-undangan di Daerah**

JAWABAN NOMOR 9.1	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	110	37.67	110	37.67
PENINGKATAN RENDAH	80	27.40	190	65.07
T E T A P	34	11.64	224	76.71
SEDIKIT PENURUNAN	0	.00	224	76.71
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	224	76.71
TIDAK MENJAWAB	68	23.29	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 9.2	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	111	38.01	111	38.01
PENINGKATAN RENDAH	68	23.29	179	61.30
T E T A P	39	13.36	218	74.66
SEDIKIT PENURUNAN	0	.00	218	74.66
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	218	74.66
TIDAK MENJAWAB	74	25.34	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 9.3	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	102	34.93	102	34.93
PENINGKATAN RENDAH	86	29.45	188	64.38
T E T A P	31	10.62	219	75.00
SEDIKIT PENURUNAN	3	1.03	222	76.03
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	222	76.03
TIDAK MENJAWAB	70	23.97	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 9.4	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	96	32.88	96	32.88
PENINGKATAN RENDAH	80	27.40	176	60.27
T E T A P	38	13.01	214	73.29
SEDIKIT PENURUNAN	2	.68	216	73.97
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	216	73.97
TIDAK MENJAWAB	76	26.03	292	100.00
 TOTAL	 292	 100.00		

Pendapat Responden Tentang Penataan Kembali Batas Wilayah dan Daerah Dalam Rangka Pemekaran dan Penyesuaian Status Daerah Tertentu

JAWABAN NOMOR 10.1	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	67	22.95	67	22.95
PENINGKATAN RENDAH	35	11.99	102	34.93
T E T A P	39	13.36	141	48.29
SEDIKIT PENURUNAN	1	.34	142	48.63
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	142	48.63
TIDAK MENJAWAB	150	51.37	292	100.00
 TOTAL	 292	 100.00		

JAWABAN NOMOR 10.2	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	72	24.66	72	24.66
PENINGKATAN RENDAH	38	13.01	110	37.67
T E T A P	31	10.62	141	48.29
SEDIKIT PENURUNAN	1	.34	142	48.63
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	142	48.63
TIDAK MENJAWAB	150	51.37	292	100.00
 TOTAL	 292	 100.00		

Pendapat Responden Tentang Peningkatan Kemampuan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

JAWABAN NOMOR 11.1	FREQUENCY	PERCENT	...CUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	82	28.08	82	28.08
PENINGKATAN RENDAH	67	22.95	149	51.03
T E T A P	20	6.85	169	57.88
SEDIKIT PENURUNAN	1	.34	170	58.22
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	170	58.22
TIDAK MENJAWAB	122	41.78	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 11.2	FREQUENCY	PERCENT	...CUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	86	29.45	86	29.45
PENINGKATAN RENDAH	55	18.84	141	48.29
T E T A P	26	8.90	167	57.19
SEDIKIT PENURUNAN	1	.34	168	57.53
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	168	57.53
TIDAK MENJAWAB	124	42.47	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 11.3	FREQUENCY	PERCENT	...CUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	89	30.48	89	30.48
PENINGKATAN RENDAH	51	17.47	140	47.95
T E T A P	27	9.25	167	57.19
SEDIKIT PENURUNAN	0	.00	167	57.19
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	167	57.19
TIDAK MENJAWAB	125	42.81	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

JAWABAN NOMOR 11.4	FREQUENCY	PERCENTCUMULATIVE...	
			FREQUENCY	PERCENT
PENINGKATAN TINGGI	76	26.03	76	26.03
PENINGKATAN RENDAH	68	23.29	144	49.32
T E T A P	20	6.85	164	56.16
SEDIKIT PENURUNAN	1	.34	165	56.51
PENURUNAN DRASTIS	0	.00	165	56.51
TIDAK MENJAWAB	127	43.49	292	100.00
TOTAL	292	100.00		

LAMPIRAN-IV/1

**DAFTAR BEBERAPA PROYEK PAN DALAM DAN DI LUAR SEKTOR
APARATUR NEGARA
DAN PENGAWASAN DI BEBERAPA INSTANSI DT.II YANG ADA DI
PROPINSI DT.I
TAHUN 1994/1995 S.D. TAHUN 1996/1997**

**DAFTAR BEBERAPA PROYEK PADA DALAM DAN DI LUAR SEKTOR APARATUR NEGARA
DAN PENGAWASAN DI BEBERAPA INSTANSI DITI YANG ADA DI PROVINSI D.I.
TAHUN 1994/1995 S.D. TAHUN 1996/1997**

A. PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No.	KAB/KOTA	INSTANSI	NAMA PROYEK	KODE PROYEK	NILAI PROYEK	TUJUAN PROYEK	SASARAN PROYEK	TOLOK UKUR DAN KEGIATAM		REALISASI		DAMPAK DAN MANFAAT PROYEK
								FISIK	%	KEUANGAN	%	
1.	Bandung	Bag. Hukum	Peningkatan Penerapan Prasrama Hukum	2. P.0 17.1 07.001	15	Mewujudkan perundang-undangan untuk diterahui oleh Aparatur Pemerintah dan Masyarakat mewujudkan mewujudkan perundang-undangan yang berlaku	Agar Aparatur Pemerintah dan masyarakat mewujudkan perundang-undangan yang berlaku	-Penataan Bina-bang teknis pengelola SDM -mewujudkan tujuan peraturan -pembinaan SDM	-	-	15	Aparatur dan masyarakat akan lebih cepat mengstuhul peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lanjutkan Jawa Barat...							DAMPAK DAN MANFAAT PROYEK					
No.	KAB/KOTA	INSTANSI	NAMA PROYEK	KODE	NILAI PROYEK	TUJUAN PROYEK						
2.	Kab. Bandung	Dinas PPD (Pembangunan Masyarakat Desa)	Bantuan Pe- ngembangan & Pengelolaan (BPP)		18.800,- 000,-	Untuk mendukung kegiatan perencanaan, latihan pratirik dan pendamping terhadap Pokmas UEP masyarakat dan pengelolaan serta pengadaan Buku pedoman prasaranas Desa/TIG	<p>•Penyelenggaraan Pelatihan kader, Pengelola Taker, Pelatihan kasi PIID</p> <p>-Bantuan pendamping terhadap Pokmas UEP Bandes</p> <p>-Bantuan dan evaluasi serta pengadaan Buku pedoman prasaranas Desa/TIG</p> <p>-Pelatihan Tingkat Desa, Kecamatan, UED-SP</p> <p>-Bantuan modal- usaha bagi anggota Pokmas.</p> <p>-Penyaluran kredit</p> <p>-Pembangunan de</p> <p>sa guna memperbaiki hasil se- cara optimal</p>	REALISASI				
								FISIK	%	KEUANGAN	%	

EVALUASI MIDTERM PELITA VI SEKTOR APARATUR NEGARA

Lanjutkan Jawa Barat...

No.	KAB/KOTA	INSTANSI	NAMA PROYEK	KODE PROYEK	NILAI PROYEK	TUJUAN PROYEK	SASARAN PROYEK	TOLOK UKUR DAN KEGIATAN		REALISASI		DAMPAK DAN MANFAAT PROYEK
								FISIK	%	KEUANGAN	%	
3.	Kab.Bandung	Dinas Koperasi dan Perkoperasi	Diklat Perkoperasi	2 P.O 54.01 002	10.000,- 000,-	Heningkattan kesadaran ma syarakat akan pentingnya ar- tikel koperasi	-Terliahnya 50 orang pengelola koperasi dan BPP KUD	-Persiapan orang pengelola koperasi dan BPP	-pelaksanaan -pelaporan	10.000.000	100%	Bertambahnya pengeluhun/ ketimpilan basi pengelola koperasi
4.	Kab.Bandung	Dinas Koperasi dan Perkoperasi	Diklat Perkoperasi	2 P.O 54.01 002	10.000,- 000,-	-Heningkattan pengeluhun/ ketimpilan pengelola koperasi	-Terliahnya 80 orang pengelola koperasi	A. Persiapan B. Pelaksanaan	Diklat bagi 80 orang pengelola/ pengurus KUD/ pengelola koperasi (2 x 40 orang)			

Lanjutkan Jawa Barat...»					DAMPAK DAN MANFAAT PROYEK						
No.	KAB/KOTA	INSTANSI	NAMA PROYEK	KODE	HILAI PROYEK	TUJUAN PROYEK	SASARAN PROYEK	TOLOK UJUR DAN KEGIATAN	REALISASI		
									FISIK	%	KEUANGAN
											%
								<ol style="list-style-type: none"> 1. Alatmodasi & ruang kelas peserta. 2. Jamuan makan & snack 3. Bahan/maaeri pengabdahan alat untuk peserta 4. Uang sakuk/pengganti transportasi 5. Biaya kesehatan 6. Biaya pembukuan & penutupan 7. Bahan/bahan/sewa kendaraan 8. Uang lelah penaruh 9. Rupat pelaksanaan 10-Evaluasi awal kesuksesan peserta 11-Dokumentasi 	10.000.000	100	Meningkatnya pengertian SDM koperasi yang akan meningkatkan fungsi dan kigiatan koperasi.

Lanjutkan Jawa Barat...

NO.	KAB/KOTA	INSTANSI	NAMA PROYEK	KODE PROYEK	NILAI PROYEK	TUJUAN PROYEK	SASARAN PROYEK	TOLOK UKUR DAN KEGIATAN		REALISASI		DAMPAK DAN MANFAAT PROYEK
								FISIK	%	KEUANGAN	%	
5.	Bandung	Dinas Koperasi	Diklat Perkoperasi	2 P.O 54.01	27.500.000,-	Meningkatkan pengertian/kemampuan pengelola koperasi	<ul style="list-style-type: none"> - Terlatihnya 160 orang pengelola/Diklat bagi 160 orang pengelola/pengurus KUD/Kop (4 x 40 orang) 1. Akomodasi & ruang kelas peserta. 2. Jamuan makan & snack. 3. Bahan/materi pengabdian alat untuk presentasi 4. Uang sakur/pengant transpor ganti 5. Blaya keschatan 6. Blaya pembukuan & penelitian 7. Bahan-bahan/sewa kendaraan 8. Uang telah penyerahan modal 9. Bantuan modal (3 KUD) 10. Paparan Spenduk 11. Blaya persiapan dan 12. Administrasi & pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> A. Persiapan B. pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - 10.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 	<ul style="list-style-type: none"> Bertambahnya pengertian/kemampuan pengelola koperasi Meningkatnya pengertian SDM Koperasi yang akan meningkatkan fungsi dan kognisi koperasi 	

Lanjutkan Jawab Berantai...

No.	KAB/KOTA	INSTANSI	NAMA PROYEK	KODE	NILAI PROYEK	TUJUAN PROYEK	SASARAN PROYEK	TOLOK UKUR DAN KEGIATAN	REALISASI			DAMPAK DAN MANFAAT PROYEK
									FISIK	%	KEUANGAN	
6.	Kab. Tasik	Bagian Keperwakilan	1. Pelaksanaan Diklat			- Pengumuman/ penyampaian surat ketetapan kerja						
			a. Penjangkutan kerja adam Admin & Spame Spanien			- Pemberkasan - Penyerangan bapak/buak						
			b. Subsidi/dideg ri			- Pelaksanaan Testing						
			c. Fungsional			- Pelaksanaan Diklat						
			2. Analisa kebutuhan pegawai/pengembangan pegawai			- Penyampaikan surat/formulir ketetip unit kerja,						
						- pembahasan/ma lisa bersama basian organisasi.						
						- penyusunan kebutuhan pegawai						
						- pelaporan/peri mohonan ke tingkat atas						
						- penerimaan pekerja						

Lanjutan Jawa Barat. . .

NO.	KAB/KOTA	INSTANSI	NAMA PROYEK	KODE PROYEK	NILAI PROYEK	TUJUAN PROYEK	SASARAN PROYEK	TOLOK UKUR DAN KEGIATAN		REALISASI		DAMPAK DAN MANFAAT PROYEK
								FISIK	%	KEUANGAN	%	
			3. Mutasasi Pengawas			- Pendekatan/penerapan administrasi.						
			4. Pembinaan Pengawas			- Pelaksanaan Pembinaan jadwal pembinaan - Pelaksanaan pembinaan ke unit kerja sesuai dengan jadwal.						

LAPORAN EVALUASI PROYEK

Lanjutan Jawab Berat...

No.	KAB/KODYA	INSTANSI	NAMA PROYEK	KODE	NILAI PROYEK	TUJUAN PROYEK	SASARAN PROYEK	TOLOK UKUR DAN KEGIATAN	REALISASI			DAMPAK DAN MANFAAT PROYEK
									FISIK	%	KEUANGAN	
			5. pemahaman tugas sesuai dengan Struktur Organisasi			-Menjalankan tugas sesuai dengan struktur organisasi -Menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan struktur organisasi -Menjalankan tugas masing-masing			70			
			6. Kebijaksanaan pelaksanaan			-Mengupayakan peningkatan efisiensi kerja Aparatur Serta meningkatkan disiplin Peserta Negeri Stabil dilengkungan Pemerintah kab.D.I. II taktik			75			
			7. pelaksanaan Tugas sesuai dengan encana kerja			-Mengarahkan seluruh staff untuk melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja			100			

EVALUASI MIDTERM PELITA VI SEKTOR APARATUR NEGARA

Lanjutan Jawa Barat...

NO.	KAB/KOTA	INSTANSI	NAMA PROYEK	KODE PROYEK	NILAI PROYEK	TUJUAN PROYEK	SASARAN PROYEK	TOKOK UKUR DAN KEGIATAN	REALISASI			
									FISIK	%	KEUANGAN	%
			8. Mutasasi Pegawai					- Melaksanakan kegiatan mutasi pegawai dalam rangka penyerahan dan penerimaan/pelepasan.		100		
			9. Pendidikan dan Latihan					- Memberikan kesempatan kepada para pejabat/pegawai yang memenuhi syarat		100		
			10. Pemberian Penghargaan					- Memberikan pemberian penghargaan sekaligus evaluasi, tenting pena, ngan dan administrasi kepelepasan, pemahaman serta ketatanurut kepada peraturan yang berlaku bagi pegawai	60			

Lanjutkan Jawa Berat...

NO.	KAB/KOTA	INSTANSI	NAMA PROYEK	KODE	NILAI PROYEK	TUJUAN PROYEK	SASARAN PROYEK	TOLOK UKUR DAN KEGIATAN	REALISASI			DAMPAK DAN MANFAAT PROYEK
									FISIK	%	KEUANGAN	
			11. Peningkatan Efisiensi Aparatur			-Kebijaksanaan pelaksanaan						-Meningkatnya prestasi, dedikasi, loyalitas, disiplin, ketekunan & pengabdian setiap aparatur
			12. Pengadaan pegawai			-Rencana kerja -Mutasi kepegawaian -Peningkatan status pegawai dari CPNS -Kesiapan pengkajian -Keharusan gaji berktala -Pemenuhan -Perbaikan masa kerja -Mutasi jabatan -Pendidikan & Latihan -Pendidikan Kader -Pendidikan Penjenjangan -Pendidikan Fungsional -Rebinaan Kegiatan						-Terhadap ke sembangan jumlah pegawai dengan beban tugas dan volume kerja -Penyerahan penghargaan pada pegawai tepat waktunya, tepat orang dan tetap sasaran -Peningkatan pelayanan Aparatur yang berorientasi kepada kesiapan, kekkopan, tata teknologi pendidikan dan latihan tertentu.

Lantjulari, Jukka 601

No.	KAB/KODA	INSTANSI	NAMA PROYEK	KODE PROYEK	NILAI PROYEK	TUJUAN PROYEK	SASARAN PROYEK	TOLAK UKUR DAN KEGIATAN			REALISASI		DAMPAK DAN MANFAAT PROYEK
								FISIK	%	KEUANGAN	%		
			13. Peningkatan Layanan Administrasi Kepergawainan			-Prosedur Kerja							-Adanya petunjuk perbaikan yang diberikan dalam pelaksanaan pengelolaan Administrasi Kepergawainan
			14. Peningkatan Tertib Administrasi			-Peraturan Hasil Kerja							-Lancarnya laju pelaksanaan kgiatan
			15. Pembinaan Personil			-Pembinaan Personil							-Peningkatan motivasi dan sikap kerja profesional bagi seluruh unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat.

卷之三

SAINI AND SINGH

NO.	KAB/KODYA	INSTANSI	NAMA PROYEK	KODE	NILAI PROYEK	TUJUAN PROYEK	SASARAN PROYEK	TOLOK UKUR DAN KEGIATAN	REALISASI			DAMPAK DAN MANFAAT PROYEK
									FISIK	%	KEUANGAN	
7.	Kab. Tasik Hilir	SETWIDA Tingkat II	Proyek Biaya Umum Pendidik- an dan Pela- tihan Pegawai	2 P.O. 001	150.000 000,-	-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pns dilengkung Pemerintah Kab. Tasik	-Untuk meningkat- kan pengetahuan keterampilan dan tuntutan persya- ratan jabatan Eselon V, IV dan III	-Terwujudnya Pe- gawai Negeri Si- pil yang teram- pil yang teram- pil Kegiatan 1.Diklat Adm. Umum (ADUN) 2. ADUNA 3. Studi Halajem Perkotaan ke Luar Negeri 4. pengadaan Kom- puterisasi dan Branca Werk "Daiichi" Tipe DG 35 T.				-Pengetahuan dan keterampilan an meningkat -Meningkatkan pelayanan umum kepada masy- rakat.

Lanjutan Jawa Barat...

NO.	KAB/KOTA	INSTANSI	NAMA PROYEK	KODE PROYEK	NILAI PROYEK	TUJUAN PROYEK	SASARAN PROYEK	TOLOK UKUR DAN KEGIATAN		REALISASI	DAMPAK DAN MANFAAT PROYEK
								FISIK	%		
8. Kab. Tasik Halayo	SETWIDA Tingkat II	Proyek Biaya Umun Administrasi Trasi dan Pengendilan	2 P.O. 18.1.03 0001	126.065	- Mengendalikan Administrasi Pelaksanaan Proyek.	- Koordinasi Pelak saan proyek	- Pengumpulan, Pe- nyusunan dan Pe- nyampaikan kema- juan proyek.	42,16	53.150.000	42, 16	- Terkendalinya pelaksanaan pembangunan/ Proyek sesuai yang diharap kan.

Lanjutkan Jawa Barat..

No.	KAB/KOYA	INSTANSI	NAMA PROYEK	KODE	NILAI PROYEK	TUJUAN PROYEK	SASARAN PROYEK	TOLOK UKUR DAN KEGIATAN	REALISASI			DAMPAK DAN MANFAAT PROYEK
									FISIK	%	KEUANGAN	
9. Kab. Tasik Halayo	SETWIDA Tingkat II	Proyek Biaya Umum Verifi- kasi	2 P.O. 18.1.02 003	56.029 000,-	-Meningkatkan Efisiensi Kerja	-penilaian Adm. ristrosi Keuangan	-Pengendalian Ksiation	1.Gaji Upah/Biaya honor bayar ATR dan Barang Ce- takan	43,52	24.381,510	43, 52	-Meningkatkan pelayanan terhadap masy- arakat -Meningkatkan produktivitas para pegawai.
10. Tasikmalaya	SETWIDA TK. II	Renovasi Kantor Pembantu Bupati	2 P.O. 18.1.01 002	270.000, 000,-	-terciptanya kantor dan rumah dinas yang berpresen- tatif	-Meningkatkan dan melancarkan pala- yanan pemerintah an terhadap masy- arakat serta me- tingkatkan produk- tivitas pegawai	5. Biaya lain-lain	19,33				

EVALUASI MIDTERM PELITA VI SEKTOR APARATUR NEGARA

Lanjutan Jawa Barat...

DEPARTEMEN KANALISASI AIR

NO.	KAB/KOTA	INSTANSI	NAMA PROYEK	KODE PROYEK	NILAI PROYEK	TUJUAN PROYEK	SASARAN PROYEK	TOLOK UKUR DAN KEGIATAN		REALISASI		DAMPAK DAN MANFAAT PROYEK	
								FISIK	%	KEUANGAN	%		
11.	Tasikmalaya	BAPPEDA	Proyek Pemanfaatan lahan dan pengendalian	2 P.O. 004	2 P.O. 004,- 18.1.02	9.500.000,-	-Pemanfaatan data detek hasil proyek pembangunan	-Pemanfaatan data hasil proyek pembangunan	25 buku	100	9.500.000	100	-Mempersiapkan kebutuhan mengambil ke dalam proses perencanaan pembangunan
12.	Tasikmalaya	BAPPEDA	Proyek Pemanfaatan lahan dan pengendalian	2 P.O. 002	2 P.O. 002,- 18.1.02	12.500.000,-	-terseinya data	-Pemanfaatan data hasil proyek pembangunan	4.000	25	12.500.000	10	-ATK Pemanfaatan/ Penyelesaian & Visualisasi
13.	Cirebon	Bap. Penyu-sunan, Pring-Budaya Karya dan Koperasi Cirebon	Pembinaan	2 P.O. 001	2 P.O. 001,- 18.1.01	5.000.000,-	-meningkatnya Sumber Daya Manusia	-150 orang					-Kemampuan ke-bilakasan dalam proses perencanaan pembangunan
								1. Penerapan ATK					2. Pengetahuan Materi
								3. penyelenggaran					

anjutan Jawa Barat. . .

NO.	KAB/KOTA	INSTANSI	NAMA PROYEK	KODE	NILAI PROYEK	TUJUAN PROYEK	SASARAN PROYEK	TOLOK UJUR DAN KEGIATAN	REALISASI			DAMPAK DAN MANFAAT PROYEK
									FISIK	%	KEUANGAN	
								Kegiatan				
								1.Biaya Construksi				
								2.Biaya Perencanaan				
								3.Biaya Pengemasan				
								4.Biaya Penunjang				
								5.Biaya Umum				

EVALUASI MIDTERM PELITA VI SEKTOR APARATUR NEGARA

Lanjutkan Jawa Barat...

NO.	KAB/KOTA	INSTANSI	NAMA PROJEK	KODE PROJEK	NILAI PROJEK	TUJUAN PROJEK	SASARAN PROJEK	TOKOK UKUR DAN KEGIATAN		REALISASI		DAMPAK DAN MANFAAT PROJEK
								FISIK	%	KEUANGAN	%	
14.	Cirebon	Bag-Penyuruh suran Prog ram	Pelaksanaan Analisis Jabatan	2.P.0 18.1.01 013	15.000 000,-	-Meningkatkan perekayasaan Aparatur ne- tral penela- han dan peng- kajian yang dilakukan se- cara analitis terhadap jabat- an.	1. Persiapan 2. Konsultasi 3. Penyusunan dan Pengangabdian 4. Persiapan Expos					
15.	Cirebon	Bag-Penyuruh suran Prog ram	Pembinaan Budaya Kerja	2.P.0 18.1.01 001	5.000 000,-	-Meningkatnya Sumber Daya Hensusia (SDH)	1. Pengabdian ATR 2. Pengertian 3. Materi 4. Penyelegaraan	150 Orang	100	5.000.000	100	
16.	Cirebon	Bag-Penyuruh suran Prog ram	Pembinaan Disiplin Pegawai	2.P.0 18.1.01 005	1.000 000,-	-Terciptanya Disiplin Pegawai	1. Biaya Operasio- nal 2. Biaya Umum		100	1.000.000	100	

Lanjutkan Jika Barat...

No.	KAB/KODA	INSTANSI	NAMA PROYEK	KODE	NILAI PROYEK	TUJUAN PROYEK	SASARAN PROYEK	TOLOK UKUR DAN KEGIATAN	REALISASI			DAMPAK DAN MANFAAT PROYEK
									FISIK	%	KEUANGAN	
17.	Cirebon	Bas.Penyusunan Progam	Kursus Manajemen Proyek	2 P.O 11.2.02 001	10.000.000,-	-Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)		1. Biaya Operasional 2. Biaya Umum	100	10.000.000	100	
		Bas.Penyusunan Progam	Peningkatan Kepatuhan Keterbukaan	2 P.O 11.2.02 002	38.000.000,-	-Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)		1. Biaya Operasional 2. Biaya Umum	100	10.000.000	100	
		Bas.Penyusunan Progam	Penyalihan dana dan Kepesertaan Kepesertaan	2 P.O 11.2.02 004	1.000.000,-	-Terwujudnya kerjasama Kepengawilan		1. Biaya Operasional 2. Biaya Umum	100	1.000.000	100	
		Bas.Penyusunan Progam	Pelaksanaan Analisis	2 P.O 11.2.02 006	2.500.000,-	-5 Unit Kerja		1. Biaya Operasional 2. Biaya Umum	100	2.500.000	100	
		Bas.Penyusunan Progam	Pelaksanaan Analisis Jabatan	2 P.O 11.2.02 006	7.500.000,-	-Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur		1. Biaya Operasional 2. Biaya Umum	100	7.500.000	100	

B. PROVINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT

No.	KAB/KOTA	INSTANSI	NAMA PROYEK	KODE PROYEK	NILAI PROYEK (Rp.000)	TUJUAN PROYEK	SASARAN PROYEK	TOLOK UKUR DAN KEGIATAN	REALISASI		DAMPAK DAN MANFAAT PROYEK	
									FISIK	%		
1	Kab. Bima	Din. PIP	P2RTPPH	02.1.04.370275.18.03.23	18.535	-Meningkatkan pendidikan petani	-Meningkatkan perencanaan dan a. kurasi data	-perencanaan dan penyusunan program	15.4	2.855	15.4	-Meningkatnya perencanaan dan penyusunan program
						-Meningkatkan ke-SDM serta mempunyai petani tu perencana- dan penyusun program	-Meningkatkan ke-tu perencana- dan penyusun program	-realisasi areal irigasi di beran-				-Kualitas SDM meningkat
2	Idem	Idem	PHT	02.1.01.379240.18.01.123	92.474	-Meningkatkan Produkta ta- ruman pangan	-Meningkatkan pengembangan dan penyakti- tangan hasil produksi	-Peningkatan ke- mampuan petani dalam pengendali- an hasil secara terpadu sehingga mempunyai meningkat- kan mutu hasil produksi	26.3	23.903	25.9	-Peningkatan ke- mampuan petani dalam pengendali- an hasil secara terpadu dari 123 ton
3	Idem	Bappeda	Program 10 sukses	-	25.000	-Membuatkan laporan	-Tersedianya lapo- ran 10 sukses	-Peningkatan da- ta untuk bahan perencanaan ba- gi sektor yang termasuk dalam 10 sukses	50.0	45.0		-Meningkatkan produksi

Lanjutan Rusa Tenggara Barat...

No.	KAB/KOYA	INSTANSI	NAMA PROYEK	KODE	NILAI PROYEK (000)	TUJUAN PROYEK	SASARAN PROYEK	TOLOK UKUR DAN KEGIATAN	REALISASI			DAMPAK DAN MANFAAT PROYEK	
									FISIK	%	KEU.(000)	%	
4	Kab. Blime	Bappeda	NSDAD	-	10.000	-Menginventari- -115 penggunaan NSDAD sebanyak 50 Eks.	-Membuat laporan NSDAD sebanyak 50 Eks.	-Terselesainya NSDAD	-	0	-	14	-Tersedianya bahan perencanaan sektor terkait dengan NSDAD
5	Idem	Idem	Blaya Umar	-	65.000	-Untuk meningkatkan teman- teman saran perencanaan	-	-	50	-	-	50	-Untuk meningkatkan keman- perencanaan
6	Idem	Setwilida	Diklat Apa- ratur	-	153.000	-Meningkatkan kualitas sumber daya Apa- ratur.	-Mengikuti sekertakan pengabdian dalam ber bagi diklat dan kursus	-kursus benda- rahan: 50 orang -kursus pimpinan: 50 orang -penataan manajemen 131 Kadres: -kursus komputer: 5 orang -kursus Telkom Dipdikti: 1.009 -Adm: 16 orang -Sepama: 5 orang	-	100	-	100	-Peningkatan kualitas SDH aparatur
7	Idem	Idem	Peningkatan Sumber daya aparatur	-	479.209	-Peningkatan kualitas Sumber daya apa- ratur	-Diklat Adm, -Diklat Sepama -S2 -Diklat teknis fungsional	-	-	-	-	-	
8	Idem	Idem	peningkatan pendayaguna- an Akademik Pemerintah	-	30.000	-Peningkatan pendayagunaan aparatur Daerah	-Peningkatan pendayagunaan aparatur Daerah	-RAKERDA FORKOM- PANDA -Pelaksanaan ana- lisis jabatan	83	25.000	83	Meningkatkan ki- meria pagawai karena tersusun nya urusan tu- gus/jabatan dan terarahnya dana yang tersedia dalam pelaka- nam	

EVALUASI MIDTERM PELITA VI SEKTOR APARATUR NEGARA

Lanjutkan Kuis Tenggara Beret...

No.	KAB/KOTA	INSTANSI	NAMA PROYEK	KODE PROYEK	NILAI PROYEK	TUJUAN PROYEK	SASARAN PROYEK	TOLOK UKUR DAN KEGIATAN	REALISASI		MANFAAT PROYEK	
									FISIK	%		
9	Kab. Bima	Setwida	Pengendalian administrasi lingkungan hidup		8.545	Pengendalian, monitoring & evaluasi proyek lingkungan hidup		Mengadakan diklat	Preserta 22 orang	6.009	70,3	
10	Kab.Lombok Tengah	Setwida	Pembinaan dan pengembangan aparatur		7.500			Meningkatkan kemampuan kete	Tersedianya tenaga aparatur yang berdisiplin berdedikasi dan lo			
11	Idem	Idem	Peningkatan pendidikan aparatur mensejahterakan pekerja		33.000			rampil serta pengertian aparatur PENDA dlm. melaksana	valitas tinggi serta profesional dalam melaksana			
12	Idem	Idem	Diklat teknis fungisional & penjenjang		237.750			Ketrampilan pengetahuan, ketekunan dan dedikasi serta pe	Ketrampilan pengetahuan, ketekunan dan dedikasi serta pe	26	8.900	26
13	Idem	Idem	Pembinaan disiplin di Bidang Koperasi dan Gawai		2p.0.18. 1.02.004	5.000		Hempaskan tenaga aparat yang profesional				
14	Idem	Idem	Peningkatan Efektivitas kerja (96/97)		2p.0.18. 201.008	7.500		Hengkali dan metrvaluasi	Kepala Dinas/Instansi, Camat dan Lurah	60	4.500	60
15	Idem	Idem	Tar Waskat		2p.0.18. 201.007	7.000	Pelatihan/ Penataran	Pajibat Struk				
16	Idem											

C. PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

No.	KAB/KOTA	INSTANSI	NAMA PROYEK	NILAI PROYEK	KODE	TUJUAN PROYEK	SASARAN PROYEK	TOLOK UKUR DAN KEGIATAN	REALISASI!			DAMPAK DAN MANFAAT PROYEK	
									FISIK	%	KEUANGAN		
1.	Bandar Lampung	Badan Organisasi	1. Forkom Panda (1993-1996)	2. P.0.18 1.02.008	10 Juta	Meningkatkan efektivitas kerja.	-----	Rabat teknis 70 orang	-----	-----	10 Juta	100	Meningkatkan kesiensi terhadap Otonomi Daerah bagi Aparatur Negara.
2.			2. Analisis Jabatan (1993-1996)	-----	20 Juta	-----	-----	Bimbingan 20 orang	-----	-----	-----	0	Dengan jabatan BSN semakin leluas tugas dan tanggung jawab PNS.
3.			3. Perpustakaan Umm (1996)	2. P.0.18 1.02.003	15 Juta	Meningkatkan pergeaturan operator.	-----	pengadaan buku sebanyak 650 Exp	-----	100 Ribu	1	Meningkatkan pengetahuan dan kedisiplinan operator.	
4.			4. Bimbingan Organisasi Dharma Wanita (1996-)	2. P.0.13 3.01.002	10 Juta	-----	-----	penataran 40 orang	-----	-----	-----	0	Peningkatan motivasi terhadap Anggota Dharma Wanita.

EVALUASI MIDTERM PELITA VI SEKTOR APARATUR NEGARA

Lanjutan Lampung...

NO.	KAB/KOTA	INSTANSI	NAMA PROYEK	KODE	NILAI PROYEK	TUJUAN PROYEK	SASARAN PROYEK	TOLOK UKUR DAN KEGIATAN	REALISASI:		DAMPAK DAN MANFAAT PROYEK	
									FISIK	%		
2.	Propinsi Lampung	Dipende Tingkat I Lampung	1. Pengamanan- DP-05.3 03.007 PAD Tk. 1 Lampung	41.500.000	Pengamanan pen- cairan reali. PAD Tk. 1 95/96 sehingga pelak 1. Lampung ter- utama yang da- nya dari PKB dapat berjalan seusai dengan rencana.	Peningkatan PAD Tingkat I Lampung	- Pengolahan Pro- yek. - Kegiatan Op- si PAD setiap trijulian.	—	—	15.648.700	37, 71	
			2. Dokumentasi 03.05.3.	30.000.000	- Memperbaikah perolehan data yang akurat dan menyajikan nya. - Mengimpor da- ta hasil pene- riman PAD pa- da Bimas In- tansi terkait. - Mendukung mengarialisasi un- tuk peningka- tan PAD pada masa yang akan datang.	Kemperbaikan penya- jikan data yang akurat. - Bileya Adminis- trasi Proyek - Kegiatan Oper- asional Proyek.	—	—	3.312.000	11,0		

Lanjutan Lampung...

No.	KAB/KOY/K	INSTANSI	NAMA PROYEK	KODE	NILAI PROYEK	TUJUAN PROYEK	SASARAN PROYEK	TOLAK UKUR DAN KEGIATAN	REALISASI			DAMPAK DAN MANFAAT PROYEK
									FISIK	%	KEUANGAN	
2.	Propinsi Lampung	Dipendasi Tingkat I	3. Lanjutan Pembangunan Rangkaian Restribusi Sumpang Pemotong Pengadaan / Penggaran.	—	137.337.000	Untuk meningkatkan penyaluran retribusi i guna peningkatan PAD.	Peningkatan PAD dari retribusi.	• Biaya Adminis-trasi Projek, Kegiatan Operasi Projek.	100	130.120.480	90	—
			4. Pembangunan Tingkat I Tingbar dan Pengcoran Pangalan Restribusi Bambangan Umpu.	2P.05.3.01.003	40.000.000	Untuk meningkatkan penyaluran retribusi i guna peningkatan PAD Tingkat I Lampung.	Peningkatan PAD Tingkat I Lampung	• Biaya Adminis-trasi Projek, Kegiatan Operasi Projek.	100	1.600.000	4	—
			5. Komputerisasi Samsat	2P.05.3.03.1.001	588.110.000	Untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat warga jib projek.	Peningkatan PAD Tingkat I Lampung	• Biaya Adminis-trasi Projek, Kegiatan Operasi Projek.	—	17.142.000	2,92	—
			6. Pengadaan Peralatan Meubelair Kantor Samsat Lampung Selatan.	2P.0.010 1.01.004	45.275.000	Untuk meningkatkan pelayanan wajib pajak yang ada di lingkungan Penda Tingkat I LG Selatan.	Peningkatan PAD Tingkat I Lampung	• Biaya Adminis-trasi Projek, Kegiatan Operasi Projek.	100	45.275.000	100	—

Lanjutkan Lampung...

No.	KAB/KOTA	INSTANSI	NAMA PROYEK	KODE PROYEK	NILAI PROYEK	TUJUAN PROYEK	SASARAN PROYEK	TOLAK UKUR DAN KEGIATAN		REALISASI		DAMPAK DAN MANFAAT PROYEK	
								FIStIK	%	KEUANGAN	%		
2.	Provinsi Lampung	Dipenda Tingkat I Lampung	1. Projek Pengamanan PAO Tingkat I Lampung	2P-0-10- 1.01.001	36.600.000	Pengamanan PAO	Untuk mencapai target PAO.	Risiko Administrasi dan Kegiatan Operasional.	-----	100	36.600.000	100	Pengamanan pen- cairan realis- asi PAO 95/95. sehingga pek- asian ABG Tk. Lampung teru- tama yang dana- nya bersumber dari PAO dapat berjalan sesuai dengan rencana.
			2. Pembangunan Gedung Kantor Satpol PP Lampung Selatan.	2P-0-10- 1.01.003	210.000.000	Heningkattan pelayanan ter- hadap wajib pajak.	Heningkattan PAO	Risiko Administra- si dan Kegiatan Operasional.	-----	100	209.562.000	99	Heningkattan pe- lajaran terhadap wajib pajak di lingkungan Tk. I Lampung Selatan.
			3. Pembangunan Pangkalan Retribusi Simpan Pe- netang.	2P-0-6- 201.004	1.103.000.	Heningkattan penerimaan ret- ribusi pangka- lan guna menun- gjang PAO.	Heningkattan PAO	Risiko Administra- si dan Kegiatan Operasional.	-----	100	1.102.742.	100	Dapat meningkat- kan penerimaan dari sektor ret- ribusi pangka- lan guna menun- gjang meningkat- kan Propinsi Lampung.

Lanjutan Lampung...

No.	KAB/KOYA	INSTANSI	NAMA PROYEK	KODE	NILAI PROYEK	TUJUAN PROYEK	SASARAN PROYEK	TOLAK LUCU DAN KEGIATAN	REALISASI			DAMPAK DAN MANFAAT PROYEK
									FISIK	%	KEUANGAN	
2.	Propinsi Lampung	Dipenda Tingkat I	4. Rehabilitasi Pengangkutan Retribusi Pantai Geyam.	2p-0.18-01.031	255.000.000	Untuk meningkatkan penerimaan retribusi pantai gema mengelanjutkan PAD Tk. I Lampung.	Meningkatkan PAD	Biaya Administrasi dan Kegiatan Operasional.	—	100	254.719.000	99.09
			5. Peningkatan Listrik Pengangkutan Retribusi Geyam.	2p-0.7-201.001	100.000.000	Untuk membantu ke lancaran pergerakan retribusi.	Meningkatkan PAD	Biaya Administrasi dan Kegiatan Operasional.	—	—	99.850.000	99
			6. Komputerisasi Sismat Metro.	2p-0.5.3-03.001	577.760.000	Untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Metro.	Meningkatkan PAD	Biaya Administrasi dan Kegiatan Operasional.	—	100	570.200.000	98
3.	Propinsi Lampung Selatan	Dipenda Tingkat II Lampung Selatan	1. Pengembangan dan Pengembangan PAD dan PBB	—	41.000.379	Meningkatkan penerimaan PAD dan PBB.	Meningkatkan penerimaan PAD	Tahun Anggaran	100	%	100	%
			2. Penyusunan tingkat PAD (P3 kti.)	—	20.592.300	Meningkatkan penerimaan PAD.	Meningkatkan penerimaan PAD.	Tahun Anggaran	100	%	100	Untuk mengetahui potensi PAD.

Lanjutan Lampung...

No.	KAB/KOTA	INSTANSI	NAMA PROYEK	KODE PROYEK	NILAI PROYEK	TUJUAN PROYEK	SASARAN PROYEK	TOLOK UKUR DAN KEGIATAN	REALISASI		DAMPAK DAN MANFAAT PROYEK	
									FISIK	%		
2.	Propinsi Lampung	PU Prop.	1. Proyek Bantuan Peningkatan jalan Provinsi.	2P-0.6.1 02.004	1.035.049	Pengawasan teknis jaln, jembatan propinsi.		<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Proyek. Kegiatan Proyek 	12.26	54.129.067	5,23	Heningkattan perekonomian masyarakat di daerah/desa.
			2. P1 dan P2	2P-0.32. 01.001	147.000	Hengadakan perencanaan dan pengendalian program iriga-si/rawa serta pengendalian penganggaran bencana alam.		<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Proyek. Kegiatan Proyek 	0	804.441.400	17,72	
3.	Provinsi Lampung	Proyek Pengembangan jalan Provinsi dan Cermi Nasri	3. Proyek Pengembangan jalan Provinsi dan Cermi Nasri	3P-0.6.1 02.004.	3.064.551	Heningkattan kondisi jaln dalam rangka menunjang perlakuan cermi nasi dierah b1 dengan prasana jalan.	Pembukaan basan jalan raya jalan dalam cermi nasi sepanjang 15,5 km	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Proyek. Kegiatan Proyek 	15,42	628.725.050	20,82	Dapat membuka daerah terisasi.

Lanjutan Lampung...

NO.	KAB/KODA	INSTANSI	NAMA PROYEK	KODE	NILAI PROYEK RD. DLM. RIBUAN	TUJUAN PROYEK	SASARAN PROYEK	TOLAK UKUR DAN KEGIATAN	REALISASI			DAMPAK DAN MANFAAT PROYEK
									FISIK	%	KEUANGAN	
3.	Kabupaten Lampung Tengah	Dinas PHD + LT	1. Imroes Bandes	—	2.982.000	Peningkatan keteraerasaan masyarakat.	Bantuan Langsung Masyarakat	—	100	—	—	100 Mengingkatkan rasa hidup masyarakat
			2. P A T K	—	18.000	—	—	Administrasi Kecelakahan	—	100	—	—
			3. Bp 2 M	—	48.000	—	—	Pembinaan	—	100	—	—
			4. Pengendalian Pengelolahan Limbah Teknis Bandes.	—	22.355	—	—	—	—	100	—	—
			5. Hadiyah Lomba Bandes.	—	4.500	—	—	—	—	100	—	—
			6. Pemantapan LMKD	—	65.000	—	—	—	—	100	—	—
			7. Bap + 101	—	3.300	—	—	—	—	100	—	—

EVALUASI MIDTERM PELITA VI SEKTOR APARATUR NEGARA

Lanjutan Lampung...

No.	KAB/KO/DA	INSTANSI	NAMA PROYEK	KODE PROYEK	NILAI PROYEK RP. D.M. RIBUAN	TUJUAN PROYEK	SASARAN PROYEK	TOLOK UKUR DAN KEGIATAN		REALISASI		DAMPAK DAN MANFAAT PROYEK
								FISIK	%	KEUANGAN	%	
3. Kabupaten Lampung Tengah	Dinas PBO - LT	1. Impres Bandes		—	3.000.000	Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa.		—	100	100	—	100
		2. P A T K		—	—			—	—	—	—	—
		3. BP 2 M		—	—			—	—	—	—	—
		4. Pengendali-an Pengelolaan Teknis		—	—			—	—	—	—	—
		- Bandar-		—	20.400			—	—	—	—	—
		- Kecamatan		—	22.500			—	—	—	—	—
		- Tingkat Kabupaten		—	—			—	—	—	—	—
		5. Hadiyah Band-		4.500	—			—	—	—	—	—
		des.		—	—			—	—	—	—	—
8. Pengembangan UEP.	LKD	6. Pemasangan		—	75.000	Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.		—	100	100	100	100
		7. BOP + IOT		—	75.000			—	—	—	—	—
		9. Pemasangan UDKP		—	25.000			—	—	—	—	—

LAMPUNG

Lanjutkan Lampung...

No.	KAB/KODA	INSTANSI	NAMA PROYEK	KODE	NILAI PROYEK RD. 000.000	TUJUAN PROYEK	SASARAN PROYEK	TOLOK UKUR DAN KEGIATAN	REALISASI			DAMPAK DAN MANFAAT PROYEK
									FISIK	%	KELUARAN	
3.	Kabupaten Lampung Tengah	Dinas PMD + Lt	1. Proyek Pengembangan Desa. 2. Peningkatan Ketahanan Masyarakat. 3. Peningkatan Usaha Ekonomi Desa. 4. Proyek Pengalaman Sistem Pendidikan Karya (SPK). 5. Pemeliharaan Air Bersih, 6. SDM 7. PSAB + PLP 8. Bantuan Kecamatan. 9. A.M.D	— — — — — — — — —	35.500 40.000 9.000 20.000 20.000 5.000 69.525 48.000 50.000	Peningkatan kesejahteraan keluarga. — — — — — — — — —	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —	— — — — — — — — —

Lanjutkan Lampung...

No.	KAB/KOTA	INSTANSI	NAMA PROYEK	KOODE	NILAI PROYEK	TUJUAN PROYEK	SASARAN PROYEK	TOLOK UKUR DAN KEGIATAN	REALISASI		DAMPAK DAN MANFAAT PROYEK		
									FISIK	%			
3.	Kabupaten Lampung Tengah	Dinas Perindus- tri & Ketenagakerjaan	Pengembangan Pengembangan Kesiagaan dan Kemampuan Ketenagakerjaan	—	35.393.700	Peningkatan kemampuan/keter- rampilan sumber daya manusia di bidang Industri Kecil dan Kewirausahaan serta meningkatkan motivasi berusaha.	<ul style="list-style-type: none"> - Kelancaran tugas proyek - Sumber daya alam berdaya manusia yang mencukupi - Koordinasi kerjasama yang mencukupi - Penerapan perencanaan dan kewirausahaan - Mengembangkan kebutuhan sumber daya manusia bisnis dan industri - Diklat Teknis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Administrasi proyek - Koordinasi kerjasama yang mencukupi - Penerapan perencanaan dan kewirausahaan - Mengembangkan kebutuhan sumber daya manusia bisnis dan industri - Diklat Fungsional, pembinaan motivasi berusaha, penyusutan pencapaian gagus kendala tuntas dan berperbaikan industri kecil dan kerajinan - Penyebarluasan informasi kecil dan industri. - Penitipan dan evaluasi program. 	9	40	14.519.000	40	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan kualitas dan kuantitas produksi kecil dan menengah di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

Lanjutan Lampiran...

No.	KAB/KOTA	INSTANSI	NAMA PROYEK	KODE	NILAI PROYEK	TUJUAN PROYEK	SASARAN PROYEK	TOLAK UKUR DAN KEGIATAN	REALISASI		DAMPAK DAN MANFAAT PROYEK
									FISIK	%	
3.	Kabupaten Lampung Tengah	Dinas P. dan K	1. Pemasyarakatan akhara (1990/1991)	2.P.0.93 02.002	4.000.000	Masyarakat-kan akhara lampung.	Guru SD	Penataran	100 %	—	100 %
			2. Pemasyarakatan akhara lampung (1991/1992)	2.P.0.93 02.002	4.000.000	Masyarakat-kan akhara lampung.	Guru SD	Penataran	100 %	—	100 %
			3. Penyeleng- garaan kur- sus dalam Kepsek SDN (1993/1994)	2.P.0.9 1.01.001	22.500.000	Peningkatan profesional dalam Kepsek.	Guru SD	Diklat	100 %	—	100 %
			4. Penyeleng- garaan kur- sus dalam Kepsek SDN (1995/1996)	2.P.0.11 2.02.001	10.000.000	Peningkatan profesional dalam Kepsek.	Guru SD	Diklat	100 %	—	100 %
			5. Penyeleng- garaan kur- sus dalam Kepsek SDN (1996/1997)	2.P.0.11 1.04.001	10.500.000	Peningkatan profesional dalam Kepsek.	Guru SD	Diklat	100 %	—	100 %

EVALUASI MIDTERM PELITA VI SEKTOR APARATUR NEGARA

Lanjutkan Lampung ..

NO.	KAB/KOTA	INSTANSI	NAMA PROJEK	KODE	NILAI PROYEK	TUJUAN PROYEK	SASARAN PROYEK	TOLAK UJUR DAN KEGIATAN		REALISASI		DAMPAK DAN MANFAAT PROYEK	
								FISIK	%	KEUANGAN	%		
3.	Kabupaten Lampung Tengah	Dinas Pertanian	1. Program Pengembangan pertanian dan keturunan anggagan 95/96	2.P-0.2.1.01.	41.943.000	Heningkatten produksian pertanian dan keturunan anggagan.	Peningkatten pengembuhan dan keterampilan petani.	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan petani dan keturunan anggagan. - Bantuan bibit untuk daerah miskin. - SPH/Padi - Pengarahan lahan BBG/Hetra - Pengambilan rekrutan. 	—	100	41.943.000	100	Heningkatten pengembuhan dan keterampilan petani dalam berusaha tanam mengoptimalkan penggunaan pekarangan dan meningkatkan indeks petani.
			2. Program Pengembangan pertanian dan Sosial Prasrama Pertanian TA 1996/1997	2.P-02.1.01.	54.437.000	Heningkatten pendapatan petani dan keturunan anggagan.	Peningkatten pengembuhan dan keterampilan dan pascapanen.	<ul style="list-style-type: none"> - Operasional BBG - Pengambilan rekrutan - Operasional petani di Lampung Tengah dalam petani dan persiapan petani - Kurus petani - Pembinaan teknis. 	Operasional Peda/Pemas.	62,22	33.869.000	62,22	Heningkatten pengembuhan pertanian di dalam persiapan lahan untuk tanaman pola kerja serta dapat meningkatkan pendapatan petani.

Lanjutkan Lembaran ...

NO.	KAB/KOTA	INSTANSI	NAMA PROYEK	KODE	NILAI PROYEK	TUJUAN PROYEK	SASARAN PROYEK	TOLOK UKUR DAN KEGIATAN	DAMPAK DAN MANFAAT PROYEK		
									FISIK	KEUANGAN	%
3.	Kabupaten Lampung Tengah	Dinas Pertanian	1. Penerapan Pola Usaha Tani Terpadu Taman Pangan di Lahan Kering	2.P.02.1.01.001	203.000.000	Meningkatkan mutu liter dengan penerapan pola usaha tani berkesinambungan dengan penanaman padat teknologi yang tepat dan efektif.	Menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan pendaya hidup dan kesejahteraan masyarakat.	- Pengelolaan Proyek Operasional a. Pemeran b. Sekolah lapangan petani.	Operasional Proyek 25 %	97.978.600	47,28
			2. Pola Usaha Tani Terpadu Taman Pangan di Lahan Kering prasaran Pertanian TA 1996/1997	2.P.02.1.01.007	100.000.000	Meningkatkan pengembangan pola usaha tani terpadu di lahan kering.	Hengkurgan kantong-kantong kemasinan di Kabupaten Langkap Tengah.	- Pengelolaan Proyek Operasional a. Kesiapan operasional pola usaha tani terpadu (dan area). b. Sekolah Lapangan petani.	100	100.000.000	100

EVALUASI MIDTERM PELITA VI SEKTOR APARATUR NEGARA

lanjutkan Lampung...

LAMPUUNG

NO.	KAB/KOTA	INSTANSI	NAMA PROYEK	KODE PROYEK	NILAI PROYEK	TUJUAN PROYEK	SASARAN PROYEK	TOLOK UKUR DAN KEGIATAN			REALISASI		DAMPAK DAN MANFAAT PROYEK
								FISIK	%	KEUANGAN	%		
3.	Kabupaten Lampung Tengah	Dinas Tanah dan PPN	Penempatan Translok	—	—	Hengkalsikan fungsi hutan sebagai sumber air.	Para pemantau hutan.	—	100	%	100 %	—	Pengembangan tanah di dalam range pemimpinan karen kesempatan para training han Kam Nas.
3.	Kabupaten Lampung Tengah	Dinas Kesehatan	1. Pembangunan Proyek Infrastruktur Bantuan Sarana Kesehatan.	13203	531.651	Tersedianya sarana perbaikan dan kesehatan.	Puskesmas	15	15	100 %	531.046	99,8	Heningkatawa devisa ketika tan masyarakat.
			2. Pembangunan Proyek Infrastruktur Bantuan Sarana Kesehatan.	13203	471.413	—	—	—	—	—	—	—	—

Lanjutkan Lemparung...

No.	KAB/KOYA	INSTANSI	NAMA PROYEK	KODE PROYEK	NILAI PROYEK	TUJUAN PROYEK	SASARAN PROYEK	TOLOK UKUR DAN KEGIATAN	REALISASI			DAMPAK DAN MANFAAT PROYEK
									FISIK	%	KEUANGAN	
3.	Kabupaten Lampung Tengah	Dinas Pekerjaan Umum Propinsi	1. Proyek Bantuan Pengembangan Jalan Propinsi	2.P-0.61 1.02.004	1.035.049	Pengawatan teknis Jalan Jembatan Propinsi		- Pengelolaan Proyek - Kegiatan Proyek	—	12,26	54.129.067	5,23
			2. P_4 L & P_2 A	2.P-0.3.2.01.001	147.000	Mengadakan perencanaan dan pengendalian program infrastruktur serta pengendalian peranggulangan bencana alam Lampung.		- Pengelolaan Proyek - Kegiatan Proyek	—	0 %	804.441.400	17,72
			3. Bagpro Pengembangan Jalan Padang Cermin Napal	AP-0.6.1 02.004.09	3.064.351	Meningkatkan kondisi jalan dalam rangka memudahkan perjalanan dalam daerah bidang prasarana jalan.	Pembukaan badan jalan, rias jalan padang cermin napal, spanjang 15,3 km.	- Pengelolaan Proyek - Kegiatan Proyek	—	15,422	628.725.050	20,62

D. PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Beberapa proyek Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Sektor Aparatur dan di Luar Sektor Aparatur, yang dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain:

1. Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul:

1. ITWILKAB :

Nama Proyek

Tujuan Proyek

Tahun Anggaran

Sasaran Proyek

Tolok ukur dan Kegiatan

Dampak & Manfaat Proyek

Nilai Proyek

Realisasi Fisik

Keuangan

: Pengawasan Fungsional.

: Pendayagunaan aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

: 1994 / 1995

: Pelaksanaan tugas Instansi/Dinas di lingkungan Pemda Tingkat II Bantul.

: Pengawasan Fungsional: Konsultasi, PKPT, Pemeriksa, Monitoring tindak lanjut, Monitoring Penyuluhan.

: Terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa.

: 32.700.000,-

: 100%

: 100 %

2. ITWILKAB :

Nama Proyek

Tujuan Proyek

Tahun Anggaran

Sasaran Proyek

Tolok ukur dan Kegiatan

Dampak & Manfaat Proyek

: Pengawasan Fungsional.

: Peningkatan pengawasan umum terhadap jalannya pembangunan Tingkat II Bantul yang rutin maupun pembangunan.

: 1995 / 1996

: Pelaksanaan tugas Instansi/Dinas di lingkungan Pemda Tingkat II Bantul.

: Pengawasan Fungsional: Pemeriksaan, Monitoring tindak lanjut, UPKPT, Pemutakhiran Data, Monitoring Inpres.

: Terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Nilai Proyek	:	32.700.000,-
Realisasi	:	
Fisik	:	100 %
Keuangan	:	32.658.000 (99,88 %)

3. ITWILKAB :

Nama Proyek	:	Monitoring Pengawasan.
Tujuan Proyek	:	Meningkatkan pengawasan umum terhadap jalannya pembangunan Pemda Tingkat II Bantul yang rutin maupun pembangunan.
Tahun Anggaran	:	1995 / 1996
Sasaran Proyek	:	Pelaksanaan tugas Instansi/Dinas di lingkungan Pemda Tingkat II Bantul.
Tolok ukur dan Kegiatan	:	Monitoring Pengawasan: Komputerisasi, Monitoring Pelaksanaan IDT, ATK.
Dampak & Manfaat Proyek	:	Terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa.
Nilai Proyek	:	7.111.000,-
Realisasi Fisik	:	100 %
Keuangan	:	100 %

4. ITWILKAB :

Nama Proyek	:	Pengawasan Fungsional.
Tujuan Proyek	:	Meningkatkan pelaksanaan pengawasan umum terhadap pelaksanaan jalannya Pemda Tingkat II Bantul yang rutin maupun pembangunan.
Tahun Anggaran	:	1996 / 1997
Sasaran Proyek	:	Pelaksanaan tugas Instansi/Dinas di lingkungan Pemda Tingkat II Bantul.
Tolok ukur dan Kegiatan	:	Pengawasan Fungsional: Perjalanan, Pemeriksaan, Monitoring Tindak lanjut, Menyusun UPKPT.
Dampak & Manfaat Proyek	:	Terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa.
Nilai Proyek	:	32.700.000,-
Realisasi	:	
Fisik	:	41,78 %
Keuangan	:	13.057.000,- (39,93 %)

5. ITWILKAB :

Nama Proyek	:	Monitoring Pengawasan.
-------------	---	------------------------

Tujuan Proyek	: Meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut hasil proyek Bangdes dan Monitoring Proyek Inpres.
Tahun Anggaran	: 1996 / 1997
Sasaran Proyek	: Pelaksanaan tugas Instansi/Dinas di lingkungan Pemda Tingkat II Bantul.
Tolok ukur dan Kegiatan	: Monitoring Pengawasan: Monitoring Proyek Bangdes, Monitoring Proyek Inpres, Raker, Alat Komunikasi, SDM.
Dampak & Manfaat Proyek	: Terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa.
Nilai Proyek	: 8.000.000,-
Realisasi Fisik	: 61,01 %
Keuangan	: 4.230.000,- (52,87 %)

Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo:

1. Setwilda (Bagian Organisasi)

a). Nama Proyek

Tujuan Proyek

: Kursus dan Otonatisasi Pengelolaan Perpustakaan.

: Pengelola Perpustakaan mengetahui dan mampu menggunakan otonatisasi.

Tahun Anggaran

: 1994 / 1995

Sasaran

: Memperlancar Pelayanan Pengelolaan Perpustakaan.

Tolok ukur dan Kegiatan

: Kursus dilaksanakan 3 (tiga) minggu, Penggunaan Komputer dalam Pengelolaan Perpustakaan.

Dampak dan Manfaat

: Mempermudah Pengelolaan Perpustakaan.

Nilai Proyek

: 5.750.000,-

Realisasi Fisik

: 100 %

Keuangan

: 100 %

b). Nama Proyek

: Proyek Analisis Jabatan dan Hubungan Kerja di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

: Penyempurnaan Penggunaan Kelembagaan Kepegawaian dan Ketata Laksanaan.

Tahun Anggaran

: 1994 / 1995

Sasaran Proyek

: Penyempurnaan Kelembagaan, Kebutuhan Diklat Perincian Tugas, Aparatur Mengetahui Hubungan Kerja antara Perangkat Pemerintah dilingkungan Pemda Daerah Tingkat II Kulon Progo.

Tolok ukur dan Kegiatan	: Pemanfaatan Informasi Jabatan dalam Penyempurnaan Kelembagaan, Penataan Beban Kerja, Perincian Tugas, Pengurusan Prosedur Kerja dan Kebutuhan Diklat, SK Bupati Tentang Pedoman Hubungan Kerja.
Dampak dan Manfaat	: Pemanfaatan Informasi Jabatan dari hasil Anjab.
Nilai Proyek	: 17.000.000,-
Realisasi	
Fisik	: 100 %
Keuangan	: 100 %
c). Nama Proyek	: Inventarisasi Peraturan Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.
Tujuan Proyek	: Memudahkan Pencarian dan Penggunaan Peraturan Tentang Susunan Organisasi Dinas di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.
Tahun Anggaran	: 1994 / 1995
Sasaran	: Memperlancar Pelaksanaan Tugas Dinas di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.
Tolok ukur dan Kegiatan	: Aparat Memahami dan Mengetahui Peraturan Tentang Susunan Organisasi sehingga memperlancar pelaksanaan tugas.
Dampak dan Manfaat	: Susunan Organisasi dan Tata Kerja di laksanakan sesuai Peraturan.
Nilai Proyek	: 14.000.000,-
Realisasi	
Fisik	: 35 (100 %)
Keuangan	: 100 %
d). Nama Proyek	: Penggunaan AK Bupati Tentang SIMDA.
Tujuan Proyek	: Untuk Penyediaan, Penyajian dan Penyimpanan Informasi bagi tiap Pimpinan dalam mengambil keputusan.
Tahun Anggaran	: 1994 / 1995
Sasaran	: Pelayanan informasi yang benar, tepat, cepat bagi pimpinan dalam mengambil keputusan.
Tolok ukur dan Kegiatan	: SK Bupati mengenai SIMDA.
Dampak dan Manfaat	: Informasi diperoleh dengan cepat, tepat dan benar.
Nilai Proyek	: 2.000.000,-

Realisasi Fisik	:	30 (100 %)
Keuangan	:	100 %
e). Nama Proyek	:	Ekspor Tata naskah Dinas Kabupaten dan Desa.
Tujuan Proyek	:	Memudahkan dalam melaksanakan Pedoman Tentang Naskah Dinas Kabupaten dan Desa.
Tahun Anggaran	:	1994 / 1995
Sasaran	:	Aparatur di Lingkungan Pemda Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo dan Pemerintahan Desa.
Tolok ukur dan Kegiatan	:	Aparat mengetahui, melaksanakan pedoman Tata Naskah Dinas Kabupaten dan Desa.
Dampak dan Manfaat	:	Aparat Kabupaten dan Desa melaksanakan Tata Naskah Dinas sesuai Pedoman.
Nilai Proyek	:	2.000.000,-
Realisasi	:	
Fisik	:	100 (100 %)
Keuangan	:	100 %
f). Nama Proyek	:	Pembinaan ORTALA.
Tujuan Proyek	:	Untuk mencapai dayaguna dan hasilguna dalam melaksanakan tugas suatu organisasi.
Tahun Anggaran	:	1995 / 1996
Sasaran	:	Peningkatan pengetahuan Pejabat Struktural dan Non Struktural di Pemda Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.
Tolok ukur dan Kegiatan	:	SK Bupati Tentang Uraian Tugas Setwilda dan Set DPRD, SK Bupati Tentang Pelayanan Umum, Pembuatan Pedoman Organisasi Pemerintah di Daerah.
Dampak dan Manfaat	:	Pelaksanaan tugas-tugas instansi berdasarkan peraturan yang berlaku.
Nilai Proyek	:	14.000.000,-
Realisasi	:	
Fisik	:	70 (100 %)
Keuangan	:	100 %
g). Nama Proyek	:	Penyempurnaan Kelembagaan dan uraian tugas.
Tujuan Proyek	:	Memperlancar Pelaksanaan Tugas.
Tahun Anggaran	:	1996 / 1997

Sasaran	: Aparat dalam melaksanakan tugas tak melayani keragu-raguan.
Tolok ukur dan Kegiatan	: SK Bupati Tentang Uraian Tugas, Laporan Hasil Anjab di Kecamatan, TUTI dan DLLAJ.
Dampak dan Manfaat	: Mempermudah Pengelolaan Perpustakaan.
Nilai Proyek	: 20.000.000,-
Realisasi	
Fisik	: 30 (40 %)
Keuangan	: 8.000.000 (40 %)

2. Setwilda (Bagian Penyusun Program)

a). Nama Proyek

Tujuan Proyek	: Komputerisasi MAPATDA.
Tahun Anggaran	: Meningkatkan Kemampuan Aparat mengenai Pendapatan Daerah.
Sasaran	: 1994 / 1995
Tolok ukur dan Kegiatan	: Pajak dan Retribusi.
Dampak dan Manfaat	: Ketetapan Wajib Pajak dan Retribusi.
Nilai Proyek	: Meningkatkan PAD.
Realisasi	: 120.000.000,-
Fisik	: 100 %
Keuangan	: 100 %

b). Nama Proyek

Tujuan Proyek	: Kursus Perpustakaan.
Tahun Anggaran	: Meningkatkan Perpustakaan.
Sasaran	: 1994 / 1995
Tolok ukur dan Kegiatan	: Aparat agar mau dan mampu.
Dampak dan Manfaat	: Sekretariat.
Nilai Proyek	: Meningkatkan Sumber Daya Manusia.
Realisasi	: 5.750.000,-
Fisik	: 100 %
Keuangan	: 100 %

c). Nama Proyek

Tujuan Proyek	: Peningkatan Kualitas dan Pembinaan Aparat Itwilcab.
Tahun Anggaran	: Meningkatkan Aparat yang bersih dan berwibawa.
Sasaran	: 1994 / 1995
Tolok ukur dan Kegiatan	: Pemeriksaan dan Pembinaan Aparat.
Dampak dan Manfaat	: Aparat Itwilcab.
Nilai Proyek	: Pendayagunaan Sistem Pelaksanaan Pengawasan.

Realisasi	
Fisik	: 100 %
Keuangan	: 100 %
d). Nama Proyek	: Pengawasan Fungsional.
Tujuan Proyek	: Peningkatan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan.
Tahun Anggaran	: 1995 / 1996
Sasaran	: Menciptakan Aparat Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Tolok ukur dan Kegiatan	: Koordinasi Penanganan tindak lanjut LHP.
Dampak dan Manfaat	: Agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Nilai Proyek	: 22.000.000,-
Realisasi	
Fisik	: 100 %
Keuangan	: 100 %
e). Nama Proyek	: Analisis Kemampuan Aparat Pemerintah Daerah.
Tujuan Proyek	: Peningkatan Kualitas Aparat.
Tahun Anggaran	: 1996 / 1997
Sasaran	: Berdayaguna dan Berhasilguna.
Tolok ukur dan Kegiatan	: Pengendalian Sarana dan Prasarana.
Dampak dan Manfaat	: Aparat Pemerintah agar lebih berkualitas.
Nilai Proyek	: 4.500.000,-
Realisasi	
Fisik	: 15 %
Keuangan	: 15 %
f). Nama Proyek	: Peningkatan Pengawasan Fungsional.
Tujuan Proyek	: Menciptakan Aparat yang bersih dan berwibawa.
Tahun Anggaran	: 1996 / 1997
Sasaran	: Pemeriksaan dan Pembinaan Aparat.
Tolok ukur dan Kegiatan	: 5 Kegiatan.
Dampak dan Manfaat	: Aparat Pemerintah agar lebih berwibawa.
Nilai Proyek	: 22.000.000,-
Realisasi	
Fisik	: 0 %
Keuangan	: 0 %

g). Nama Proyek	:	Diklat Peningkatan Kualitas Aparat Pemda Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.
Tujuan Proyek	:	Meningkatkan Kualitas Aparat agar lebih berdayaguna dan berhasilguna.
Tahun Anggaran	:	1996 / 1997
Sasaran	:	Eselon IV dari Aparat Pemerintah.
Tolok ukur dan Kegiatan	:	Adum = 30 Orang, Spama = 10 Orang, ALM = 30 Orang.
Dampak dan Manfaat	:	Kualitas Aparat lebih berdayaguna.
Nilai Proyek	:	182.000.000,-
Realisasi	:	
Fisik	:	30 %
Keuangan	:	30 %
3. Setwilda (Bagian Pendes) :		
a). Nama Proyek	:	Penyelenggaraan Lomba Desa.
Tujuan Proyek	:	Meningkatkan Kemampuan Aparat Desa dan Partisipasi Masyarakat.
Tahun Anggaran	:	1994 / 1995
Sasaran	:	Aparat Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.
Tolok ukur dan Kegiatan	:	AP, Penilaian, Pembinaan.
Dampak dan Manfaat	:	Memacu Aparat Pemerintah Desa dan Warga Masyarakat dalam meningkatkan pembangunan di Desanya.
Nilai Proyek	:	3.000.000,-
Realisasi	:	
Fisik	:	100 %
Keuangan	:	100 %
b). Nama Proyek	:	Pembinaan LMD.
Tujuan Proyek	:	Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pemerintahan Desa.
Tahun Anggaran	:	1994 / 1995
Sasaran	:	Aparat LMD.
Tolok ukur dan Kegiatan	:	AP.
Dampak dan Manfaat	:	Meningkatkan dan Memacu Anggota LMD untuk turut berperan aktif di dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa.
Nilai Proyek	:	1.800.000,-
Realisasi	:	100 %
c). Nama Proyek	:	Pengadaan Administrasi Perangkat Desa.
Tujuan Proyek	:	Meningkatkan Administrasi Perangkat Desa.

Tahun Anggaran	: 1994 / 1995
Sasaran	: Aparat Pemerintah Desa Sekabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.
Tolok ukur dan Kegiatan	: AP, Pengadaan File.
Dampak dan Manfaat	: Meningkatkan Tertib Administrasi Perangkat Desa, khususnya tentang file/data masing-masing aparat.
Nilai Proyek	: 2.500.000,-
Realisasi	: 2.499.800 (99,9 %)
d). Nama Proyek	: Bantuan Administrasi kepada Desa.
Tujuan Proyek	: Meningkatkan dan menambah semangat dan motivasi kerja aparat.
Tahun Anggaran	: 1994 / 1995
Dampak dan Manfaat	: Menambah semangat dan motivasi kerja Aparat Pemerintah Desa.
Nilai Proyek	: 50.000.000,-
Realisasi	: 100 %

4. Setwilda (Bagian Tata Pemerintahan) :

a). Nama Proyek	: Pembinaan Perangkat TUTI dan Kecamatan.
Tujuan Proyek	: Meningkatkan Kualitas Aparat Pemerintah.
Tahun Anggaran	: 1995 / 1996
Tolok ukur dan Kegiatan	: Tercapainya materi yang direncana-kan, Ceramah dan Diskusi.
Dampak dan Manfaat	: Aparat mempunyai tambahan pengetahuan dan dapat bekerja lebih efektif dan efisien.
Nilai Proyek	: 3.000.000,-
Realisasi	: 45 (100 %)
Fisik	: 100 %
Keuangan	
b). Nama Proyek	: Pembinaan Sat. Pol. PP.
Tujuan Proyek	: Meningkatkan Kemampuan anggota Sat. Pol. PP.
Tahun Anggaran	: 1994 / 1995
Tolok ukur dan Kegiatan	: Pembinaan 45 orang Sat. Pol. PP.
Dampak dan Manfaat	: Kemampuan tugas operasional anggota Sat. Pol. PP. meningkat.
Nilai Proyek	: 1.500.000,-
Realisasi	

Fisik	:	45 (100 %)
Keuangan	:	100 %

5. Setwilda (Bagian Kepegawaian) :

- a). Nama Proyek
 - Tahun Anggaran : 1994 / 1995
 - Nilai Proyek : 389.150.000,-
- b). Nama Proyek
 - Tahun Anggaran : 1995 / 1996
 - Nilai Proyek : 270.681.000,-
- c). Nama Proyek
 - Tahun Anggaran : 1996 / 1997
 - Nilai Proyek : 186.500.000,-

6. Dipenda :

- Nama Proyek : Aplikasi Komputerisasi.
- Tujuan Proyek : Meningkatkan Keterampilan Kerja.
- Tahun Anggaran : 1994 / 1995
- Sasaran : Komputerisasi.
- Tolok ukur dan Kegiatan : Aplikasi Komputerisasi MAPATDA.
- Dampak dan Manfaat : Meningkatkan Keterampilan Kerja.
- Nilai Proyek : 120.000.000,-
- Realisasi
- Fisik : 100 %
- Keuangan : 119.517.200 (99,60 %)

Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Di Luar Sektor PAN)

Dinas PU

Nama Proyek	:	B P J K.
Tujuan Proyek	:	Meningkatkan Sumber Daya Manusia.
Tahun Anggaran	:	1994 / 1995
Sasaran Proyek	:	10 Orang.
Tolok ukur dan Kegiatan	:	Kursus Komputer.
Dampak & Manfaat Proyek	:	Memperlancar Pelaksanaan Tugas.
Nilai Proyek	:	4.000.000,-
Realisasi		
Fisik	:	100 %
Keuangan	:	100 %

Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Di Luar Sektor PAN)

Dinas Peternakan

Nama Proyek	:	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembinaan KLP DPG dan Teknologi Pola Terpadu.
Tujuan	:	Meningkatkan Kemampuan para petugas baik teknis/administrasi.
Tahun Anggaran	:	1996 / 1997
Sasaran	:	Para Petugas teknis dan administrasi.
Tolok ukur dan Kegiatan	:	SLUBA, Temu Petugas.
Dampak dan Manfaat	:	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petugas.
Nilai Proyek	:	10.000.000,-
Realisasi	:	9 %
Fisik	:	4,3 %
Keuangan		

